**SALINAN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 4

(1) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat nasional dan pulau/kepulauan dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. pengumpulan dan pengelompokan data dan informasi;
b. analisis data dan informasi;
c. pendokumentasian; dan
d. evaluasi.

Pasal 5

(1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi data dan informasi:
a. spasial; dan
b. nonspasial.

(2) Data dan informasi spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. kawasan hutan;
b. sistem lahan;
c. fungsi Ekosistem gambut;
d. daerah aliran sungai;
e. penutup lahan;
f. potensi energi dan sumber daya mineral;
g. kebencanaan geologi;
h. bahasa;
i. sebaran suku; dan
j. data dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup.

(3) Data dan informasi nonspasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. jumlah penduduk;
b. kerentanan terhadap perubahan iklim;
c. kearifan lokal;
d. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup; dan
e. data dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikumpulkan dengan cara:
a. pelibatan masyarakat;
b. survey lapangan;

c. penggunaan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. penggunaan data dan informasi yang telah diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
d. penggunaan data dan informasi resmi lainnya yang relevan.

Pasal 6

(1) Pengelompokan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data dan informasi hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
a. data dan informasi Sumber Daya Alam; dan
b. data dan informasi wilayah Ekoregion.

(3) Data dan informasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. potensi dan ketersediaan, meliputi:
   1. sumber daya alam tidak terbarukan; dan
   2. sumber daya alam terbarukan, berupa:
      a) tidak akan habis; atau
      b) memiliki potensi terbarukan;
b. jenis yang dimanfaatkan sebagai:
   1. material; dan
   2. Jasa Lingkungan Hidup;
c. bentuk penguasaan, oleh:
   1. pemerintah;
   2. Pelaku Usaha yang memiliki perizinan berusaha; dan
   3. masyarakat;
d. pengetahuan pengelolaan, berdasarkan:
   1. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   2. kearifan lokal;
e. bentuk kerusakan, meliputi:
   1. degradasi Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan hidup; dan/atau
   2. deplesi Sumber Daya Alam;

   dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

(4) Data . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Data dan informasi wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. wilayah Ekoregion darat, meliputi:
1. karakteristik bentang alam;
2. daerah aliran sungai;
3. iklim;
4. flora dan fauna;
5. sosial budaya;
6. ekonomi; dan
7. kelembagaan masyarakat,
dan
b. wilayah Ekoregion laut, meliputi:
1. geologi dan morfologi dasar laut;
2. oseanografi; dan
3. keanekaragaman hayati.

Pasal 7

(1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap data dan informasi yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. verifikasi data dan informasi; dan
b. pengolahan data dan informasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dan huruf d.

(4) Analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan rincian Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion.

Pasal 8

Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 disusun dalam bentuk dokumen cetak dan/atau elektronik.

Pasal 9 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

(1) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan evaluasi oleh Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan:
   a. data dan informasi yang digunakan ketika pelaksanaan inventarisasi, dengan ketersediaan data dan informasi sejenis yang mutakhir; dan
   b. metode yang digunakan ketika pelaksanaan inventarisasi, dengan metode mutakhir.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemutakhiran data dan informasi.

Pasal 11

Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan:
a. wilayah Ekoregion;
b. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
c. RPPLH.

Pasal 12

(1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang berada di dalam wilayah administratifnya.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri menetapkan wilayah Ekoregion.

(3) Tata . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Tata cara pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENETAPAN WILAYAH EKOREGION

Pasal 13

(1) Penyusunan dan penetapan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat nasional dan tingkat pulau/kepulauan.

(2) Wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. wilayah darat; dan
b. wilayah laut.

Pasal 14

(1) Wilayah Ekoregion darat disusun dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a.

(2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. delineasi; dan
b. deskripsi.

(3) Hasil penyusunan wilayah Ekoregion darat dituangkan dalam bentuk informasi geospasial.

Pasal 15

(1) Wilayah Ekoregion laut disusun dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.

(2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. delineasi; dan
b. deskripsi.

(3) Hasil . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Hasil penyusunan wilayah Ekoregion laut dituangkan dalam bentuk informasi geospasial.

Pasal 16

(1) Hasil penyusunan wilayah Ekoregion darat dan wilayah Ekoregion laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri.

(2) Penetapan wilayah Ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri berkoordinasi dengan:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 17

Penetapan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disajikan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

Pasal 18

Wilayah Ekoregion yang telah ditetapkan dilakukan peninjauan dalam hal:
a. terjadi peristiwa alam dan/atau non-alam yang telah mengubah bentuk permukaan bumi;
b. perubahan batas wilayah negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara; dan/atau
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan penentuan wilayah.

BAB IV . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

BAB IV

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 19

Penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan;
b. gubernur, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup provinsi dan Ekoregion lintas kabupaten/kota; dan
c. bupati/wali kota, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan Ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 20

(1) Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan.

(2) Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup provinsi dan Ekoregion lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

(3) Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan Ekoregion di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan berdasarkan hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion kabupaten/kota.

(4) Hasil . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(4) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan untuk mendapatkan informasi ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Alam.

Pasal 21

Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilakukan dengan menggunakan metode:
a. kinerja Jasa Lingkungan Hidup;
b. jejak ekologis dan biokapasitas; atau
c. metode lainnya yang diakui secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 22

(1) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang telah disusun, dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status Lingkungan Hidup berupa:
   a. terlampaui; atau
   b. belum terlampaui.

(2) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk:
   a. Keputusan Menteri untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan;
   b. Keputusan gubernur untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup provinsi dan Ekoregion lintas kabupaten/kota; dan
   c. Keputusan bupati/wali kota, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan Ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 23

Dalam menetapkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Menteri berkoordinasi dengan:

a. menteri . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 24

(1) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Evaluasi dilakukan untuk memutakhirkan status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 25

Tata cara penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) RPPLH terdiri atas:
a. RPPLH nasional;
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupaten/kota.

(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
a. Menteri, untuk RPPLH nasional;
b. gubernur, untuk RPPLH provinsi; dan
c. bupati/wali kota, untuk RPPLH kabupaten/kota.

(3) Dalam . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

(3) Dalam penyusunan:
a. RPPLH provinsi, gubernur berkonsultasi dengan Menteri; dan
b. RPPLH kabupaten/kota, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berkonsultasi dengan gubernur.

Pasal 27

(1) RPPLH nasional disusun berdasarkan:
a. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat nasional; dan
b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan.

(2) RPPLH provinsi disusun berdasarkan:
a. RPPLH nasional;
b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah provinsi.

(3) RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan:
a. RPPLH provinsi;
b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah kabupaten/kota.

Pasal 28

(1) Penyusunan RPPLH memperhatikan aspek:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
d. kearifan lokal;
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.

(2) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pengelompokan data dan informasi Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 29

RPPLH disusun dengan tahapan:
a. identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. perumusan RPPLH; dan
d. penetapan RPPLH.

Pasal 30

(1) Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup, dan responsnya.

(2) Identifikasi potensi dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup.

(3) Hasil identifikasi potensi dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyusun skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjawab tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 31

(1) Penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) menggunakan pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) atau pendekatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui:
a. konsultasi publik; dan

b. pembahasan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. pembahasan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.

(3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan:
a. akademisi; dan/atau
b. Organisasi Lingkungan Hidup.

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. keterkaitan antarinstansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah di dalam wilayah/daerah skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah/daerah skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
c. instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan pada sebuah kawasan di daerah tersebut.

(5) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menghasilkan:
a. rumusan visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
b. rumusan RPPLH.

(6) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dirumuskan berdasarkan:
a. ketersediaan sumber daya;
b. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan/atau
c. disrupsi teknologi.

Pasal 32

(1) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b meliputi:
a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan

d. rencana . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
a. intensitas pengaturan pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; dan
b. penyediaan lanskap dengan fungsi lindung.

(3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
a. pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan;
b. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas air, lahan, laut, dan udara; dan
c. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas Ekosistem, keanekaragaman hayati, dan wilayah penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

(4) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
a. pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; dan
b. penerapan teknologi ramah lingkungan.

(5) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:
a. upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana; dan
b. upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasal 33

(1) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
a. perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup tinggi;

b. pemulihan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup;
c. pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alam berdasarkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
d. pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam;
e. pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah;
f. penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission*; dan/atau
g. peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana.

(3) Kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disajikan berdasarkan:
a. pulau/kepulauan, untuk RPPLH nasional; dan
b. wilayah administratif provinsi, untuk RPPLH provinsi; dan
c. wilayah administratif kabupaten/kota, untuk RPPLH kabupaten/kota.

Pasal 34

(1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

(2) Pemuatan RPPLH ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan melalui penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.

(3) Tata cara penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPPLH digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:
a. RPPLH berbasis media lingkungan;
b. RPPLH berbasis Ekosistem; dan
c. kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Bagian Ketiga
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

Pasal 35

(1) RPPLH nasional disusun dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2) Hasil penyusunan pada tahap identifikasi dan skenario untuk:
   a. identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup; dan
   b. skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa gambaran untuk menjawab tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aspek:
   a. populasi dan ekonomi;
   b. tekanan pada Ekosistem dan lahan;
   c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, serta kualitas Lingkungan Hidup; dan
   d. risiko bencana alam dan nonalam, serta kerugian ekonomi.

(4) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

Pasal 36

(1) Berdasarkan skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dirumuskan:
   a. visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
   b. RPPLH dalam bentuk kebijakan, strategi dan program.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 37 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 37

(1) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 38

(1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan RPPLH.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan RPPLH nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Dalam hal suatu wilayah administratif berada dalam satu Ekoregion berdasarkan hasil skenario rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), perumusan dan pelaksanaan RPPLH dilakukan melalui konsultasi oleh:
a. Menteri, untuk lintas provinsi; dan
b. gubernur, untuk lintas kabupaten/kota.

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan RPPLH dalam satu wilayah Ekoregion dilaksanakan secara terintegrasi dalam setiap tingkatan RPPLH.

(5) Pelaksanaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk kerja sama antarpemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah Ekoregion.

(6) Tata cara kerja sama antarpemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 39

(1) RPPLH provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi.

(2) RPPLH kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagai Dasar Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 40

(1) RPPLH digunakan sebagai dasar pemanfaatan Sumber Daya Alam.

(2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan Fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 42

(1) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RPPLH.

(2) Pemantauan dilakukan terhadap indikator kinerja utama RPPLH.

(3) Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 43 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 43

(1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.

(2) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.

(3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
   a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
   c. indikator kinerja utama RPPLH.

(4) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.

Pasal 44

Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) serta Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) huruf c untuk:
a. RPPLH Nasional tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
b. RPPLH provinsi dan kabupaten/kota, disusun oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kepada indikator kinerja RPPLH Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pemantauan, dan evaluasi RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

(1) Pembinaan dilaksanakan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembinaan dilaksanakan oleh:
   a. Menteri, kepada:
      1. gubernur;
      2. masyarakat;
      3. perguruan tinggi; dan/atau
      4. Organisasi Lingkungan Hidup;
   b. gubernur, kepada:
      1. bupati/wali kota; dan/atau
      2. masyarakat;
      3. perguruan tinggi; dan/atau
      4. Organisasi Lingkungan Hidup,
      dan
   c. bupati/wali kota, kepada:
      1. perangkat daerah tingkat kabupaten/kota;
      2. masyarakat;
      3. perguruan tinggi; dan/atau
      4. Organisasi Lingkungan Hidup.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

(4) Pembinaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 47

Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
a. pendampingan;
b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
c. bimbingan teknis;
d. konsultasi;

e. pendidikan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

e. pendidikan dan pelatihan;
f. penelitian dan pengembangan;
g. penyebarluasan informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 48

Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
a. penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup dan/atau penyusunan RPPLH;
b. pemberian saran, pendapat, dan tanggapan; dan/atau
c. penyampaian pengaduan dan umpan balik.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 49

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya membangun sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:
a. sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat nasional;
b. sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi; dan
c. sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota.

(3) Sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:
a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
b. wilayah Ekoregion;
c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
d. RPPLH; dan

e. hasil . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

e. hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 50

Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan pertukaran informasi melalui sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 51

(1) Sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diintegrasikan ke dalam sistem informasi Lingkungan Hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan penyelenggaraan perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota:
a. yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan evaluasi; dan

b. yang . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. yang sedang dalam proses penetapan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meninjau kesesuaian penyusunan RPPLH dengan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(4) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan:
a. RPPLH sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, RPPLH dinyatakan tetap berlaku; atau
b. RPPLH tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(5) RPPLH yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dalam peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diketahuinya hasil evaluasi.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54

RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota wajib ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

### Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 254007 A

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut menjadi kunci bagi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memajukan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan Ekosistem.

Tantangan yang dihadapi adalah kawasan alami yang memiliki fungsi penting sebagai penyedia Jasa Lingkungan Hidup, ditransformasikan menjadi lahan pertanian, permukiman, serta industri. Eksploitasi hutan, ekspansi pertanian, dan tambang terbuka menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan Lingkungan Hidup. Hal ini mengakibatkan kerusakan fungsi Ekosistem, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang pada gilirannya mengancam pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam haruslah sejalan dengan fungsi dan kapasitas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan haruslah sejalan dengan aspek perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan utama bagi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut memerlukan integrasi konsep Lingkungan Hidup dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai pentingnya perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahapan tersebut meliputi kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memahami kondisi dan tantangan

yang . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

yang dihadapi, penetapan wilayah Ekoregion sebagai basis pengelolaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi, dan penyusunan RPPLH yang merangkum strategi dan tindakan konkret untuk periode 30 (tiga puluh) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa RPPLH digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, RPPLH dapat memperkuat penyelenggaraan rencana pembangunan sekaligus memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Guna membangun efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh atas perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam rencana pembangunan Indonesia, dan arahan bagi pemanfaatan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "data dan informasi spasial" adalah data dan informasi yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeference*) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

Huruf b . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data dan informasi nonspasial" adalah data dan informasi yang tidak terkait dengan ruang dan lokasi geografis, dan terfokus pada atribut, karakteristik, atau variabel yang tidak terkait dengan letak geografis, antara lain data dan informasi mengenai usia, jenis kelamin, pendidikan, data Lingkungan Hidup, kesehatan, dan ekologi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem lahan" adalah sistem yang mengacu pada pola, proses, dan interaksi yang terjadi di atas permukaan bumi yang melibatkan penggunaan lahan oleh manusia dan dinamika alam yang mempengaruhinya. Sistem ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan lahan, termasuk pola penutupan lahan, pemanfaatan Sumber Daya Alam, aktivitas manusia, dan dampak Lingkungan Hidup.

Huruf c

Fungsi ekosistem gambut meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "daerah aliran sungai" adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penutup lahan" adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut.

Huruf f . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kebencanaan geologi" adalah peristiwa alam yang merusak dan menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh proses-proses geologis antara lain pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gempa bumi dan/atau tsunami, aktivitas vulkanik yang menyebabkan letusan gunung api, serta proses geomorfologi yang menyebabkan erosi, sedimentasi, gerakan tanah, dan longsor.

Huruf h

Bahasa digunakan sebagai bahan penyusunan informasi wilayah Ekoregion, untuk aspek sosial budaya.

Huruf i

Sebaran suku digunakan sebagai bahan penyusunan informasi wilayah Ekoregion, untuk aspek sosial budaya.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerentanan terhadap perubahan iklim" adalah tingkat kemampuan suatu sistem, baik itu manusia, lingkungan alam, maupun infrastruktur, dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup" adalah gambaran mengenai cadangan/aset Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta perubahannya yang dapat menjelaskan keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas Lingkungan Hidup serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan (*non renewable resources*) merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dipulihkan sama sekali karena pembentukannya sangat lambat dan memerlukan waktu yang demikian lama antara lain bahan bakar fosil dan mineral (*metallic and non-metalic minerals*). Dalam konteks penyediaan basis data nasional menjadi dasar bagi pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Angka 2

Butir a)

Sumber daya alam yang tidak akan habis (*perpetual resources*) merupakan Sumber Daya Alam yang selalu tersedia dengan jumlah tak terbatas antara lain energi matahari, angin, dan panas bumi. Meskipun tidak akan habis, penyediaan basis data nasional terhadap jenis Sumber Daya Alam ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Butir b)

Sumber Daya Alam yang memiliki potensi terbarukan (*renewable resources*) merupakan Sumber Daya Alam yang dalam waktu pendek dapat berkurang tetapi dalam jangka panjang dapat pulih kembali karena proses alam antara lain air, lahan, udara dan atmosfer, keanekaragaman

hayati, . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

hayati, dan laut. Dengan potensi terbarukan, penyediaan basis data nasional terhadap jenis Sumber Daya Alam ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang harus dijaga secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Alam sebagai material" adalah kondisi yang merujuk pada penggunaan Sumber Daya Alam sebagai bahan mentah untuk keperluan manusia, terutama dalam konteks ekstraksi, pengolahan, dan pemanfaatan untuk berbagai keperluan ekonomi dan industri.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Alam sebagai Jasa Lingkungan Hidup" adalah kondisi yang merujuk pada manfaat Ekosistem bagi manusia secara tidak langsung melalui penyediaan berbagai layanan Ekosistem yang penting.

Huruf c

Angka 1

Penguasaan oleh negara dalam hal ini memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta tafsir konstitusionalnya yang menyebutkan hak menguasai negara diartikan bukan negara memiliki namun melakukan perumusan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), dan melakukan pengelolaan (*beheersdaad*).

Angka 2

Penguasaan oleh Pelaku Usaha yang memiliki perizinan berusaha diartikan sebagai entitas hukum yang diberikan suatu perizinan untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.

Angka 3

Penguasaan oleh masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai orang-perseorangan, kelompok orang, atau masyarakat adat dan/atau masyarakat hukum adat.

Masyarakat . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Alam serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat diartikan sebagai subjek hukum yang mendapat pengakuan atas hak-hak mereka sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "pengetahuan berdasarkan kearifan lokal" adalah pengetahuan tradisional atau lokal yang dimiliki oleh suatu komunitas atau budaya tertentu yang diperoleh dari pengalaman langsung, observasi, dan interaksi dengan lingkungan alam.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "karakteristik bentang alam" adalah ciri fisik dan karakteristik lain yang membentuk suatu wilayah mencakup elemen antara lain geologi, geomorfologi, jenis tanah, dan iklim.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "daerah aliran sungai" adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau

gunung . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "iklim" adalah keadaan atmosfer dalam periode yang panjang dan dalam wilayah yang luas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "morfologi dasar laut" adalah geomorfologi laut dan batimetri.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "oseanografi" adalah arus laut pasang surut, *upwelling* suhu, salinitas, derajat keasaman, dan klorofil.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "keanekaragaman hayati" adalah mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan ikan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "delineasi" adalah kegiatan untuk menentukan batas wilayah pada peta.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah pemberian informasi atau gambaran tentang suatu objek, tempat, peristiwa, atau konsep secara rinci dan jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "delineasi" adalah kegiatan untuk menentukan batas wilayah pada peta.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah pemberian informasi atau gambaran tentang suatu objek, tempat, peristiwa, atau konsep secara rinci dan jelas.

Ayat (3) . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Hasil penetapan wilayah Ekoregion dapat didayagunakan sebagai aspek perlindungan Lingkungan Hidup dan sosial dalam perencanaan pembangunan sektoral antara lain tata ruang, mineral dan batubara, pertanian, pariwisata, dan sektor terkait lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Metode jejak ekologis (*ecological footprint*) dimaksudkan untuk menunjukkan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya dan juga untuk menyimpan Sumber Daya Alam untuk generasi di masa depan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "metode lainnya yang diakui secara nasional/internasional" adalah metode yang sudah terjamin standar, konsistensi, validitas ilmiah, dan efektivitasnya dalam penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Salah satu contohnya yaitu metode sistem dinamis.

Pasal 22 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup, dan responsnya adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "faktor pendorong Lingkungan Hidup" adalah suatu hal atau keadaan yang mendorong terjadinya perubahan lingkungan akibat dinamika sosial. Contoh faktor pendorong antara lain pertumbuhan penduduk di perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan industrialisasi.

Yang dimaksud dengan "tekanan Lingkungan Hidup" adalah aktivitas manusia yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi pendorong. Contoh tekanan antara lain pemekaran perkotaan, munculnya usaha dan/atau kegiatan baru, dan meningkatnya konversi dan pembukaan lahan.

Yang dimaksud dengan "kondisi Lingkungan Hidup" adalah keadaan saat ini atau yang sedang berlangsung dan dijelaskan dalam bentuk Status. Contoh penerapan Status Lingkungan Hidup antara lain:

1. Status . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

1. Status Baik atau Tercemar, untuk menentukan status Lingkungan Hidup berbasis media lingkungan (air, udara, air laut);
2. Status Baik atau Rusak, untuk menentukan status Lingkungan Hidup berbasis Ekosistem (ekosistem gambut, padang lamun, dan mangrove); dan
3. Status Lingkungan Hidup Terlampaui atau Belum Terlampaui, untuk penentuan status Lingkungan Hidup berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan "dampak Lingkungan Hidup" adalah perubahan pada Lingkungan Hidup dan sistem sosial-ekonominya sebagai akibat dari tekanan. Contoh *Dampak* antara lain turunnya kemampuan produksi pangan, turunnya Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dan kerusakan Ekosistem.

Yang dimaksud dengan "respons" adalah tindakan reaktif maupun proaktif untuk mengendalikan, mengantisipasi, mengelola faktor pendorong, tekanan, kondisi, dan dampak. Contoh respons antara lain mengembangkan kawasan perkotaan dengan metode kota hijau, pengembangan sistem transportasi massal ramah lingkungan, perumusan ekonomi hijau dan biru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyusunan skenario Lingkungan Hidup" adalah kegiatan untuk memahami berbagai kekuatan penggerak perubahan yang mempengaruhi pembentukan kondisi di masa depan, untuk kemudian ditarik mundur dengan kondisi Lingkungan Hidup saat ini.

Waktu 30 (tiga puluh) tahun merupakan waktu yang dianggap cukup untuk melihat dampak pembangunan terhadap perbaikan/kondisi lingkungan serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan Lingkungan Hidup.

Pasal 31

Ayat (1)

Pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) digunakan untuk memahami berbagai kekuatan penggerak perubahan yang mempengaruhi pembentukan kondisi di masa depan, untuk kemudian ditarik mundur dengan kondisi Lingkungan Hidup saat ini.

Ayat (2) . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" adalah gambaran atau citra jelas tentang Lingkungan Hidup di masa depan yang diinginkan atau diharapkan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "disrupsi teknologi" adalah suatu kondisi terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, sehingga mengubah suatu sistem konvensional. Sebagai contoh disrupsi teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ayat (2)

RPPLH berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk memastikan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga kelestarian lingkungan hidup. Pada tataran penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, juga dilakukan penerapan kajian lingkungan hidup strategis yang turut memperhatikan RPPLH, sehingga akan menciptakan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "RPPLH berbasis media lingkungan" antara lain rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air laut, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "RPPLH berbasis Ekosistem" antara lain rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dan Ekosistem lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" antara lain rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan rencana sektoral lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kerja sama antar pemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah Ekoregion, karena memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebelum tersusunnya RPPLH diperlukan pada sektor antara lain tata ruang, pariwisata, pertambangan mineral dan batubara, pertanian, perumahan, dan permukiman.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan "masyarakat" termasuk asosiasi profesi, akademisi, atau masyarakat intelektual dengan penyebutan lainnya.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7113

LexJustisia



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

# TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Inventarisasi Lingkungan Hidup terdiri atas tingkat nasional, pulau/kepulauan, dan wilayah Ekoregion, dengan pembagian tugas dan kewenangan, sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Menteri, untuk inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat nasional dan pulau/kepulauan; dan
2. Dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, untuk inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion yang berada di dalam wilayah administratifnya.

Untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap, pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup dilakukan melalui tahapan:

1. pengumpulan dan pengelompokan data dan informasi;
2. analisis data dan informasi;
3. pendokumentasian; dan
4. evaluasi,

yang setiap tahapan dijelaskan secara lebih rinci sebagaimana bagan dan penjelasan berikut:

## A. PENGUMPULAN DAN PENGELOMPOKAN DATA DAN INFORMASI

Tahapan pertama dalam melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup yaitu pengumpulan data dan informasi yang meliputi:

1. Spasial, berupa:
   a. kawasan hutan;
   b. sistem lahan;
   c. fungsi Ekosistem gambut;
   d. daerah aliran sungai;
   e. penutup lahan;
   f. potensi energi dan sumber daya mineral;
   g. kebencanaan geologi;
   h. bahasa;
   i. sebaran suku; dan
   j. data dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup.
2. Nonspasial, berupa:
   a. jumlah penduduk;
   b. kerentanan terhadap perubahan iklim;

c. kearifan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

c. kearifan lokal;
d. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup; dan
e. data dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup.

Pengumpulan data dan informasi sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara:

1. pelibatan masyarakat dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mendapatkan informasi yang relevan untuk pemecahan masalah atau pengambilan Keputusan. Adapun beberapa bentuk pelibatan Masyarakat antara lain konsultasi publik, diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*/FGD), pemetaan partisipatif, pengamatan lapangan, dialog multi pihak, dan kegiatan lain yang melibatkan masyarakat dalam memperoleh data dan informasi.
2. survei lapangan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, pengukuran, dan/atau melaksanakan wawancara kepada pihak terkait. Penyelenggaraan survei lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Survei lapangan mencakup penggunaan instrumen pengamatan dan pengukuran yang akurat dan valid serta pelaksanaan wawancara yang sistematik dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang lengkap dan relevan mengenai kondisi lingkungan hidup yang diamati.
3. penggunaan data dan informasi yang telah diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah dan/atau nonkementerian dilaksanakan melalui kebijakan satu data, kebijakan satu peta, maupun perjanjian kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. Penggunaan data dan informasi dari kementerian/lembaga pemerintah dan/atau non-pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang berlaku mengenai berbagi pakai data. Proses berbagai pakai data dapat melalui pertukaran data fisik, data digital, dan/atau data yang berupa layanan web (*services/ Application Programming Interfaces* (API)).
4. penggunaan data dan informasi resmi lainnya yang relevan didapatkan melalui proses pendekatan studi pustaka, pelaksanaan forum komunikasi data dan informasi lingkungan hidup, dan/atau pengumpulan langsung kepada pihak terkait sesuai dengan tema dan kebutuhan.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan menjadi data dan informasi Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data dan informasi Sumber Daya Alam meliputi:
   a. potensi dan ketersediaan, meliputi:
      1) sumber daya alam tidak terbarukan; dan

2) sumber . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

2) sumber daya alam terbarukan, berupa:
   a) tidak akan habis; atau
   b) memiliki potensi terbarukan;

b. jenis yang dimanfaatkan sebagai:
   1) material; dan
   2) Jasa Lingkungan Hidup;

c. bentuk penguasaan, oleh:
   1) pemerintah;
   2) pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha; dan
   3) masyarakat;

d. pengetahuan pengelolaan, berdasarkan:
   1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   2) kearifan lokal;

e. bentuk kerusakan, meliputi:
   1) degradasi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup; dan/atau
   2) deplesi sumber daya alam; dan
   3) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

2. Data dan informasi wilayah Ekoregion, terdiri dari:
   a. wilayah Ekoregion darat, meliputi:
      1) karakteristik bentang alam;
      2) daerah aliran sungai;
      3) iklim;
      4) flora dan fauna;
      5) sosial budaya;
      6) ekonomi; dan
      7) kelembagaan masyarakat, dan
   b. wilayah Ekoregion laut, meliputi:
      1) geologi dan morfologi dasar laut;
      2) oseanografi; dan
      3) keanekaragaman hayati.

Terhadap data dan informasi yang bersumber dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pengelompokannya dilakukan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**KELOMPOK A. SUMBER DAYA ALAM**

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| A.1. Potensi dan Ketersediaan SDA | A.1.1 Sumber Daya Alam tidak terbarukan | A.1.1.1 Peta Sumber Daya Mineral | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah yang memiliki potensi |

energi . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | energi dan sumber daya mineral | mengenai sumber daya mineral |
| | | A.1.1.2 Peta Kawasan Bentang Alam Karst | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah karakteristik bentang alam karst di Indonesia |
| | | A.1.1.3 Peta Sumber Daya Batubara | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah yang memiliki potensi mengenai batubara |
| | | A.1.1.4 Peta Cekungan Sedimen | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan potensi (volume) cekungan akumulasi sedimen terkait dengan keberadaan potensi hidrokarbon dan potensi penangkapan dan penampungan karbon |
| | | A.1.1.5 Peta Geologi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran satuan batuan dan struktur geologi |

A.1.2 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | A.1.2 Sumber Daya Alam terbarukan (tidak akan habis) | A.1.2.1 Peta Sumber Daya Panas Bumi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah yang memiliki potensi sumber daya panas bumi |
| | | A.1.2.2 Peta Potensi Energi Laut | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah yang memiliki potensi energi laut dan besar kapasitas terpasang |
| | | A.1.2.3 Peta Potensi Energi Surya | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah yang memiliki potensi energi surya dan besar kapasitas terpasang |
| | | A.1.2.4 Peta Potensi Energi Angin | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah yang memiliki potensi energi angin dan besar kapasitas terpasang |
| | | A.1.2.5 Peta Potensi Energi Air/Hidro | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah yang memiliki potensi energi hidro dan besar kapasitas terpasang |

A.1.3 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | A.1.3 Sumber Daya Alam terbarukan (memiliki potensi terbarukan) | A.1.3.1 Peta Cekungan Air Tanah | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran wilayah yang memiliki potensi cekungan air tanah sehingga dapat dijadikan referensi dalam pemanfaatan air tanah |
| | | A.1.3.2 Peta Zona Konservasi Air Tanah | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan zona perlindungan dan pemanfaatan air tanah |
| | | A.1.3.3 Peta Lahan Gambut | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang pertanian | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran lahan gambut yang mengandung informasi penting dalam pemahaman terhadap potensi lahan gambut di suatu wilayah. Baik potensi secara pemanfaatan maupun potensi kerentanan terhadap kebakaran dan degradasi lahan |
| | | A.1.3.4 Peta Tanah Semi-Detail | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang pertanian | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran jenis tanah yang memberikan pemahaman mengenai karakteristik tanah di suatu wilayah sehingga mempermudah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah di suatu wilayah |

A.1.3.5 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.1.3.5 Peta Neraca Sumber Daya Air | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi air berdasarkan kuantitas pemakaian dan kebutuhan |
| | | A.1.3.6 Peta Cadangan karbon | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | dokumentasi Inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi cadangan karbon beserta distribusinya |
| | | A.1.3.7 Peta Sebaran Lokasi Danau, Situ, dan Embung | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | dokumentasi Inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi air berdasarkan lokasi secara geografis sumber-sumber air permukaan selain sungai |
| | | A.1.3.8 Peta Air Tanah | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi air berdasarkan lokasi secara geografis sumber air tanah, ketersediaan air tanah dan infrastruktur dalam pemanfaatannya |

A.1.3.9 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.1.3.9 Peta Ketersediaan Air Tanah | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi ketersediaan air tanah |
| | | A.1.3.10 Peta Mata air | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | dokumentasi Inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi air berdasarkan lokasi secara geografis sumber-sumber mata air |
| | | A.1.3.11 Peta Ketersediaan Air | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi air berdasarkan lokasi wilayah sungai, ketersediaan air dalam wilayah sungai dan kelas neracanya |
| | | A.1.3.12 Peta Mangrove | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai sebaran mangrove beserta kelas tutupan tajuk yang tumbuh baik secara alimiah maupun hasil dari penanaman, di mana dengan informasi ini dapat diketahui potensi keanekaragaman hayati berdasarkan ekosistem mangrove |

A.1.3.13 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.1.3.13 Peta Perjumpaan tumbuhan alam pada kawasan konservasi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi keanekaragaman hayati (tumbuhan) pada wilayah konservasi |
| | | A.1.3.14 Peta Indikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi keanekaragaman hayati di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru |
| | | A.1.3.15 Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran lahan gambut yang mengandung informasi penting dalam pemahaman terhadap potensi lahan gambut di suatu wilayah. Baik potensi secara pemanfaatan maupun potensi kerentanan terhadap kebakaran dan degradasi lahan. |

di . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | di bidang kehutanan | Serta pengetahuan mengenai fungsi ekosistem gambut |
| | | A.1.3.16 Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan sebaran lahan gambut yang mengandung informasi penting dalam pemahaman terhadap potensi lahan gambut di suatu wilayah. Baik potensi secara pemanfaatan maupun potensi kerentanan terhadap kebakaran dan degradasi lahan. Serta pengetahuan mengenai fungsi ekosistem gambut |
| | | A.1.3.17 Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi dari kawasan hutan |
| | | A.1.3.18 Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi laut berdasarkan Jenis dan Kekayaan Perikanan, potensi perikanan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, tingkat |

Indonesia . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

LexJustisia

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | Indonesia (WPPNRI) | | pemanfaatan pengelolaan sumber daya ikan |
| | | A.1.3.19 Peta Sebaran Biota Laut Dilindungi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi laut berdasarkan sebaran biota laut yang dilindungi sehingga mempermudah dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan |
| | | A.1.3.20 Peta Curah Hujan dan Hari Hujan | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi air berdasarkan siklus hidrologisnya |
| | | A.1.3.21 Peta Rata-Rata Curah Hujan Indonesia | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi air berdasarkan siklus hidrologisnya |
| | | A.1.3.22 Peta Terumbu Karang | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi keanekaragaman hayati di laut sehingga dapat diketahui sebaran dan kesehatan terumbu karang. Dengan informasi ini dapat diidentifikasi area-area yang rentan terhadap kerusakan atau |

degradasi . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | degradasi lingkungan, serta merencanakan langkah-langkah konservasi dan manajemen yang tepat |
| | | A.1.3.23 Peta Padang Lamun | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai potensi keanekaragaman hayati di laut sehingga dapat diketahui sebaran dan kesehatan padang lamun. Dengan informasi ini dapat diidentifikasi area yang rentan terhadap kerusakan atau degradasi lingkungan, serta merencanakan langkah konservasi dan manajemen yang tepat |
| | | A.1.3.24 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang pertanian | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai pola atau distribusi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga dalam pemanfaatan lahan dapat diketahui biokapasitas dalam pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat |
| | | A.1.3.25 Peta Lahan Sawah yang Dilindungi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/perta-nahan | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai pola atau distribusi lahan sawah, sehingga dalam pemanfaatan lahan dapat diketahui biokapasitas dalam |

pemenuhan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat |
| | | A.1.3.26 Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang pertanian | dokumentasi inventarisasi Lingkungan Hidup yang menggambarkan mengenai pola atau distribusi tutupan kelapa sawit, sehingga dalam pemanfaatan lahan dapat diketahui biokapasitas dalam pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat |
| A.2. Jenis SDA yang Dimanfaatkan | A.2.1 material | A.2.1.1 Standar Kebutuhan Pangan | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan | tabular total kebutuhan pangan per orang dalam satu tahun |
| | | A.2.1.2 Standar Kebutuhan Sandang | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan | tabular total kebutuhan sandang per orang dalam satu tahun |
| | | A.2.1.3 Standar Kebutuhan Papan | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dan/atau kementerian/ lembaga yang | tabular total kebutuhan papan per orang dalam satu tahun |

menyelenggarakan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang energi | |
| | A.2.2 jasa Lingkungan Hidup | A.2.2.1 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabel yang berisi informasi uraian data mengenai jasa Lingkungan Hidup pengatur air |
| | | A.2.2.2 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabel yang berisi informasi uraian data mengenai jasa Lingkungan Hidup penyedia air |
| | | A.2.2.3 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Karbon | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ | peta dan tabel yang berisi informasi uraian data mengenai jasa Lingkungan Hidup pengatur karbon |

lembaga . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.2.2.4 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabel yang berisi informasi uraian data mengenai jasa Lingkungan Hidup penyedia pangan |
| | | A.2.2.5 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Keanekaragaman Hayati | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabel yang berisi informasi uraian data mengenai jasa Lingkungan Hidup pendukung keanekaragaman hayati |
| A.3. Bentuk Penguasaan | A.3.1 Pemerintah | A.3.1.1 Peta Penutupan Lahan Kawasan Hutan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau | peta dan tabel menggambarkan cakupan luasan dan persebaran penutupan lahan dalam kawasan hutan |

kementerian/ . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.3.1.2 Peta Potensi Hutan | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabel yang memberikan informasi sebaran dan cakupan kawasan hutan dengan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa liar |
| | | A.3.1.3 Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi jumlah, cakupan luasan, dan kategori PIPPIB yang ditetapkan pada hutan alam primer dan lahan gambut |

A.3.1.4 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.4 Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait cakupan luasan dan arahan pemanfaatan kawasan hutan |
| | | A.3.1.5 Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait cakupan KPHP dan KPHL sesuai pada lokasi dan fungsi kawasan hutan |
| | | A.3.1.6 Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait jumlah KPHK dan cakupan luasan sesuai pada lokasi fungsi kawasan hutan |

di . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | di bidang kehutanan | |
| | | A.3.1.7 Peta Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait jumlah KHDTK beserta keterangan lainnya dan cakupan luasannya |
| | | A.3.1.8 Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait persebaran dan cakupan luasan pada fungsi kawasan hutan yang dicadangkan sebagai perhutanan sosial |
| | | A.3.1.9 Peta Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP) | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait jumlah KHKP beserta keterangan lainnya dan cakupan luasannya |

pemerintahan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.3.1.10 Peta Persetujuan penggunaan kawasan hutan (operasi produksi/ non tambang dan eksplorasi) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait kawasan hutan dengan persetujuan penggunaannya (operasi produksi/non tambang dan eksplorasi) beserta keterangan Surat Ketetapannya dan cakupan luasannya |
| | | A.3.1.11 Peta Persetujuan kerja sama penggunaan kawasan hutan | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait kawasan hutan dengan persetujuan kerja samanya beserta keterangan Surat Ketetapannya dan cakupan luasannya |
| | | A.3.1.12 Peta Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei penggunaan kawasan hutan | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait kawasan hutan dengan persetujuan kegiatan survei penggunaannya beserta keterangan Surat Ketetapannya dan cakupan luasannya |

menyelenggarakan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.3.1.13 Peta Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait jumlah KHDPK beserta keterangan lainnya dan cakupan luasannya |
| | | A.3.1.14 Peta Penetapan wilayah pengelolaan hutan perusahaan umum (Perum) kehutanan negara | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan umum (Perum) kehutanan negara beserta keterangan Surat Ketetapannya, cakupan luasannya dan bentuk pengelolaannya |
| | | A.3.1.15 Peta Kawasan Hutan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait cakupan luasan pada fungsi kawasan hutan |

lembaga . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.3.1.16 Peta Penetapan Kawasan Hutan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait cakupan luasan dan keabsahan penunjukan kawasan hutan |
| | | A.3.1.17 Peta Profil Kawasan Konservasi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait jumlah, fungsi, pengelola, dan cakupan luasan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan pelestarian alam |
| | | A.3.1.18 Peta Zonasi Taman Nasional | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau | peta dan tabular yang memberikan informasi pembagian sistem zonasi pada taman nasional |

kementerian/ . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.3.1.19 Peta Blok kawasan konservasi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang menjelaskan pembagian zona, status, dan cakupan luasan pada kawasan konservasi |
| | | A.3.1.20 Peta Perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air di kawasan konservasi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang menjelaskan kawasan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air di kawasan konservasi beserta informasi SK Penetapan/izin usaha, luasan dan pihak yang memanfaatkan jasa lingkungan air dan energi air |
| | | A.3.1.21 Peta Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi (areal kegiatan eksplorasi /areal | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau | peta dan tabular yang menjelaskan kawasan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi beserta informasi SK Penetapan/izin usaha, luasan dan pihak yang |

kegiatan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | kegiatan usaha) di kawasan konservasi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi |
| | | A.3.1.22 Peta Perizinan berusaha pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang menjelaskan kawasan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasi beserta informasi SK Penetapan/izin usaha, luasan dan pihak yang memanfaatkan jasa lingkungan wisata alam |
| | | A.3.1.23 Peta Tata hutan kesatuan pengelolaan hutan (KPHP dan KPHL) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang menjelaskan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan (KPHP dan KPHL) |

A.3.1.24 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.24 Arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait klasifikasi arahan pemanfaatan pada hutan dengan perizinan berusaha beserta cakupan luasannya |
| | | A.3.1.25 Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait jumlah dan cakupan luasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan |
| | | A.3.1.26 Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait persebaran, nama lembaga desa, SK penetapan dan cakupan luasan persetujuan pengelolaan hutan desa |

di . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | di bidang kehutanan | |
| | | A.3.1.27 Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyara-katan (PPHKm) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait persebaran, nama kelompok masyarakat, SK penetapan, dan cakupan luasan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan |
| | | A.3.1.28 Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait persebaran, nama, dan cakupan luasan persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat |
| | | A.3.1.29 Peta Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait nama pengelola, nama kelompok, SK penetapan, dan cakupan luasan IPHPS |

pemerintahan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.3.1.30 Peta Penetapan status hutan adat | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait nama hutan adat, nama masyarakat hutan adat, SK penetapan, fungsi hutan adat, dan cakupan luasan penetapan status hutan adat |
| | | A.3.1.31 Peta Penetapan status hutan hak | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta yang menggambarkan informasi penting yang menggambarkan status dan batas wilayah hutan hak di Indonesia |
| | | A.3.1.32 Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait persebaran, jumlah proyek, dan jumlah program pada sektor terkait |

A.3.1.33 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.33 Peta Penetapan WIUP, WIUPK, dan WPR Mineral | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait lokasi penetapan WIUP, WIUPK, dan WPR mineral beserta luasan lokasi penetapan |
| | | A.3.1.34 Peta Penetapan WIUP dan WIUPK Batubara | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait lokasi penetapan WIUP dan WIUPK Batubara beserta luasan lokasi penetapan |
| | | A.3.1.35 Peta Penetapan WUP, WUPK, dan WPN | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait lokasi penetapan WUP, WUPK, dan WPN mineral atau batubara beserta luasan lokasi penetapan WUP, WUPK, dan WPN |
| | | A.3.1.36 Peta WK Minyak dan Gas Bumi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait WK minyak dan gas bumi |
| | | A.3.1.37 Peta WK Panas Bumi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait lokasi WK panas bumi, beserta luasan lokasi |

A.3.1.38 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.38 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan informasi pembagian arahan tata ruang (pola dan struktur ruang) nasional |
| | | A.3.1.39 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan informasi pembagian arahan tata ruang (pola dan struktur ruang) pada wilayah provinsi |
| | | A.3.1.40 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan informasi pembagian arahan tata ruang (pola dan struktur ruang) pada wilayah kabupaten/kota |
| | | A.3.1.41 Peta Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan informasi pembagian arahan tata ruang (pola dan struktur ruang) pada pulau/kepulauan |
| | | A.3.1.42 Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dengan penataan ruangnya diprioritaskan. Informasi disertakan dengan nama, jenis, dan cakupan luasan wilayah KSN |

A.3.1.43 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.43 Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang merincikan rencana tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi pada kabupaten/kota |
| | | A.3.1.44 Peta Hak Guna Usaha (HGU) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan persebaran wilayah yang dikenakan HGU |
| | | A.3.1.45 Peta Hak Pengelolaan (HPL) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah yang dikenakan HPL |
| | | A.3.1.46 Peta Hak Guna Bangunan (HGB) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah yang dikenakan HGB |

A.3.1.47 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.47 Peta Hak Ulayat/ Komunal | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang menggambarkan informasi database yang mencatat objek bidang tanah ulayat/komunal dan juga sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang melibatkan tanah ulayat/komunal |
| | | A.3.1.48 Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang menggambarkan informasi acuan baru dalam melakukan perizinan berusaha, menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang |
| | | A.3.1.49 Peta Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta yang menggambarkan penilaian suatu pemanfaatan ruang dalam mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan |
| | | A.3.1.50 Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut |

A.3.1.51 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.51 Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan informasi terkait rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya di kawasan laut yang melibatkan dua provinsi atau lebih |
| | | A.3.1.52 Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/ pertanahan | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait rencana arah penggunaan sumber daya disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang terkait kegiatan yang diperbolehkan di tingkat provinsi |
| | | A.3.1.53 Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi, dengan rujukannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. |
| | | A.3.1.54 Peta Batas Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta dan tabel yang memberikan informasi batas administrasi dalam kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi |

A.3.1.55 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.55 Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/ Kota | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial | peta dan tabular yang memberikan informasi batas administrasi provinsi dan kabupaten/kota |
| | | A.3.1.56 Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial | peta dan tabular yang memberikan informasi batas administrasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa |
| | | A.3.1.57 Peta Batas Darat Negara | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial | peta dan tabular yang memberikan informasi batas wilayah Indonesia dengan negara lain di daratan |
| | | A.3.1.58 Peta Batas Laut Negara | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial | peta dan tabular yang memberikan informasi batas wilayah Indonesia dengan negara lain di perairan laut |
| | | A.3.1.59 Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional | dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun |

A.3.1.60 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.1.60 Peta Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif | peta dan tabular yang memberikan informasi terkait panduan yang menggambarkan lokasi dan informasi mengenai destinasi wisata di seluruh wilayah Indonesia |
| | A.3.2 Pelaku Usaha yang memiliki perizinan berusaha | A.3.2.1 Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang pertanian | peta dan tabular yang memberikan informasi jumlah dan persebaran perizinan berusaha serta cakupan luasan di bidang perkebunan |
| | | A.3.2.2 Peta Perizinan berusaha di sektor energi dan sumber daya mineral | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta yang menggambarkan informasi yang mencakup perizinan berusaha disektor energi dan sumber daya mineral |
| | | A.3.2.3 Peta Sebaran Kegiatan Industri | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian | peta dan tabular yang menunjukkan titik-titik bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dalam industri, terutama industri sedang dan industri besar |
| | | A.3.2.4 Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-rakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah pusat pertumbuhan industri beserta potensi dan industri prioritasnya |

A.3.2.5 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.3.2.5 Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Kawasan Industri Rencana | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian | peta yang menggambarkan informasi terkait perencanaan dan pengelolaan kawasan industri yang sudah ada dan di masa depan |
| | A.3.3 Masyarakat | A.3.3.1 Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan informasi terkait ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan menjadi wilayah pertuanan Masyarakat Hukum Adat |
| | | A.3.3.2 Peta Sebaran Daerah Pariwisata | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan/atau ekonomi kreatif | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran daerah pariwisata serta objek wisatanya |
| A.4. Pengetahuan Pengelolaan SDA | A.4.1 Pengetahuan Terbaru | A.4.1.1 Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | peta yang menggambarkan lokasi bendungan yang sudah beroperasi dan sedang dalam pemeliharaan. Tabel yang menguraikan informasi luasan, daya Tampung (meter kubik), jumlah ketersediaan air baku (meter kubik/detik), kapasitas irigasi atau dapat mengaliri lahan (Ha) dan potensi listrik yang dapat dihasilkan (mV) |

A.4.1.2 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.4.1.2 Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | peta yang menampilkan lokasi bendungan yang direncanakan dengan manfaat untuk digunakan untuk perencanaan, pemrograman, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Tabel yang menguraikan informasi luasan, daya tampung (meter kubik), jumlah ketersediaan air baku (meter kubik/detik), kapasitas irigasi atau dapat mengaliri lahan (Ha), dan potensi listrik yang dapat dihasilkan (mV) |
| | | A.4.1.3 Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL-D) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | peta yang menggambarkan lokasi sebaran bangunan infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik |
| | | A.4.1.4 Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | peta yang menampilkan lokasi IPLT yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. Tabel yang menguraikan informasi lokasi administrasi sebaran IPLT, Panjang jaringan perpipaan jaringan air limbah dan luas wilayah terlayani perpipaan air limbah |

A.4.1.5 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.4.1.5 Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | peta yang menggambarkan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah beroperasi dan sedang dalam pemeliharaan. Tabel yang menguraikan informasi luasan TPA dan Kapasitas/daya tampung setiap TPA |
| | | A.4.1.6 Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | peta yang menggambarkan lokasi bangunan sistem pengendalian erosi, sedimentasi, banjir lahar, dan tanah longsor yang sudah beroperasi dan sedang dalam pemeliharaan. Tabel yang menguraikan informasi panjang saluran, diameter penampang saluran dan kapasitas penampungan DAM |
| | | A.4.1.7 Peta Lokasi program kampung iklim (proklim) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta yang menggambarkan lokasi kampung-kampung iklim yang sudah beroperasi dan sedang dalam pemeliharaan |

A.4.2 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | A.4.2 Pengetahuan berdasarkan kearifan lokal | A.4.2.1 Kawasan Budidaya Minapolitan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya |
| A.5. Bentuk Kerusakan | A.5.1 Degradasi Sumber Daya Alam dan kualitas Lingkungan Hidup | A.5.1.1 Peta Kerentanan Likuefaksi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dengan kerentanan likuefaksi yang berbeda-beda |
| | | A.5.1.2 Peta Suhu Permukaan Tanah | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika | peta dan tabular yang memberikan informasi titik-titik lokasi dengan kondisi suhu permukaan tanah yang sama (bentuk isohyet) |
| | | A.5.1.3 Peta Kerentanan Penurunan Muka Tanah | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah CAT yang mengalami perubahan muka tanah |
| | | A.5.1.4 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran kawasan rawan bencana gunung api |

A.5.1.5 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.5.1.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran kawasan rawan bencana gempa bumi |
| | | A.5.1.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran kawasan rawan bencana bencana tsunami |
| | | A.5.1.7 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran zona gerakan tanah |
| | | A.5.1.8 Peta Patahan Aktif | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran patahan aktif |
| | | A.5.1.9 Peta Indeks kualitas udara | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang | peta dan tabular yang memberikan informasi nilai indeks kualitas udara di tingkat provinsi |

menyelenggarakan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.5.1.10 Peta Beban Emisi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dan jumlah beban emisi yang ada |
| | | A.5.1.11 Peta Status mutu air | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran status mutu air sungai yang dipantau |
| | | A.5.1.12 Peta Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dan cakupan luasan penanaman di dalam dan luar kawasan hutan |

kementerian/ . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.5.1.13 Peta Indeks kualitas air laut | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi nilai indeks kualitas air laut di tingkat provinsi |
| | | A.5.1.14 Peta Lahan kritis | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran lokasi dan cakupan wilayah BPDAS yang mengalami lahan kritis |
| | | A.4.5.15 Peta Deforestasi | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah yang mengalami deforestasi |

dan/atau . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | |
| | | A.5.1.16 Peta Status Kerusakan Ekosistem Gambut (SKEG) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dan cakupan luasan ekosistem gambut yang terindikasi rusak |
| | | A.5.1.17 Peta Indikatif kerusakan lahan | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dan cakupan luasan lahan yang terindikasi rusak |

A.5.1.18 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.5.1.18 Peta Sebaran Lokasi Pengendali Banjir | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah yang terdapat pengendali banjir beserta keterangan bangunannya |
| | | A.5.1.19 Peta Rehabilitasi, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dilakukan upaya rehabilitasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim |
| | | A.5.1.20 Peta Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran lokasi dan cakupan luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan reklamasi |
| | | A.5.1.21 Peta Rawan Banjir | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran lokasi dan cakupan wilayah yang rawan banjir |
| | | A.5.1.22 Peta Multirawan Bencana | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berpotensi multirawan bencana |

A.5.1.23 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.5.1.23 Peta Risiko Bencana Banjir | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulang-an bencana | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berisiko bencana banjir |
| | | A.5.1.24 Peta Risiko Bencana Kekeringan | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulang-an bencana | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berisiko bencana kekeringan |
| | | A.5.1.25 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulang-an bencana | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berisiko bencana banjir bandang |
| | | A.5.1.26 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulang-an bencana | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berisiko bencana kebakaran hutan dan lahan |
| | | A.5.1.27 Data dan Informasi Kerentanan Iklim | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan | data yang memberikan informasi mengenai kerentanan iklim |

di . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | di bidang kehutanan | |
| | A.5.2 Deplesi Sumber Daya Alam | A.5.2.1 Peta Kerentanan Pesisir | kementerian/ lembaga yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan panjang garis pantai berpotensi rentan |
| | | A.5.2.2 Peta Proyeksi Perubahan Iklim | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika | peta dan tabular yang memberikan informasi *climate change hotspot* dengan mengacu pada faktor curah hujan dan kenaikan suhu |
| | | A.5.2.3 Peta Kawasan Rawan Kekeringan Meteorologis | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah yang mengalami kerawanan kekeringan meteorologis |
| | | A.5.2.4 Peta Seismisitas Gempa Bumi | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran episenter gempa bumi beserta potensi skala magnitudo yang dihasilkan |
| | | A.5.2.5 Peta Risiko Bencana Tsunami | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulang-an bencana | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berisiko bencana tsunami |

A.5.2.6 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.5.2.6 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulang-an bencana | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berisiko bencana tanah longsor |
| | | A.5.2.7 Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulang-an bencana | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berisiko bencana letusan gunung api |
| | | A.5.2.8 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulang-an bencana | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran dan cakupan luasan wilayah berisiko bencana gelombang ekstrim |
| | | A.5.2.9 Peta Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir/Radio logi Pada Pengangkut-an Zat Radioaktif/ Bahan Nuklir | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dengan tingkat risiko terjadinya kedaruratan nuklir/radiologi dari suatu kendaraan pengangkut nuklir |
| | | A.5.2.10 Peta Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir/Radio logi Pada Instalasi Nuklir/ Fasilitas Zat Radioaktif | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran wilayah dengan tingkat risiko terjadinya kedaruratan nuklir/radiologi dari suatu instalasi nuklir atau fasilitas zat radioaktif |

A.5.2.11 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | A.5.2.11 Peta Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir Akibat Peristiwa *Tranboundary Release* | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir | peta dan tabular yang memberikan informasi persebaran titik lokasi terjadinya lepasan zat radioaktif hasil fisi lintas batas negara atau instalasi nuklir |
| A.6. Konflik dan Penyebab Konflik | A.6.1 konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam | A.6.1.1 Peta Konflik satwa dan manusia | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta yang menggambarkan bentuk penggunaan lahan yang menjadi konflik antara satwa dengan masyarakat di desa sekitar kawasan hutan dan tabel yang menguraikan faktor-faktor habitat yang mendukung terjadinya konflik antara satwa dengan masyarakat di desa sekitar kawasan hutan |
| | | A.6.1.2 Peta Indikatif Potensi Konflik Tenurial Kawasan Hutan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta yang menggambarkan lokasi indikatif konflik khususnya tenurial di kawasan hutan |
| | | A.6.1.3 Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi | peta yang memuat informasi mengenai sebaran lokasi, tata batas lahan pekarangan, lahan usaha, dan fasilitas umum di unit |

permukiman . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | permukiman transmigrasi |

**KELOMPOK B. WILAYAH EKOREGION DARAT**

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| B. Wilayah Ekoregion Darat | B.1.1 Karakteristik Bentang Alam | B.1.1.1 Peta Sistem Lahan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial | peta yang menggambarkan lokasi administrasi, tipe lahan, litologi, jenis tanah dan kemiringan |
| | B.1.2 Daerah Aliran Sungai | B.1.2.1 Peta Daerah Aliran Sungai | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup | peta yang menggambarkan lokasi administrasi, tutupan lahan, dan batas daerah aliran sungai |
| | B.1.3 Iklim | B.1.3.1 Peta Iklim | kementerian/ lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika | peta yang menggambarkan nilai rata-rata curah hujan, nilai rata-rata kelembaban udara, nilai rata-rata suhu udara dan pola angin |
| | B.1.4 Flora dan Fauna | B.1.4.1 Peta *Home Range* Satwa Endemik | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta yang menggambarkan sistem lahan dan sebaran spesies fauna endemik |
| | | B.1.4.2 Peta Karakteristik Vegetasi Alami | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta ini juga disebut dengan Karakteristik Vegetasi Alami (KVA) |

B.1.5 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | B.1.5 Sosial Budaya | B.1.5.1 Peta Sebaran Suku | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan | peta yang menggambarkan sebaran lokasi suku |
| | | B.1.5.2 Peta Bahasa | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan | peta yang menggambarkan persebaran lokasi bahasa dan dialek |
| | | B.1.5.3 Jumlah Penduduk | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik | peta yang menggambarkan persebaran dan jumlah penduduk/populasi |
| | | B.1.5.4 Potensi Desa | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik | peta yang menggambarkan persebaran lokasi Suku dan aktivitas sosial lainnya |
| | B.1.6 Ekonomi | B.1.6.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik | tabel yang menunjukkan PDRB suatu wilayah berdasarkan harga konstan dan lapangan usaha |
| | | B.1.6.2 PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku berdasarkan Pengeluaran | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik | tabel yang menunjukkan PDRB suatu wilayah berdasarkan harga konstan dan harga berlaku berdasarkan pengeluaran |
| | B.1.7 Kelembagaan Masyarakat | B.1.7.1 Peta Wilayah Adat (yang sudah | kementerian/ lembaga yang menyelengga- | peta yang menggambarkan jumlah wilayah adat |

ditetapkan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | ditetapkan oleh pemerintah daerah) | rakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan | dan persebaran wilayah adat |
| | | B.1.7.2 Data Masyarakat Hukum Adat (MHA) | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan | tabel yang menggambarkan jumlah wilayah adat dan persebaran wilayah adat |

**KELOMPOK C. WILAYAH EKOREGION LAUT**

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| C. Wilayah Ekoregion Laut | C.1.1 Geologi dan morfologi dasar laut | C.1.1.1 Peta Pengelom-pokan Pulau Kecil berdasarkan Tektogenesis | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta yang menggambarkan lokasi pulau-pulau kecil berdasarkan tektogenesis |
| | | C.1.1.2 Peta Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta yang menggambarkan kondisi batuan dan lereng dasar laut |
| | | C.1.1.3 Peta Batimetri | kementerian/ lembaga yang menyelengga-rakan urusan pemerintahan | peta yang menggambarkan kedalaman laut |

di . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | di bidang energi dan sumber daya mineral | |
| | | C.1.1.4 Peta Karakteristik Pantai | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta yang menggambarkan karakteristik pantai |
| | | C.1.1.5 Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta yang menggambarkan sedimen permukaan dasar laut |
| | | C.1.1.6 Peta Sumber Daya Mineral Kelautan | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta yang menggambarkan sebaran mineral kelautan |
| | | C.1.1.7 Peta Anomali Magnet Laut | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral | peta yang menggambarkan nilai anomali magnet laut |

C.1.2 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | C.1.2 Oseanografi | C.1.2.1 Peta Arus Laut | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan pola arah orientasi dan kecepatan pada arus dalam periode musiman |
| | | C.1.2.2 Peta Gelombang | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman |
| | | C.1.2.3 Peta *Upwelling* | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan titik-titik pusat terjadinya *upwelling* di laut |
| | | C.1.2.4 Peta Suhu Laut | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan kondisi rata-rata suhu permukaan laut |
| | | C.1.2.5 Peta Salinitas Air Laut | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan tingkat salinitas/ kandungan jumlah kadar garam di laut |
| | | C.1.2.6 Peta Derajat Keasaman Laut | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan | peta yang menggambarkan tingkat keasaman di laut |

di . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | di bidang kelautan dan perikanan | |
| | | C.1.2.7 Peta Sebaran Tingkat Klorofil | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan tingkat konsentrasi klorofil di laut |
| | | C.1.2.8 Peta Sebaran Tingkat Nutrien | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan tingkat konsentrasi nutrien di laut |
| | C.1.3 Keanekaragaman hayati | C.1.3.1 Peta Sebaran Mangrove | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan | peta yang menggambarkan tipe kondisi kesehatan serta sebaran mangrove |
| | | C.1.3.2 Peta Padang Lamun | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan tipe kondisi kesehatan serta sebaran padang lamun |

C.1.3.3 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| KELAS | SUB KELAS | JENIS DATA | SUMBER | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | C.1.3.3 Peta Terumbu Karang | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan tipe kondisi kesehatan serta sebaran terumbu karang |
| | | C.1.3.4 Peta Alur Migrasi Biota Laut | kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan | peta yang menggambarkan jenis, periode migrasi serta kuantitas kawanan migrasi biota laut |

B. ANALISIS DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi yang dikelompokkan dianalisis sesuai dengan kebutuhan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun proses analisa dilakukan dengan tahapan verifikasi serta pengolahan data dan informasi.

Verifikasi data dan informasi merupakan langkah penting dalam proses pengumpulan data, terutama setelah data telah dikumpulkan melalui proses inventarisasi lingkungan hidup. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, keandalan, serta validitas data dan informasi yang telah dikumpulkan. Adapun kegiatan dalam verifikasi data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. memastikan sumber data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. memeriksa kelengkapan dan konsistensi data untuk memastikan tidak ada bagian yang hilang atau tidak terisi.

Proses verifikasi data dan informasi dikecualikan apabila data tersebut didapatkan melalui penggunaan data dan informasi yang telah diterbitkan oleh dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau penggunaan data dan informasi resmi lainnya yang relevan. Terhadap data dan informasi yang telah dilakukan verifikasi, dilakukan pengolahan data dan informasi.

Secara . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Secara keseluruhan, proses dari analisis data dan informasi menghasilkan rincian Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion. Sebagai contoh rincian Sumber Daya Alam yaitu mengenai Jasa Lingkungan Hidup pengatur air, sebagaimana disajikan dalam uraian sebagai berikut:

Jasa Lingkungan Hidup untuk pengatur air di Indonesia dominan berada pada kategori sedang sekitar 30,86%. Berikut adalah tabel luas wilayah dengan Jasa Lingkungan Hidup pengatur air nasional:

| INDONESIA | Kondisi Jasa Lingkungan Pengatur Air (Luas dalam Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
| | 1.252.629,20 | 18.001.447,99 | 58.348.059,17 | 65.193.010,39 | 46.289.620,57 |
| **Persentase** | **0,66%** | **9,52%** | **30,86%** | **34,48%** | **24,48%** |

Sumber: KLHK, 2023

Adapun Jasa Lingkungan Hidup pengatur air pulau/kepulauan dijabarkan di bawah sebagai berikut:

1. Jasa Lingkungan Hidup pengatur air dominan di Pulau Sumatera berada pada kategori sedang dengan luas sebesar 25.004.009,66 hektare.
2. Jasa Lingkungan Hidup pengatur air dominan di Pulau Jawa berada pada kategori sedang dengan luas sebesar 8.475.196,32 hektare.
3. Jasa Lingkungan Hidup pengatur air dominan di Pulau Kalimantan berada pada kategori tinggi dengan luas sebesar 17.228.724,72 hektare.
4. Jasa Lingkungan Hidup pengatur air dominan di Pulau Sulawesi berada pada kategori tinggi dengan luas sebesar 6.771.908,08 hektare.
5. Jasa Lingkungan Hidup pengatur air dominan di Kepulauan Maluku berada pada kategori tinggi dengan luas sebesar 3.074.829,14 hektare.
6. Jasa Lingkungan Hidup pengatur air dominan di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara berada pada kategori sedang dengan luas sebesar 2.631.078,66 hektare.
7. Jasa Lingkungan Hidup pengatur air dominan di Pulau Papua berada pada kategori tinggi dengan luas sebesar 25.282.623,53 hektare.

Kondisi . . .



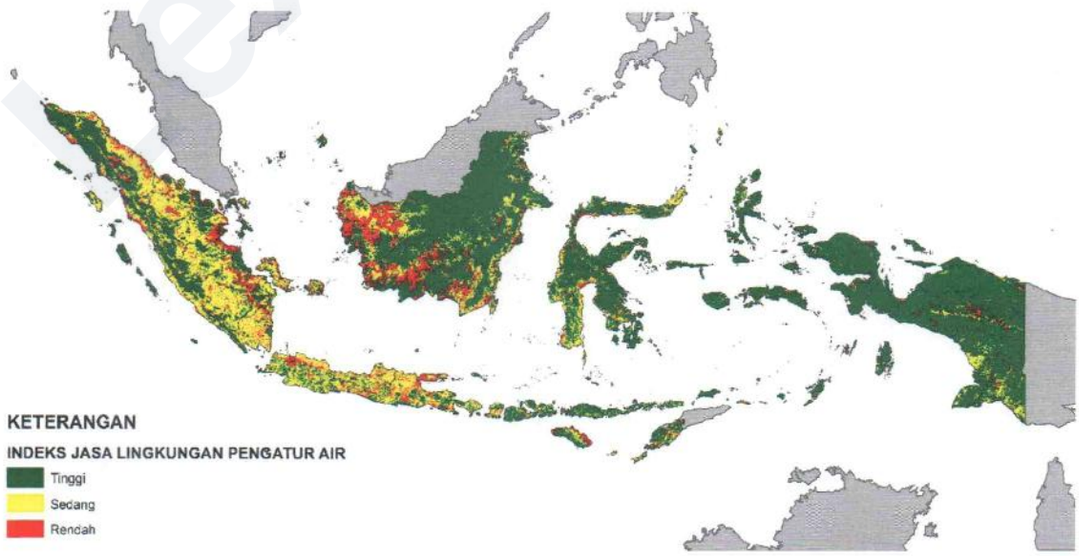
Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Kondisi Jasa Lingkungan Hidup pengatur air tersebut termuat dalam tabel berikut:

| Pulau/ Kepulauan | Kondisi Jasa Lingkungan Pengatur Air (Luas dalam Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
| Sumatera | 300.933,64 | 5.401.213,57 | 25.004.009,66 | 9.234.646,55 | 7.623.447,85 |
| Jawa | 24.640,06 | 2.042.349,42 | 8.475.196,32 | 1.953.276,22 | 764.179,93 |
| Kalimantan | 516.888,39 | 7.221.255,65 | 11.571.338,46 | 17.228.724,72 | 16.937.686,84 |
| Sulawesi | 41.435,77 | 1.260.523,03 | 5.311.620,09 | 6.771.908,08 | 5.239.308,42 |
| Maluku | 34.899,89 | 544.776,92 | 1.247.104,20 | 3.074.829,14 | 2.859.836,44 |
| Bali-Nusa tenggara | 29.924,35 | 705.519,45 | 2.631.078,66 | 1.647.002,15 | 2.157.934,75 |
| Papua | 303.907,09 | 825.809,95 | 4.107.711,79 | 25.282.623,53 | 10.707.226,34 |
| **Total Keseluruhan** | **1.252.629,20** | **18.001.447,99** | **58.348.059,17** | **65.193.010,39** | **46.289.620,57** |
| **Persentase** | **0,66%** | **9,52%** | **30,86%** | **34,48%** | **24,48%** |

Sumber: KLHK, 2023

Informasi Jasa Lingkungan Hidup pengatur air sebagaimana dijelaskan di atas termuat dalam Peta sebagai berikut:




Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air
Sumber: KLHK, 2023

Sebagai . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Sebagai contoh wilayah Ekoregion yaitu mengenai karakteristik bentang alam, sebagaimana disajikan dalam uraian sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000. Berikut adalah tabel 10 Karakteristik Bentang Alam dominan secara nasional:

| Karakteristik Bentang Alam | | |
|---|---|---|
| Dataran fluvial bermaterial aluvium | 24.679.175,38 | 12,99% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | 18.314.564,67 | 9,64% |
| Dataran organik bermaterial gambut | 14.423.908,70 | 7,59% |
| Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat | 11.619.508,59 | 6,11% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat | 10.510.449,86 | 5,53% |
| Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 10.492.295,47 | 5,52% |
| Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik | 9.889.992,56 | 5,20% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik | 8.742.322,05 | 4,60% |
| Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik | 6.884.601,96 | 3,62% |
| Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat | 6.030.042,80 | 3,17% |

Sumber: KLHK, 2021

Adapun Karakteristik Bentang Alam terbesar menurut pulau/kepulauan dijabarkan dengan 3 (tiga) Karakteristik Bentang Alam dominan sebagai berikut:

| Pulau | | |
|---|---|---|
| Sumatera | Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat | 6.824.522,51 |
| | Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik | 6.322.389,68 |
| | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 5.827.036,19 |
| Jawa | Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 2.296.510,64 |
| | Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 1.495.126,63 |
| | Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium | 1.336.107,07 |
| Kalimantan | Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | 10.466.494,63 |
| | Dataran organik bermaterial gambut | 5.714.900,01 |
| | Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat | 5.606.830,58 |

Sulawesi . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Pulau | | |
|---|---|---|
| Sulawesi | Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 2.903.599,63 |
| | Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik | 2.621.192,89 |
| | Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat | 1.830.643,58 |
| Maluku | Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat | 1.093.773,76 |
| | Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 864.451,06 |
| | Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik | 644.087,79 |
| Bali-Nusa Tenggara | Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 1.955.553,12 |
| | Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 626.158,73 |
| | Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat | 515.993,65 |
| Papua | Dataran fluvial bermaterial aluvium | 10.815.954,70 |
| | Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik | 7.643.879,51 |
| | Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 3.383.213,28 |

Sumber: KLHK, 2021

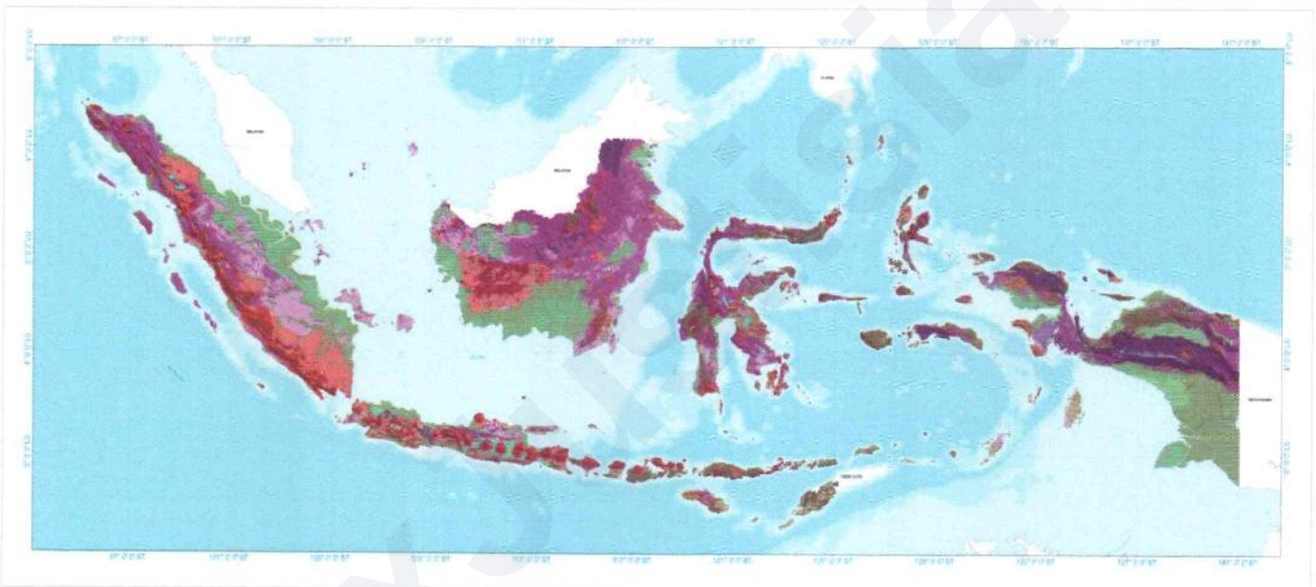
Informasi . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Informasi Karakteristik Bentang Alam sebagaimana dijelaskan di atas termuat dalam Peta sebagai berikut:

**PETA KARAKTERISTIK BENTANGALAM EKOREGION INDONESIA**



**SIMBOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KARAKTERISTIK BENTANG ALAM**

| No. | Nama Unsur | Warna/ Anotasi |
|---|---|---|
| 1 | Dataran Pegunungan | |
| 2 | Dataran | |
| 3 | Dataran fluvial bersaterial aluvium | |
| 4 | Dataran fluvial berumbuk-bergelombang bersaterial aluvium | |
| 5 | Dataran fluviomarin bersaterial aluvium | |
| 6 | Dataran flurvovulkanik bersaterial aluvium | |
| 7 | Dataran lakustrin bersaterial aluvium | |
| 8 | Dataran marin bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 9 | Dataran marin berpasir bersaterial aluvium | |
| 10 | Dataran organik bersaterial gambut | |
| 11 | Dataran organik aluvium bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 12 | Dataran organik aluvium berombak-bergelombang bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 13 | Dataran sedimental karst bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 14 | Dataran sedimental karst berombak-bergelombang bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 15 | Dataran struktural bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 16 | Dataran struktural berombak-bergelombang bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 17 | Dataran struktural lipatan bersaterial batuan metamorfik | |
| 18 | Dataran struktural lipatan bersaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | |
| 19 | Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bersaterial batuan metamorfik | |
| 20 | Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 21 | Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bersaterial batuan sedimen non karbonat | |
| 22 | Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bersaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | |
| 23 | Dataran struktural punnik berombak-bergelombang bersaterial batuan beku dalam | |
| 24 | Dataran vulkanik bersaterial batuan beku luar | |
| 25 | Dataran vulkanik bersaterial piroklastik | |
| 26 | Dataran vulkanik berombak-bergelombang bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 27 | Dataran vulkanik berombak-bergelombang bersaterial batuan beku luar | |
| 28 | Dataran vulkanik berombak-bergelombang bersaterial piroklastik | |
| 29 | Dataran vulkanik kipas bersaterial piroklastik | |
| 30 | Lembah sungai bersaterial aluvium | |
| 31 | Perbukitan denudasional bersaterial batuan metamorfik | |
| 32 | Perbukitan denudasional bersaterial batuan metamorfik ultrabasaq | |
| 33 | Perbukitan denudasional bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 34 | Perbukitan denudasional bersaterial batuan sedimen non karbonat | |
| 35 | Perbukitan denudasional bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 36 | Perbukitan denudasional bersaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | |
| 37 | Perbukitan denudasional bersaterial piroklastik | |
| 38 | Perbukitan glasial bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 39 | Perbukitan kerucut vulkanik bersaterial batuan beku luar | |
| 40 | Perbukitan kerucut vulkanik bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 41 | Perbukitan kerucut vulkanik bersaterial piroklastik | |
| 42 | Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bersaterial batuan beku luar | |
| 43 | Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 44 | Perbukitan sedimental karst bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 45 | Perbukitan struktural lipatan bersaterial batuan metamorfik | |
| 46 | Perbukitan struktural lipatan bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 47 | Perbukitan struktural lipatan bersaterial batuan sedimen non karbonat | |
| 48 | Perbukitan struktural lipatan bersaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | |
| 49 | Perbukitan struktural patahan bersaterial batuan metamorfik | |
| 50 | Perbukitan struktural plutonik bersaterial batuan beku dalam | |
| 51 | Perbukitan vulkanik bersaterial batuan beku luar | |
| 52 | Perbukitan vulkanik bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 53 | Perbukitan vulkanik bersaterial piroklastik | |
| 54 | Perbukitan vulkanik kubah lava bersaterial batuan beku luar | |
| 55 | Perbukitan vulkanik lereng bawah bersaterial piroklastik | |
| 56 | Perbukitan vulkanik lereng tengah bersaterial piroklastik | |
| 57 | Teluq kaldera bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 58 | Pegunungan denudasional bersaterial batuan metamorfik | |
| 59 | Pegunungan denudasional bersaterial batuan metamorfik ultrabasaq | |
| 60 | Pegunungan denudasional bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 61 | Pegunungan denudasional bersaterial batuan sedimen non karbonat | |
| 62 | Pegunungan denudasional bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 63 | Pegunungan denudasional bersaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | |
| 64 | Pegunungan glasial bersaterial batuan metamorfik | |
| 65 | Pegunungan glasial bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 66 | Pegunungan kerucut vulkanik bersaterial batuan beku luar | |
| 67 | Pegunungan kerucut vulkanik bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 68 | Pegunungan kerucut vulkanik bersaterial piroklastik | |
| 69 | Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 70 | Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bersaterial batuan beku luar | |
| 71 | Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 72 | Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bersaterial piroklastik | |
| 73 | Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 74 | Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 75 | Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bersaterial piroklastik | |
| 76 | Pegunungan sedimental karst bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 77 | Pegunungan struktural lipatan bersaterial batuan metamorfik | |
| 78 | Pegunungan struktural lipatan bersaterial batuan sedimen karbonat | |
| 79 | Pegunungan struktural lipatan bersaterial batuan sedimen non karbonat | |
| 80 | Pegunungan struktural lipatan bersaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | |
| 81 | Pegunungan struktural patahan bersaterial batuan metamorfik | |
| 82 | Pegunungan struktural plutonik bersaterial batuan beku dalam | |
| 83 | Pegunungan vulkanik bersaterial batuan beku luar | |
| 84 | Pegunungan vulkanik bersaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | |
| 85 | Pegunungan vulkanik bersaterial piroklastik | |
| 86 | Pegunungan vulkanik lereng bawah bersaterial piroklastik | |

Peta Karakteristik Bentang Alam
Sumber: KLHK, 2021

**C. PENDOKUMENTASIAN . . .**

SK No 254604 A

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

**C. PENDOKUMENTASIAN**

Hasil inventarisasi lingkungan hidup perlu disajikan secara komprehensif dan informatif agar dapat dipahami dengan baik oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Penyajian ini dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk antara lain:

1. Deskripsi tertulis;
2. Peta tematik;
3. Grafik atau diagram;
4. Tabel;
5. Foto atau gambar ilustrasi; dan
6. Infografis.

Dalam penyajian hasil inventarisasi lingkungan hidup diperlukan adanya media publikasi yang menampung sehingga berbagai pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi dan manfaat dari hasil inventarisasi lingkungan hidup secara efektif dan efisien. Adapun jenis media yang digunakan dalam menyebar luaskan dan membagi pakaikan hasil inventarisasi lingkungan hidup antara lain:

1. Media Cetak merupakan media yang memuat informasi dalam bentuk publikasi cetak. Bentuk media cetak yang dimaksud antara lain: laporan tertulis, buku, majalah, buletin, brosur, pamflet, poster, kartu informasi dan/atau bentuk publikasi lain yang memerlukan proses pencetakan dokumen.
2. Media Elektronik merupakan media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi. Media elektronik mencakup berbagai platform dan perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti teks, suara, gambar, dan video melalui sinyal elektronik. Bentuk media elektronik yang dimaksud antara lain: situs web, portal, Antarmuka Pemrograman Aplikasi/*Application Programming Interface* (API), media sosial, radio, televisi, dan/atau bentuk publikasi lain yang menggunakan teknologi berbasis elektronik.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 254017 A

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

# TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

## A. Landasan Konsep

Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup diperlukan untuk menggambarkan kemampuan Lingkungan Hidup dalam mendukung peri-kehidupan manusia dan makhluk hidup, serta menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk menjaga Ekosistem darat dan laut, mengelola Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, dan melindungi Lingkungan Hidup untuk generasi masa depan.

Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup memuat informasi status berupa terlampaui atau belum terlampaui. Status tersebut dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu:

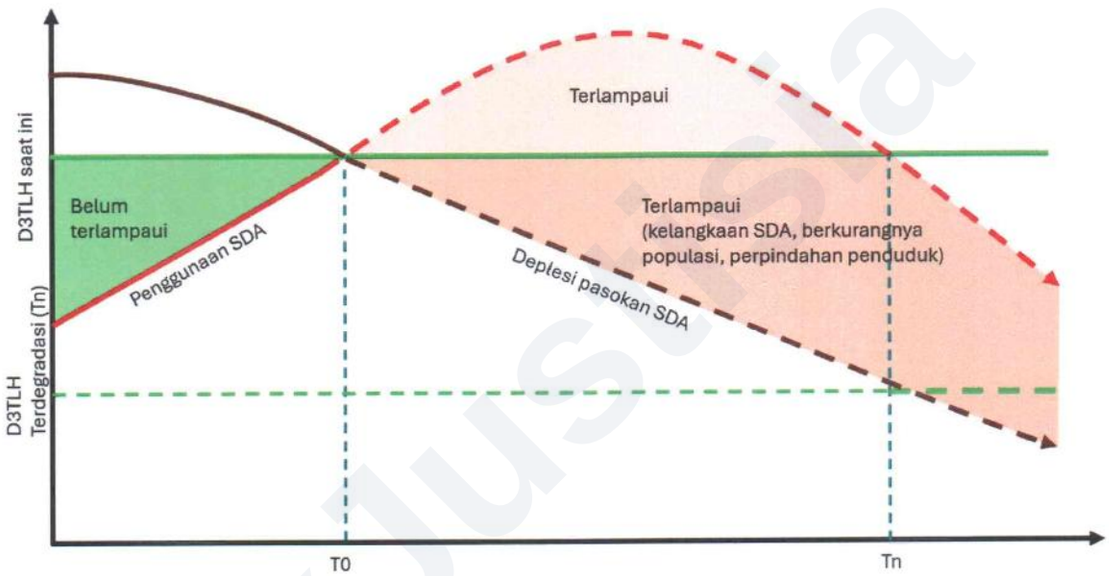
1. aspek ketersediaan (*supply*), yaitu merujuk pada potensi Sumber Daya Alam yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dengan melihat karakteristik wilayahnya. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah Sumber Daya Alam yang memiliki potensi terbarukan yaitu air, lahan, udara, laut, dan keanekaragaman hayati. Ketersediaan (*supply*) dapat bervariasi dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya dan juga dapat berubah seiring waktu karena pengaruh beberapa faktor seperti perubahan iklim, aktivitas manusia, dan polutan.
2. aspek kebutuhan (*demand*), yaitu dengan melihat penggunaan Sumber Daya Alam oleh manusia dan organisme lain (pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup) yang tinggal dalam suatu wilayah. Hal ini mencakup kebutuhan akan air bersih, udara bersih, lahan, laut sehat, dan lainnya. Permintaan dapat bervariasi berdasarkan beberapa faktor seperti pertumbuhan populasi, tingkat industrialisasi, urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan faktor lainnya.

Secara . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Secara konseptual Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup disajikan dalam Gambar 1.




Gambar 1. Konsep Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

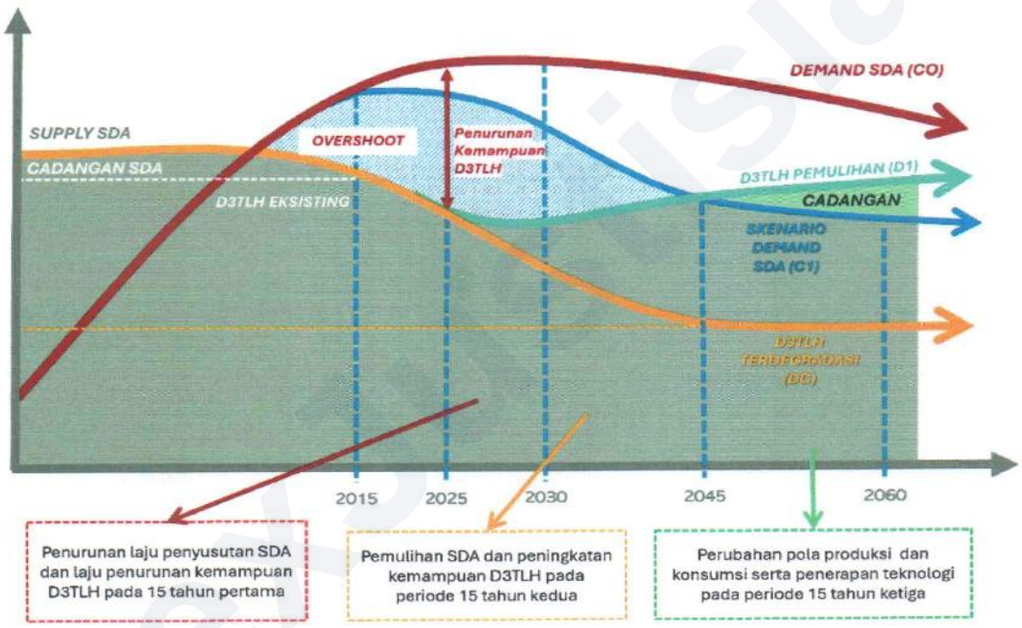
Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dinilai belum terlampaui jika jumlah kebutuhan lebih rendah dibandingkan jumlah ketersediaan. Sebaliknya, Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dinilai terlampaui jika jumlah kebutuhan lebih tinggi ketimbang jumlah ketersediaannya. Pemenuhan kebutuhan terhadap Sumber Daya Alam yang berpotensi terbarukan akan mengurangi ketersediaannya. Terlampauinya Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup akan menimbulkan kelangkaan terhadap Sumber Daya Alam yang berpotensi terbarukan. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan mengganggu keberlanjutan proses dan fungsi ekosistem serta kehidupan manusia. Jika dibiarkan, hal tersebut akan mendorong berkurangnya populasi akibat kematian maupun perpindahan penduduk secara terpaksa sehingga ambang batas pun akan semakin menurun. Oleh karena itu, status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup bersifat dinamis.

Pemanfaatan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara terus menerus, dengan status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terlampaui, akan mengakibatkan deplesi Sumber Daya Alam jika tidak diikuti dengan upaya atau skenario perbaikan, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.




Gambar 2 Skenario pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan.

Gambar tersebut menunjukkan pentingnya mengetahui status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam mencegah kondisi defisit akibat permintaan melampaui jumlah ketersediaan Sumber Daya Alam (*overshooting*) dan/atau mencadangkan kelebihan Sumber Daya Alam dalam kondisi *surplus*. Status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup juga dapat digunakan sebagai dasar perkiraan skenario pemenuhan Sumber Daya Alam ke depan beserta respons yang diperlukan baik di aspek ketersediaan (contoh: pemulihan lingkungan) maupun kebutuhan (contoh: perubahan pola perilaku konsumsi atau produksi).

B. Metode Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilakukan dengan menggunakan metode:
1. kinerja Jasa Lingkungan Hidup;
2. jejak ekologis dan biokapasitas; atau
3. metode lainnya yang diakui secara nasional dan/atau internasional,

dengan penjabaran sebagai berikut:

B.1 Penyusunan . . .

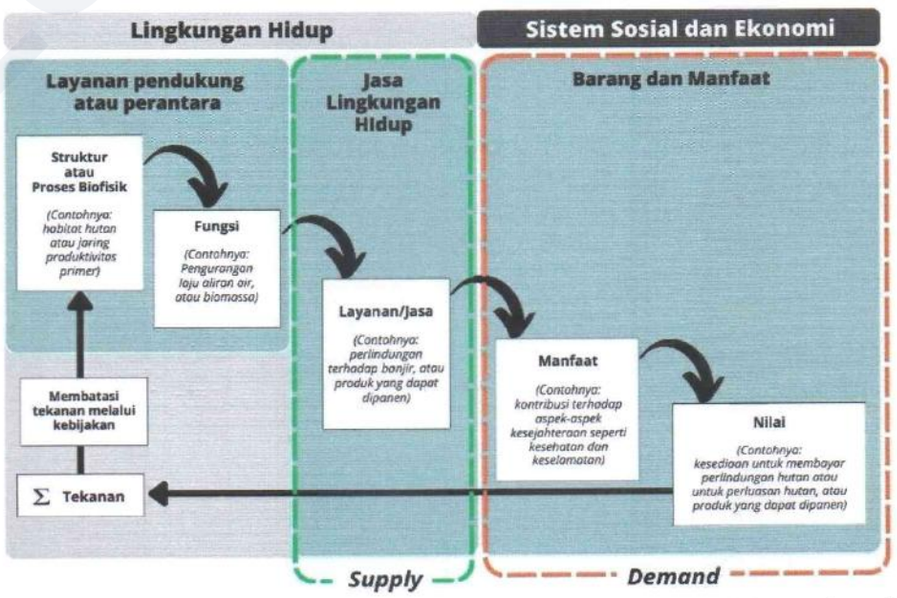


Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

B.1 Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode kinerja Jasa Lingkungan Hidup.

Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode kinerja Jasa Lingkungan Hidup melihat hubungan antara Lingkungan Hidup dan Sistem Sosial Ekonomi dalam konteks Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Proses ini dimulai dari komponen biofisik lingkungan, seperti siklus air dan produksi biomassa, yang menghasilkan fungsi suatu ekosistem. Fungsi ini menghasilkan ketersediaan (*supply)* jasa Lingkungan Hidup, seperti penyediaan air bersih atau perlindungan terhadap bencana. Jasa tersebut kemudian menjadi kebutuhan (*demand*) dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti hasil alam yang dapat diolah dan digunakan.

Manfaat ini menciptakan nilai bagi sistem sosial ekonomi, misalnya melalui perlindungan dari kerugian ekonomi atau peningkatan kualitas hidup. Aktivitas manusia yang menimbulkan tekanan pada ekosistem, dapat mengganggu fungsi-fungsi biofisik yang ada. Untuk menjaga keseimbangan, kebijakan diperlukan agar tekanan tersebut tidak melebihi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sehingga ekosistem tetap mampu mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia sebagaimana yang disajikan dalam model *cascade* pada Gambar 3.




Gambar 3. Konsep Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode kinerja jasa Lingkungan Hidup

Berikut . . .

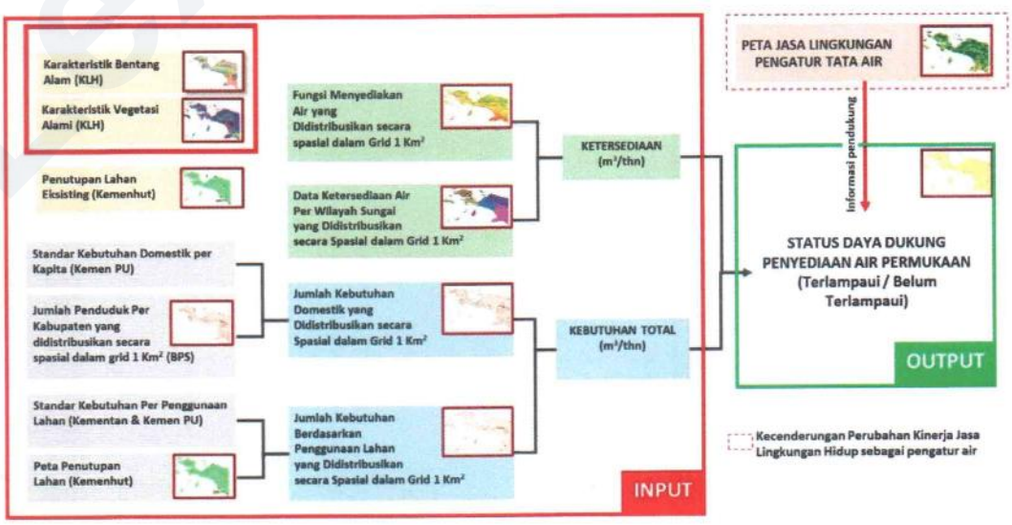


Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Berikut merupakan contoh penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode kinerja Jasa Lingkungan Hidup terkait air. Dalam penentuan daya dukung dan daya tampung air, kinerja Jasa Lingkungan Hidup yang dihitung adalah:

1. kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air, yang dihitung menggunakan indikator ketersediaan jumlah air dalam satuan unit meter kubik per hektare, dan indikator pemanfaatan maksimum ekstraksi air secara berkelanjutan dalam satuan unit meter per hektare per tahun.
2. kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air, yang dihitung menggunakan indikator:
   a. ketersediaan air, yang meliputi kapasitas infiltrasi (litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, penutupan), dan retensi air (vegetasi, topografi, litologi) dalam satuan unit meter kubik; dan
   b. kinerja air, yang meliputi kuantitas infiltrasi, retensi air, dan pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis.

Secara keseluruhan, kerangka penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode kinerja Jasa Lingkungan Hidup terkait air disajikan dalam Gambar 4.




Gambar 4. Kerangka proses penyusunan daya dukung dan daya tampung air

Untuk . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Untuk penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode kinerja jasa Lingkungan Hidup terkait air ini memerlukan data dan informasi yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dengan contoh sebagai berikut:

B.1.1 Pengumpulan Data dan Informasi

Terdapat 2 (dua) jenis data yang dibutuhkan, yaitu data spasial dan nonspasial sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung air

| Tujuan | Jenis data | Data |
|---|---|---|
| 1. perhitungan kecukupan Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air dan kecenderungan perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air | spasial | peta karakteristik bentang alam (KBA) |
| | | peta karakteristik vegetasi alami (KVA) |
| | | peta penutupan lahan minimal 2 periode waktu ($T_0$ dan $T_1$) |
| | nonspasial | bobot dan skor karakteristik bentang alam (KBA), karakteristik vegetasi alami (KVA), dan penutupan lahan pada masing-masing Jasa Lingkungan Hidup |
| 2. perhitungan status dan ambang batas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | spasial | peta *Grid* skala ragam Indonesia<br>- Resolusi 30"x30" untuk nasional dan provinsi;<br>- resolusi 5"x5" untuk Kabupaten/Kota |
| | | peta wilayah aliran sungai |
| | | peta wilayah administratif |
| | | peta jalan |
| | nonspasial (tabular) | jumlah populasi provinsi/kabupaten/kota |
| | | data ketersediaan air |
| | | standar kebutuhan air per kapita |
| | | data kebutuhan air untuk pemanfaatan lahan |

B.1.2 Analisis . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

B.1.2 Analisis Data dan Informasi

Berdasarkan data di atas, dilakukan analisis untuk melakukan:

1. perhitungan kecukupan jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air dan kecenderungan perubahan kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air, dengan cara sebagai berikut:

   a. perhitungan kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia dan pengatur air
   Perhitungan kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air dan jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air dilakukan untuk mengetahui kecukupan dan keberlanjutan ketersediaan air untuk pemanfaatan rumah tangga dan kegiatan ekonomi berbasis lahan.

   Kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia dan pengatur air dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) parameter yaitu:
   1) karakteristik bentang alam;
   2) karakteristik vegetasi alami; dan
   3) kelas penutupan lahan.

   Persamaan yang digunakan untuk perhitungan tersebut menggunakan metode penjumlahan berbobot (*Simple Additive Weight*), dengan penentuan bobot dan skor oleh pakar.

   Kinerja Jasa Lingkungan Hidup = f {Bentang alam, Vegetasi alami, Penutupan Lahan}

   $$= (w_{ba} \times s_{ba}) + (w_{veg} \times s_{veg}) + (w_{pl} \times s_{pl})$$

   Keterangan:
   - $w_{ba}$ = bobot karakteristik bentang alam
   - $s_{ba}$ = skor karakteristik bentang alam
   - $w_{veg}$ = bobot karakteristik vegetasi alami
   - $s_{veg}$ = skor karakteristik vegetasi alami
   - $w_{pl}$ = bobot kelas penutupan lahan
   - $s_{pl}$ = skor penutupan lahan

Pada . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Pada jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air, bobot karakteristik bentang alam sebesar 32%, bobot karakteristik vegetasi alami sebesar 8%, dan bobot penutup lahan sebesar 60%. Pada jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air, bobot karakteristik bentang alam sebesar 28%, bobot karakteristik vegetasi alami sebesar 12%, dan bobot penutupan lahan sebesar 60%.

Untuk penilaian skor pada karakteristik bentang alam, karakteristik vegetasi alami, dan penutupan lahan diberikan nilai yang berkisar antara 1 sampai 5, dengan kategori:

- Nilai 1 = sangat rendah
- Nilai 2 = rendah
- Nilai 3 = sedang
- Nilai 4 = tinggi,
- Nilai 5 = sangat tinggi.

Kelima nilai tersebut merepresentasikan peran dari 3 (tiga) parameter dalam membentuk kinerja Jasa Lingkungan Hidup berdasarkan definisi dan indikator kinerjanya masing-masing.

Nilai indeks dari kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia dan pengatur air adalah dari nilai 1 sampai 5 dengan interval 0,8 yang dibagi ke dalam 5 kelas sebagai berikut :

- Sangat tinggi = 4,21 - 5,00
- Tinggi = 3,41 - 4,20
- Sedang = 2,61 - 3,40
- Rendah = 1,81 - 2,60
- Sangat rendah = 1,00 - 1,80

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air dihitung pada tahun saat kajian dilakukan.

b. Perhitungan kecenderungan perubahan kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air

Cara perhitungan kecenderungan perubahan kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air sebagaimana berikut:

1) menghitung selisih indeks jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air pada tahun acuan ($T_0$) dengan tahun saat dilaksanakan kajian ($T_1$)

2) menilai . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

2) menilai kecenderungan perubahan kinerja jasa Lingkungan Hidup dalam rentang waktu tahun acuan ($T_0$) dan saat dilaksanakan kajian ($T_1$), dengan kriteria menurun, tetap dan meningkat.
3) menghitung luas dan persentase perubahan kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air dalam rentang waktu tahun acuan ($T_0$) dan saat dilaksanakan kajian ($T_1$).

Kecenderungan perubahan kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air digunakan untuk mengetahui sebaran spasial wilayah yang mengalami perubahan kinerja jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air dalam periode tertentu.

Perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai pengatur air disebabkan oleh perubahan dari parameter penutupan lahan dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk parameter karakteristik bentang alam dan karakteristik vegetasi alami dinilai tidak berubah.

2. Perhitungan status dan ambang batas daya dukung dan daya tampung air dengan cara sebagai berikut:

a. perhitungan ketersediaan air tiap *grid*

Perhitungan ketersediaan air dilakukan melalui pendekatan sistem *grid* dengan resolusi 30" x 30" (± 0,9km x 0,9km), dengan langkah sebagai berikut:

Langkah 1. identifikasi wilayah aliran sungai dan ketersediaan air.

Pada data ketersediaan air tiap wilayah aliran sungai, digunakan asumsi 80% dari ketersediaan air yang dapat digunakan atau disebut juga sebagai ketersediaan air andalan.

Langkah 2. analisis tumpang susun antara peta wilayah aliran sungai, peta *grid* dan peta kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air.

Ketiga peta (wilayah aliran sungai; *grid*; dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup) ditumpang susun sehingga dalam satu ID-*grid* memuat:

1) data . . .

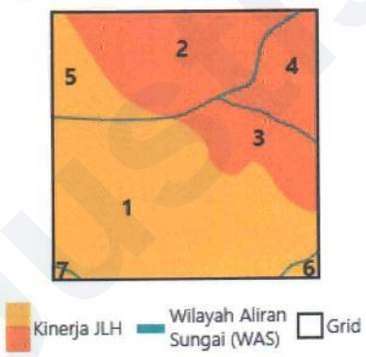


Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

1) data indeks kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air; dan
2) informasi ketersediaan air dari tiap wilayah aliran sungai.

Indeks kinerja Jasa Lingkungan Hidup berperan sebagai faktor pendistribusian jumlah air. Jika nilai indeks tinggi maka nilai ketersediaan air pun tinggi.

Contoh penampang satu *grid* sebagai hasil analisis tumpang susun dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:




Gambar 5. Penampang *Grid*

Berdasarkan ilustrasi di atas, tumpang susun peta menghasilkan informasi:

1) delineasi baru berupa tujuh poligon dalam satu *grid*;
2) dua kelas indeks Jasa Lingkungan Hidup dengan satu wilayah aliran sungai; dan
3) indeks Jasa Lingkungan Hidup dan ketersediaan air pada poligon nomor 1 akan berisi data yang sama dengan poligon nomor 5, 6, dan 7, dan poligon nomor 2 sama dengan poligon nomor 3 dan 4.

Proses analisis pada tahapan ini hanya mengidentifikasi luasan setiap poligon, dan belum menyajikan secara proporsional informasi ketersediaan air dan indeks Jasa Lingkungan Hidup penyedia air yang disajikan dalam *grid*. Sehingga perlu dilakukan perhitungan distribusi jumlah ketersediaan air tiap *grid* yang dijabarkan dalam langkah 3.

Langkah 3. . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Langkah 3. distribusi jumlah ketersediaan air tiap *grid*.

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah ketersediaan air dalam satu *grid* melalui penghitungan indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air tiap poligon dengan persamaan berikut:

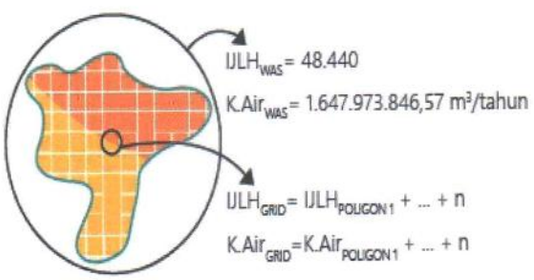
$$IJLH_{POLIGON} = \frac{Luas\ Poligon}{Luas\ Grid}\ x\ IJLH$$

Keterangan:

| | |
|---|---|
| $IJLH_{POLIGON}$ | = indeks Jasa Lingkungan Hidup dalam satu poligon |
| Luas Poligon | = luasan poligon |
| Luas *Grid* | = luasan *grid* |
| IJLH | = indeks Jasa Lingkungan Hidup |

Selanjutnya dilakukan penjumlahan indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia air untuk tiap wilayah aliran sungai. Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan, gunakan platform aplikasi spasial seperti ArcGIS dan sejenisnya.

Sebagai contoh, dari proses penjumlahan ribuan data *grid* dalam satu wilayah aliran sungai didapatkan nilai indeks Jasa lingkungan wilayah aliran sungai sebesar 48.440. Nilai tersebut digunakan sebagai pembanding terhadap indeks Jasa Lingkungan Hidup poligon untuk mencari proporsi ketersediaan air tiap poligon sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 6 berikut:




Gambar 6. Ilustrasi distribusi dalam *grid*

Ilustrasi . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Ilustrasi di atas diformulasikan secara sederhana dengan persamaan berikut ini:

$$K.Air_{POLIGON} = \frac{IJLH_{Poligon}}{IJLH_{WAS}} x\ K.Air_{WAS}$$

Keterangan:

| | | |
|---|---|---|
| $K.Air_{poligon}$ | = | ketersediaan air dalam satu poligon |
| $IJLH_{poligon}$ | = | indeks Jasa Lingkungan Hidup dalam satu poligon |
| $IJLH_{WAS}$ | = | indeks Jasa Lingkungan Hidup dalam wilayah aliran sungai |
| $K.Air_{WAS}$ | = | ketersediaan air dalam wilayah aliran sungai |

Setelah dilakukan perhitungan, ketersediaan air di setiap poligon dalam satu *grid* dijumlahkan untuk mendapatkan total ketersediaan air tiap *grid*.

b. perhitungan kebutuhan air tiap *grid*

Perhitungan kebutuhan air menggunakan analisis spasial berbasis sistem *grid* dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan. Adapun perhitungan setiap sektor dimaksud sebagai berikut:

1) perhitungan kebutuhan air untuk rumah tangga.

Langkah 1. mengaplikasikan sistem *grid* dalam peta administrasi.

Pada langkah ini dilakukan tumpang susun peta administrasi dengan peta *grid*. Peta administrasi harus memuat informasi jumlah penduduk di dalamnya. Untuk menghindari perhitungan ganda di satu kabupaten/kota, harus dipastikan setiap *grid* tidak berada pada dua atau lebih batas administrasi.

Hasil perhitungan disusun dalam bentuk peta *grid* administrasi untuk dijadikan dasar pemotongan peta penutupan lahan dan peta jaringan jalan sesuai *grid* administrasi.

Langkah 2. . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Langkah 2. menilai bobot tipe penutupan lahan tiap *grid*.

a) menilai bobot tipe penutupan lahan
Semakin besar bobot pada tipe penutupan lahan, semakin besar pula distribusi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Nilai bobot yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan air tercantum pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Bobot kelas penutupan lahan untuk distribusi penduduk dalam *grid* skala ragam

| Kelas Penutupan Lahan | Bobot |
|---|---|
| perkebunan | 0,005 |
| permukiman | 0,437 |
| sawah | 0,126 |
| belukar rawa | 0,048 |
| belukar | 0,048 |
| tegalan/ladang | 0,142 |
| pertambangan | 0,111 |
| tambak | 0,1 |
| hutan lahan kering sekunder | 0,023 |
| hutan tanaman | 0,023 |
| pertanian lahan kering | 0,077 |
| pertanian lahan kering campur | 0,077 |

b) melakukan tumpang susun peta administrasi *grid* dengan peta penutupan lahan

Proses tumpang susun akan menghasilkan *grid* dengan beberapa poligon kelas penutupan lahan.

c) melakukan perhitungan proporsi bobot tipe penutupan lahan untuk poligon pada setiap *grid*.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung proporsi bobot tipe penutupan lahan adalah sebagai berikut:

$$Bobot.PL_{Poligon} = \frac{Luas\ poligon}{Luas\ Grid}\ x\ Bobot\ PL$$

Keterangan:
$Bobot.PL_{poligon}$ = bobot penutupan lahan poligon
Bobot PL = bobot penutupan lahan

d) menjumlahkan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d) menjumlahkan bobot tipe penutupan lahan pada tiap poligon dalam satu *grid* untuk mendapatkan total bobot penutupan lahan *grid*.

Langkah 3. menilai bobot jalan tiap *grid*.

a) melakukan tumpang susun peta administrasi *grid* dengan peta jaringan jalan untuk menghasilkan peta jaringan jalan dalam sistem *grid*.
b) melakukan perhitungan proporsi bobot tiap satuan garis pada setiap *grid*.
Dalam melakukan perhitungan proporsi bobot tiap satuan garis pada setiap *grid* menggunakan nilai bobot sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Bobot jalan untuk distribusi penduduk dalam *grid* skala ragam

| Kelas Jalan | Bobot |
|---|---|
| | |
| jalan arteri | 0,095 |
| jalan lokal | 0,180 |
| jalan kolektor | 0,009 |

perhitungan bobot jalan menggunakan satuan panjang jalan sebagai pembandingnya dengan persamaan sebagai berikut:

$$Bobot\ Jalan_{garis} = \frac{P.Jalan_{GARIS}}{P.Jalan_{GRID}}\ x\ Bobot\ Jalan$$

Keterangan:
Bobot $Jalan_{garis}$ = bobot pada garis kelas jalan
$P.Jalan_{GARIS}$ = panjang garis jalan
$P.Jalan_{GRID}$ = panjang *grid* jalan
Bobot Jalan = nilai bobot kelas jalan

c) menjumlahkan nilai bobot penggunaan lahan dan nilai bobot jalan untuk mendapatkan bobot distribusi per *grid* sebagai faktor distribusi penduduk.

Langkah 4. . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Langkah 4. mendistribusikan penduduk dalam *grid*.

Setelah bobot distribusi penduduk tiap *grid* diketahui, dilakukan perhitungan jumlah penduduk tiap *grid* dengan membandingkan 1 *grid* dengan total *grid* menggunakan persamaan berikut:

$$Pop_{GRID} = \frac{W_{GRID}}{W_{ADM}} x\ Populasi_{ADM}$$

Keterangan:

| | | |
|---|---|---|
| $Pop_{grid}$ | = | jumlah populasi dalam satu *grid* |
| $W_{grid}$ | = | nilai bobot per *grid* |
| $W_{adm}$ | = | nilai bobot seluruh *grid* dalam satu wilayah administrasi |
| $Populasi_{ADM}$ | = | jumlah populasi dalam satu wilayah administrasi |

Nilai total bobot *grid* disesuaikan dengan batasan administrasi yang dikaji. Jika data populasi yang digunakan adalah data kabupaten/kota maka batas total bobot *grid* mengikuti batasan administrasi kabupaten/kota.

Langkah 5. distribusi kebutuhan air rumah tangga tiap *grid*.

Distribusi kebutuhan air rumah tangga tiap *grid* ditentukan berdasarkan data penduduk *grid* tersebut dikalikan dengan angka kebutuhan air untuk hidup layak, sebesar 120 liter/kapita/hari atau 43,8 m3/kapita/tahun dengan persamaan sebagai berikut:

$$D_{GRID} = Pop_{GRID}\ x\ KHL_D\ x\ FK$$

Keterangan :

| | | |
|---|---|---|
| $D_{GRID}$ | = | Distribusi kebutuhan air rumah tangga tiap *grid* |
| $Pop_{GRID}$ | = | Jumlah populasi dalam tiap *grid* |
| $KHL_D$ | = | Angka kebutuhan air untuk kegiatan domestik (120 liter/kapita/hari atau 43,8 m3/kapita/tahun) |
| FK | = | Faktor koreksi (*konstanta* = 2) |

2) perhitungan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

2) perhitungan kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan (penutupan lahan).

Peta yang digunakan sebagai dasar analisis adalah peta penutupan lahan dengan sistem *grid* yang telah ditumpangsusunkan pada tahapan sebelumnya.

Dari peta tersebut, dihitung kebutuhan air penutupan lahan dengan menggunakan persamaan yang diadopsi dari rumus perhitungan penggunaan air untuk padi (persawahan) per tahun sebagai berikut.

$$Q_i = A_i \, x \, I \, x \, q$$

Keterangan,

| | | |
|---|---|---|
| $Q_i$ | : | jumlah penggunaan air penutupan lahan dalam setahun untuk *grid* ke-i ($m^3$/tahun), |
| $A_i$ | : | luas lahan *grid* ke-i (hektare), |
| $I$ | : | intensitas tanaman dalam persen (%) musim per tahun |
| $q$ | : | standar penggunaan air (0,001 $m^3$/detik/ha × 3600 × 24 × 120 hari per musim) |

Untuk tanaman padi, intensitas tanam diasumsikan 200%, yaitu dua musim per tahun. Komoditas bahan pangan yang diperhitungkan selain padi adalah tebu dan palawija. Untuk menghitung kebutuhan air untuk tanaman tebu dan palawija, digunakan angka perbandingan umum yaitu padi : tebu : palawija, dengan nilai 4 : 1,5 : 1. Kelas penutupan lahan untuk penanaman tebu adalah kebun, sedangkan untuk palawija di tegalan/ladang. Oleh karena itu, untuk setiap kelas lahan didapatkan perbandingan persawahan : perkebunan : kebun campuran : tegalan/ladang = 4 : 1,5 : 1,5 : 1.

Perhitungan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Perhitungan kebutuhan air untuk tambak diasumsikan,

$$Q_i = A_i \, x \, q$$

dengan,

| | | |
|---|---|---|
| *Qi* | : | jumlah penggunaan air tutupan lahan tambak dalam setahun |
| *Ai* | : | luas lahan *grid* ke-i (hektare), |
| *q* | : | standar penggunaan air (10.000 m3/tahun) |

3) menentukan total kebutuhan air tiap *grid*.

Setelah mengetahui jumlah kebutuhan air untuk rumah tangga ($D_{GRID}$) dan lahan ($Q_{GRID}$), kedua nilai ini dijumlahkan ($T_{GRID}$). Nilai inilah yang disebut sebagai Kebutuhan Air tiap *grid* untuk dibandingkan dengan Ketersediaan Air tiap *grid*.

$$T_{GRID} = D_{GRID} + Q_{GRID}$$

dengan,

| | | |
|---|---|---|
| $T_{GRID}$ | : | total kebutuhan air *grid* ke-i ($m^3$/tahun), |
| $D_{GRID}$ | : | kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga *grid* ke-i (m3/tahun), dan |
| $Q_{GRID}$ | : | jumlah penggunaan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan dalam setahun untuk *grid* ke-i ($m^3$/tahun). |

4) penentuan status daya dukung dan daya tampung air.

Status daya dukung dan daya tampung air setiap *grid* ditentukan berdasarkan selisih ketersediaan air dan kebutuhan air total, dengan persamaan:

$$S_{GRID} = K.Air_{GRID} - T_{GRID}$$

Keterangan:
dengan ketentuan,

- jika selisih <0 maka dikategorikan "terlampaui" artinya kebutuhan terhadap air melebihi atau melampaui ketersediaan air permukaan yang ada; dan
- jika selisih $\geq$ 0 maka dikategorikan "belum terlampaui" artinya kebutuhan terhadap air masih di bawah ketersediaan air permukaan.

5) menghitung . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

5) menghitung ambang batas populasi yang dapat didukung.

Analisis selanjutnya dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak populasi maksimum yang mampu didukung dengan kondisi ketersediaan air yang ada. Analisis ini merupakan penentuan ambang batas penduduk. Persamaan yang digunakan untuk menghitung ambang batas penduduk adalah sebagai berikut:

$$AB = \frac{K.Air - T}{KHL_{DE}} + Pop$$

Keterangan:

| | | |
|---|---|---|
| *AB* | = | ambang batas penduduk yang dapat didukung (jiwa) |
| *K.Air* | = | ketersediaan air ($m^3$/th) |
| *T* | = | total kebutuhan air ($m^3$/th) |
| $KHL_{DE}$ | = | kebutuhan air untuk kegiatan domestik dan ekonomi, (800 $m^3$ air/kapita/th) |
| *Pop* | = | Populasi saat ini (jiwa) |

B.2 Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode jejak ekologis dan biokapasitas.

B.2.1 Konsep ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) dalam penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode jejak ekologis dan biokapasitas.

Sisi ketersediaan (*supply*) merupakan ketersediaan lingkungan dalam bentuk biokapasitas yang dihasilkan dari kondisi ekoregion sebagai pembentuk alami karakteristik fisik suatu wilayah sehingga mempengaruhi kondisi jasa Lingkungan Hidup untuk mendukung kebutuhan dasar manusia.

Sisi kebutuhan (*demand*) merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, terdiri dari sandang, pangan, dan papan, dikonversikan menggunakan pendekatan standar kebutuhan ruang terhadapnya sehingga menghasilkan jejak ekologis yang menggambarkan kebutuhan lahan per orang per hektare dengan asumsi jumlah konsumsi dianggap sama pada masing-masing pulau-kepulauannya.

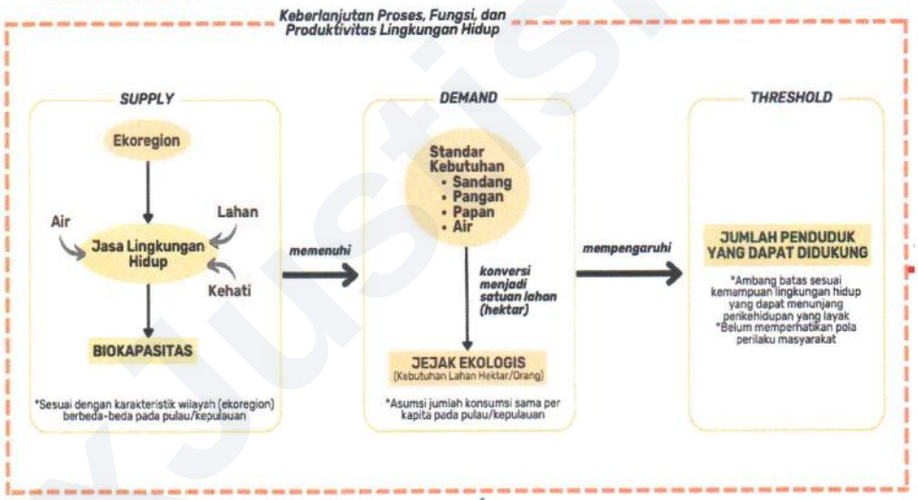
Berdasarkan perbandingan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) tersebut menghasilkan ambang batas (*threshold*) yang merupakan jumlah penduduk yang dapat didukung sesuai dengan kemampuan Lingkungan Hidup dalam menunjang kebutuhan dasar manusia.

Perbandingan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Perbandingan antara jumlah penduduk saat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup disusun dengan ambang batas jumlah penduduk hasil perhitungan tersebut menggambarkan status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup mana yang sudah terlampaui dan mana yang belum terlampaui.




Gambar 7 Konsep ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) dalam jejak ekologis dan biokapasitas

B.2.2 contoh penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode jejak ekologis dan biokapasitas.

1. pengumpulan data dan informasi
   Tahap ini merupakan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan untuk menghasilkan biokapasitas, jejak ekologis, serta jasa Lingkungan Hidup eksisting dan optimum.

Tabel 4 Kebutuhan data dan informasi perhitungan jejak ekologis dan biokapasitas

| Indikator | Metode | Data |
|---|---|---|
| biokapasitas | pemodelan hasil reklasifikasi lahan | penutupan lahan eksisting |
| | | penetapan hutan lindung dan hutan konservasi |
| optimasi alokasi penutupan lahan | Pemodelan Alokasi Luas dan Spasial | penutupan lahan eksisting |
| | | penetapan hutan lindung dan hutan konservasi |
| | | elevasi |
| | | kemiringan lereng |
| | | ketersediaan air |

ekoregion . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Indikator | Metode | Data |
|---|---|---|
| | | ekoregion |
| | | temperatur/suhu permukaan tanah |
| | | curah hujan |
| | | kandungan organik tanah |
| | | pH tanah |
| | | kandungan nitrogen |
| | | penangkapan dan penyimpanan karbon |
| | | indeks kelembaban topografis |
| | | indeks variasi ketinggian permukaan tanah |
| Jasa Lingkungan Hidup optimum | analisis Jasa Lingkungan Hidup terkait penyedia dan pengatur air, pendukung kehati, serta penyedia pangan | penutupan lahan optimum |
| | | karakteristik bentang alam (KBA) |
| | | karakteristik vegetasi alami (KVA) |
| Jasa Lingkungan Hidup eksisting | analisis Jasa Lingkungan Hidup terkait penyedia dan pengatur air, pendukung kehati, serta penyedia pangan | penutupan lahan eksisting |
| | | karakteristik bentang alam (KBA) |
| | | karakteristik vegetasi alami (KVA) |
| jejak ekologis | konversi kebutuhan luas reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) | pangan:<br>• konsumsi pangan<br>• kandungan energi pangan<br>• kebutuhan energi pangan<br>• produksi pangan<br>• luas panen pangan<br>• *footprint intensity* dalam produksi pangan |
| | | sandang<br>• kebutuhan kapas<br>• produksi kapas<br>• luas panen kapas<br>• *footprint intensity* dalam produksi kapas |
| | | papan (tempat tinggal dan ruang publik, pemenuhan kayu, dan listrik) |

• standar . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Indikator | Metode | Data |
|---|---|---|
| | | • standar kebutuhan ruang per orang untuk tempat tinggal dan ruang publik<br>• kebutuhan kayu untuk bangunan<br>• *footprint intensity* dalam produksi kayu<br>• konsumsi listrik<br>• penyediaan sarana pembangkit listrik |

2. analisis data dan informasi

Proses analisis dimulai dengan menghitung biokapasitas. Bagian ini mencakup penilaian terhadap penutupan lahan pada saat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup disusun (*eksisting*) dan produktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pada tahap ini, penutupan lahan direklasifikasi serta dilakukan penilaian kesesuaian lahannya terhadap parameter fisik yang relevan.

Analisis selanjutnya dilakukan dengan perhitungan jejak ekologis dengan mengumpulkan data kebutuhan dasar manusia untuk pemenuhan pangan, sandang, dan papan, yang kemudian dikonversikan menjadi satuan lahan. Data ini kemudian digunakan sebagai input untuk proses optimasi melalui pemodelan menggunakan bantuan perangkat lunak dalam memproses pemodelan tersebut.

Pada tahap selanjutnya, hasil optimasi ini menghasilkan alokasi penutupan lahan yang mencakup berbagai jenis lahan seperti hutan, pertanian, dan pemukiman, yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia. Dari hasil tersebut, diperoleh ambang batas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang menunjukkan jumlah penduduk yang dapat didukung oleh Lingkungan Hidup secara mandiri. Ambang batas tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk saat penyusunan dilakukan untuk mengetahui status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, apakah telah terlampaui atau belum terlampaui.

a. Perhitungan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

a. Perhitungan Biokapasitas

Uraian langkah dari perhitungan biokapasitas ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1: reklasifikasi penutupan lahan dari 23 menjadi 9 jenis penutupan lahan.

Proses reklasifikasi penutupan lahan bertujuan untuk menyederhanakan jenis penutupan lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Reklasifikasi tersebut mengubah dari 23 jenis menjadi 9 jenis penutupan lahan. Selain mengacu pada definisi klasifikasi oleh wali data peta penutupan lahan, proses reklasifikasi ini juga mengikuti definisi operasional dari Lembaga Pemerintah yang mengurus bidang standarisasi.

Contohnya, semak belukar dimasukkan ke dalam penutupan lahan hutan untuk pemenuhan kayu, meskipun pemenuhan kayu dimaksudkan untuk kebutuhan bangunan bukan kayu gelondongan. Hutan lindung dan konservasi, serta badan air, tidak diikutsertakan dalam pemodelan optimasi karena memiliki fungsi utama melindungi Lingkungan Hidup. Proses ini dilakukan melalui bantuan perangkat lunak untuk menggabungkan luasan pada kelompok penutupan lahan yang sudah ditetapkan di luar hutan lindung dan konservasi.

Adapun reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan

| **Klasifikasi Penutupan Lahan** | **Hasil Reklasifikasi Lahan untuk Pemenuhan Kebutuhan** | **Kode** |
|---|---|---|
| hutan lahan kering primer | hutan dan belukar untuk pemenuhan kayu | 1 |
| hutan lahan kering sekunder | | |
| hutan mangrove primer | | |
| hutan mangrove sekunder | | |
| hutan rawa primer | | |
| hutan rawa sekunder | | |

hutan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Klasifikasi Penutupan Lahan | Hasil Reklasifikasi Lahan untuk Pemenuhan Kebutuhan | Kode |
|---|---|---|
| hutan tanaman | | |
| semak belukar | | |
| semak belukar rawa | | |
| sawah | pertanian lahan basah | 2 |
| pertanian lahan kering | pertanian lahan kering | 3 |
| pertanian lahan kering campur | | |
| perkebunan | perkebunan | 4 |
| bandara/pelabuhan | lahan terbangun | 5 |
| permukiman/transmigrasi | | |
| pertambangan | | |
| savanna/padang rumput | padang rumput | 6 |
| lahan terbuka | | |
| tambak | tambak | 7 |
| diambil dari penetapan fungsi kawasan hutan | hutan lindung dan hutan konservasi | 8 |
| badan air (hanya perairan darat) | badan air | 9 |

Langkah 2: mengidentifikasi kesesuaian lahan berdasarkan 11 parameter fisik alami lahan.

Setelah didapatkan hasil reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan, maka area-area tersebut diidentifikasi kesesuaiannya terhadap parameter fisik alami. Kesesuaian dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu wilayah dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari pangan, sandang, dan papan yang berbeda-beda komoditasnya. Kesesuaian terhadap parameter fisik menjadi keterbatasan pemodelan optimasi dikarenakan tidak memperhitungkan adanya intervensi teknologi maupun input perencanaan kegiatan ekonomi. Adapun parameter fisik alami yang dimaksud meliputi:

1) elevasi;
2) kemiringan lereng;
3) temperatur/suhu permukaan tanah;
4) curah hujan;

5) jenis . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

5) jenis tanah;
6) ketersediaan air;
7) kandungan organik tanah/*organic carbon content* (% *weight*);
8) pH tanah (-log(H+));
9) *carbon capture and storage* (mm)/*bulk density* (g/cm$^3$);
10) *topographic wetness index* (TWI);
11) *terrain ruggedness index* (TRI).

Proses pemodelan menggunakan pendekatan metode *Error Correcting Output Coding - Support Vector Machine* (ECOC-SVM), yaitu model kesesuaian lahan berdasarkan karakteristik lahan dengan diketahui nilai probabilitasnya. Pemilihan ECOC-SVM dikarenakan memiliki akurasi sebesar 86,46% dengan tingkat kesepakatan kondisi yang sangat tinggi antara pemodelan dengan eksistingnya. Pemodelan ini dilakukan melalui bantuan perangkat lunak pengolahan data spasial seperti QGis atau perangkat lunak lainnya, dengan menggunakan Dzetsaka, yaitu salah satu plugin yang terdapat pada QGis, yang digunakan untuk klasifikasi *machine learning* secara semi-otomatis.

Hasilnya akan didapatkan nilai probabilitas kesesuaian lahan dengan penggambaran matriks yang paling besar nilainya atau dapat dikatakan paling sesuai untuk memenuhi komoditas pada kebutuhan dasar. Identifikasi kesesuaian lahan tidak ada pembobotan terhadap parameter fisik sehingga tidak ada yang paling besar pengaruhnya.

Dari ketujuh pulau/kepulauan, didapatkan probabilitas dengan penggambaran matriks paling besar nilainya sehingga dapat dikatakan paling sesuai sebagaimana yang terlihat pada Tabel 6. Nilai ini menjadi input untuk pemodelan matematika menggunakan bantuan perangkat lunak guna mendapatkan jumlah penduduk yang dapat didukung dan luas optimum pada reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan pada pulau/kepulauan.

Tabel 6 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Tabel 6 Kesesuaian parameter fisik pada reklasifikasi lahan terhadap kebutuhan

| Kebutuhan Dasar | | | Kode Reklasifikasi Lahan untuk Pemenuhan Kebutuhan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pangan | Padi-Padian | Beras | | | | | | | |
| | Jagung dan Terigu | | | | | | | | |
| | Umbi-umbian | | | | | | | | |
| | Pangan Hewani | Daging dan Susu | | | | | | | |
| | | Unggas dan Telur | | | | | | | |
| | | Ikan | | | | | | | |
| | Minyak dan Lemak | | | | | | | | |
| | Buah/Biji Berminyak | | | | | | | | |
| | Kacang-Kacangan | | | | | | | | |
| | Gula | | | | | | | | |
| | Sayuran dan Buah | | | | | | | | |
| Sandang | Kapas | | | | | | | | |
| Papan | Tempat Tinggal | | | | | | | | |
| | Ruang Publik | | | | | | | | |
| | Pemenuhan Kayu | | | | | | | | |
| | Listrik | | | | | | | | |

**Kode reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan: (1) Hutan dan Belukar untuk Pemenuhan Kayu; (2) Pertanian Lahan Basah; (3) Pertanian Lahan Kering; (4) Perkebunan; (5) Lahan Terbangun; (6) Padang Rumput; (7) Tambak*

Langkah 3: menghitung produktivitas lahan

Produktivitas lahan dimaksudkan untuk mengetahui luas lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Produktivitas lahan mengacu pada jumlah sumber daya (komoditas) dari kebutuhan dasar yang dapat diproduksi dalam satu satuan luas lahan (hektare). Nilai produktivitas lahan hanya mengacu pada kebutuhan pangan dan sandang untuk kapas. Sedangkan untuk kebutuhan papan tidak dibutuhkan dikarenakan bukan dihasilkan dari

proses . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

proses penanaman. Pemodelan optimasi ini menyebabkan perhitungan produktivitas lahan berbeda-beda menyesuaikan komoditas sebagai berikut:

$$Produktivitas\ Lahan\ (\frac{Kg}{Ha}) = \frac{Produksi\ (Ton)}{Luas\ Panen\ (Ha)}$$

Pada perumusan di atas, perhitungan dapat dilakukan untuk mendapatkan nilai produktivitas yang bernilai tunggal atau tidak bergabung pada kelompok makan. Adapun komoditas yang sesuai adalah padi-padian (beras), jagung dan terigu, dan ikan. Perhitungan ini didasarkan akumulasi dari yang ada di provinsi pada masing-masing pulau/kepulauan.

Dikarenakan ketersediaan dan keakuratan data yang tersedia, terdapat pengecualian untuk data daging dan susu, serta telur dan unggas. Produktivitas lahan untuk daging dan susu sebesar 261,8 kg/ha dan unggas dan telur sebesar 1.599,2 kg/ha yang disamakan pada pulau/kepulauan. Sedangkan komoditas lainnya seperti umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayuran dan buah, serta kapas menggunakan perumusan berikut.

Penggunaan luas lahan yang dibutuhkan untuk memproduksi sumber daya dalam jumlah tertentu (*footprint intensity*). Hal ini dikarenakan perbedaan proporsi kebutuhan komoditas dalam memenuhi pemenuhan konsumsi kelompok pangan tersebut. Pada dasarnya, *footprint intensity* merupakan kebalikan dari nilai produktivitas dengan perumusan berikut:

$$Produktivitas\ Lahan = \frac{1}{Footprint\ Intensity\ \left(\frac{ha}{kg}\right)}$$

* *Footprint Intensity merupakan luas lahan yang dibutuhkan untuk memproduksi sumber daya dalam jumlah tertentu*
* *Perbedaan rumus dikarenakan pada lebih dari satu jenis pada kelompok pangan.*

Hasil . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Hasil perhitungan produktivitas lahan terkecuali daging dan susu serta unggas dan telur dikalikan dengan Indeks Pertanaman. Hal ini dimaksudkan bahwa Indeks Pertanaman merupakan informasi rerata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada komoditas pangan maupun sandang berupa kapas. Nilai Indeks Pertanaman mengikuti dengan kondisi pada pulau/kepulauan sehingga akan berbeda-beda. Namun untuk kapas memiliki nilai yang sama secara nasional sebesar 3 yang akan dipakai pada semua pulau/kepulauan.

Tabel 7 Nilai indeks pertanaman pada pulau/kepulauan di Indonesia

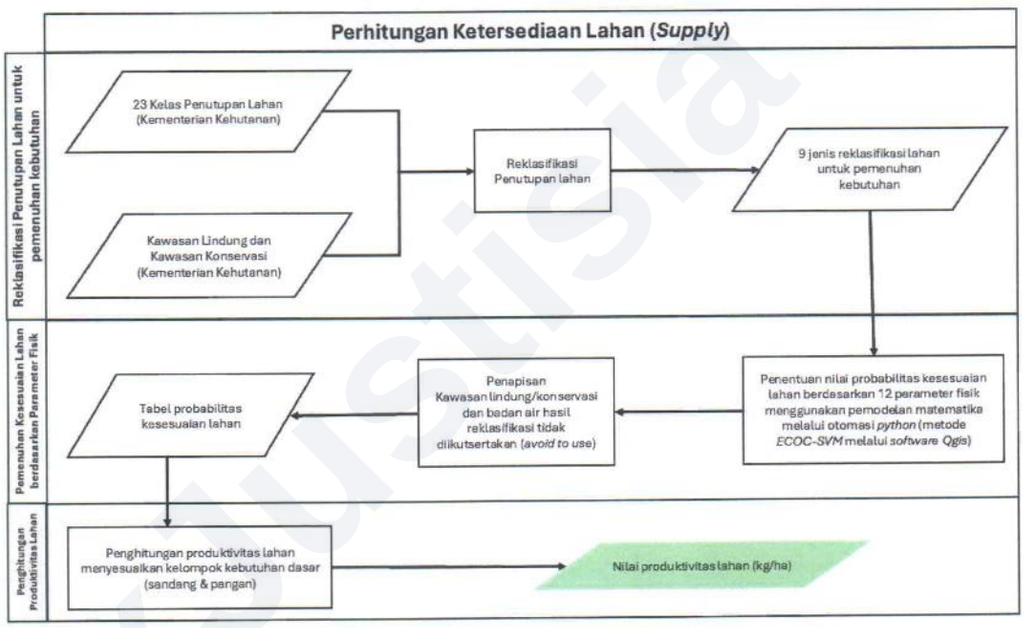
| Kelompok Pangan | Indeks Pertanaman | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sumatera | Jawa | Bali-Nusa Tenggara | Kalimantan | Sulawesi | Maluku | Papua |
| padi-padian | 1,22 | 1,44 | 1,29 | 1,01 | 1,26 | 1,18 | 0,89 |
| umbi-umbian | 0,19 | 0,59 | 0,36 | 0,09 | 0,28 | 0,32 | 0,20 |
| ikan | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| minyak dan lemak | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| buah/biji berminyak | 0,19 | 0,59 | 0,36 | 0,09 | 0,28 | 0,32 | 0,20 |
| kacang-kacangan | 0,19 | 0,59 | 0,36 | 0,09 | 0,28 | 0,32 | 0,20 |
| gula | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| sayuran dan buah | 0,19 | 0,59 | 0,36 | 0,09 | 0,28 | 0,32 | 0,20 |

Rangkuman . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Rangkuman proses perhitungan biokapasitas dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:




Gambar 8. Proses perhitungan biokapasitas

b. Perhitungan Kebutuhan Lahan

Uraian langkah dari perhitungan kebutuhan lahan adalah sebagai berikut:

Langkah 1: melakukan inventarisasi kebutuhan dasar hidup

Untuk melakukan inventarisasi kebutuhan dasar hidup, acuan data yang dipakai untuk menghitung kebutuhan dasar hidup antara lain kebutuhan pangan, sandang, dan papan, secara sederhana dapat dilihat sebagaimana konsep metodologi pada Tabel 8.

1) kebutuhan pangan
Kebutuhan pangan didasarkan pada data konsumsi pangan penduduk berdasarkan energi bahan pangan yang dikonsumsi setiap orang per hari dalam satuan kilo-kalori (kkal). Adapun besaran energi berdasarkan rata-rata angka kecukupan energi sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.

Tabel 8 . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Tabel 8 Standar kebutuhan pangan

| Kelompok Bahan Pangan | Konsumsi Energi (kkal) | Energi (kkal/100 gram) |
|---|---|---|
| padi-padian (beras, jagung, terigu) | 1.050 | 393,38 |
| umbi-umbian (singkong, ubi jalar, kentang, sagu, dan umbi lainnya) | 126 | 119,50 |
| pangan hewani (daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, dan ikan perairan darat) | 252 | 178,36 |
| minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak lainnya) | 210 | 900,00 |
| buah/biji berminyak (kelapa dan kemiri) | 63 | 542,86 |
| kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang lainnya) | 105 | 245,69 |
| gula (gula pasir dan gula merah) | 105 | 365,85 |
| sayur dan buah (sayur dan buah) | 126 | 39,41 |

** Pangan hewani untuk ikan dibatasi hanya perairan darat saja*
** Standar kelompok bahan pangan dan kandungan energi: Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2022*
** Jumlah konsumsi sesuai provinsi: Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2020-2022 (menyesuaikan ketersediaan data)*
** Kebutuhan energi: diambil rata-rata dari Permenkes 28 Tahun 2019*

Proses selanjutnya pada setiap kelompok bahan pangan dihitung konversi luas yang dibutuhkan untuk dapat memproduksi dengan persamaan matematika sebagai berikut. Luas yang dihasilkan akan disesuaikan dengan lahan yang dapat ditanami oleh suatu bahan pangan. Hasil dari luas yang masih berupa satuan $m^2$ akan diubah menjadi satuan hektare.

$$LPij = \frac{Kbj}{Ej} \times \frac{100}{1000} \times \frac{FIj}{IPj}$$

Keterangan: . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Keterangan:

| | | |
|---|---|---|
| LP*ij* | = | Luas jenis penutupan lahan I yang dibutuhkan untuk produksi bahan pangan jenis j ($m^2$) |
| Kb*j* | = | Kebutuhan energi bahan pangan jenis j setiap orang dalam 1 tahun (kkal) |
| E*j* | = | Kandungan energi bahan pangan jenis j (kkal/100 gram) |
| Fi*j* | = | *Footprint intensity* dalam produksi bahan pangan jenis j ($m^2$/kg) |
| IP*j* | = | Intensitas produksi bahan pangan jenis j dalam 1 tahun (kali) |

2) kebutuhan sandang

Kebutuhan sandang untuk pakaian mengacu pada kebutuhan kapas yang rata-rata nasional sebesar 7,5 kg/kapita/tahun. Secara nasional, dari keseluruhan produksi pakaian/tekstil membutuhkan kapas sekitar 42% dari total bahan baku tekstil. Sehingga nanti pada saat perhitungannya akan ada faktor pengkoreksi berupa 42% dengan kata lain kapas tidak 100% dapat menjadi pakaian.

Proses selanjutnya dihitung konversi luas yang dibutuhkan untuk dapat memproduksi dengan persamaan matematika sebagai berikut. Intensitas produksi kapas diketahui per proses panen terjadi 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Hasil dari luas yang masih berupa satuan $m^2$ akan diubah menjadi satuan hektare.

$$LT = Kb \times \frac{FI}{IP} \times P$$

Keterangan:

| | | |
|---|---|---|
| LT | = | Luas perkebunan yang dibutuhkan untuk produksi kapas ($m^2$) |
| Kb | = | Kebutuhan pakaian setiap orang dalam 1 tahun (kg) |
| FI | = | *Footprint intensity* dalam produksi kapas ($m^2$/kg) |
| IP | = | Intensitas produksi kapas dalam 1 tahun (kali) |
| P | = | Penggunaan bahan baku kapas untuk pakaian/tekstil (%) |

3) kebutuhan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

3) kebutuhan papan

a) tempat tinggal dan ruang publik
Untuk tempat tinggal dan ruang publik tidak membutuhkan persamaan matematika untuk konversi menjadi satuan lahan dikarenakan keduanya sudah berupa standar ruang. Pada Tabel 9, terlihat perbedaan cakupan standar ruang di mana untuk tempat tinggal dipilih yang sesuai syarat nasional sedangkan untuk ruang publik akan dipilih luasan yang paling besar karena diasumsikan yang paling bernilai optimum.

Tabel 9. Standar Kebutuhan Tempat Tinggal dan Ruang Publik

| Tempat Tinggal | | | Ruang Publik | |
|---|---|---|---|---|
| Kelas | Keterangan | Standar per Jiwa ($m^2$) | Jenis Ruang Publik | Standar per Jiwa ($m^2$) |
| 1 | Internasional | 12 | Sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga | 0,2-1 |
| 2 | Indonesia | 9 | Sarana budaya dan rekreasi | 0,017-0,12 |
| 3 | Ambang Batas | 7,2 | Sarana perdagangan dan niaga | 0,3-0,5 |
| | Sarana peribadatan | | | 0,03-0,36 |
| | Sarana kesehatan | | | 0,006-0,12 |
| | Sarana pendidikan dan pembelajaran | | | 0,28-2,6 |

b) pemenuhan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b) pemenuhan kayu

Dalam proses perhitungan pemenuhan kayu, menggunakan data kebutuhan kayu untuk bangunan dan kebutuhan luas lahan yang dibutuhkan untuk memproduksi sumber daya (*footprint intensity*) terhadap total penduduk pada pulau/kepulauan. Pemenuhan kebutuhan kayu untuk bangunan diproduksi dari lahan hutan meliputi hutan alam dan tanaman industri. Luas lahan hutan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kayu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan matematika sebagai berikut. Kebutuhan kayu dikonversi menjadi satuan luas lahan (hektare).

$$LKi = LBi \times Kb \times FI$$

dengan,

| | | |
|---|---|---|
| $LK_i$ | = | Luas hutan yang dibutuhkan untuk produksi kayu sebagian bahan bangunan jenis *i* ($m^2$) |
| LBi | = | Luas hutan terbangun jenis i ($m^2$ bangunan) |
| Kb | = | Kebutuhan kayu untuk bangunan ($m^3$ kayu) |
| FI | = | *Footprint intensity* dalam produksi kayu ($m^2$ hutan/$m^3$ kayu) |

c) listrik

Perhitungan kebutuhan listrik digunakan untuk menentukan luas lahan yang diperlukan dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik seperti Pembangkit Tenaga Listrik. Adapun data yang digunakan meliputi persentase ketersediaan pembangkit listrik eksisting; jumlah konsumsi listrik; *footprint intensity* untuk pembangkit listrik. Hasil konversi kebutuhan listrik menjadi satuan luas lahan (hektare).

Langkah 2: . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Langkah 2: menghitung jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan dasar pada satu hektare

Pada dasarnya, pada saat inventarisasi dasar di atas sudah menunjukkan bagaimana cara mengkonversi dari berbagai satuan tersebut menjadi satuan lahan (hektare). Jika disederhanakan, perhitungan tersebut membandingkan dua parameter, yaitu produktivitas lahan (kg/ha) dan kebutuhan dasar per orang (kg/orang). Hasil konversi dengan membandingkan dua parameter masih berupa seberapa banyak orang yang dapat dipenuhi kebutuhannya pada 1 hektare lahan di suatu pulau/kepulauan. Pada proses perhitungannya, sejumlah orang per luas ini didasarkan pada faktor pengkoreksi per 1.000 penduduk agar tidak terlalu kecil hasilnya.

$$Konversi = \frac{Produktivitas}{Kebutuhan}$$

Keterangan:

- Satuan konversi jumlah penduduk pada satu hektare = Orang/Ha
- Satuan produktivitas = Kg/Ha
- Satuan kebutuhan dasar = Kg/Orang
- Produktivitas sudah termasuk dikalikan dengan Indeks Penanaman

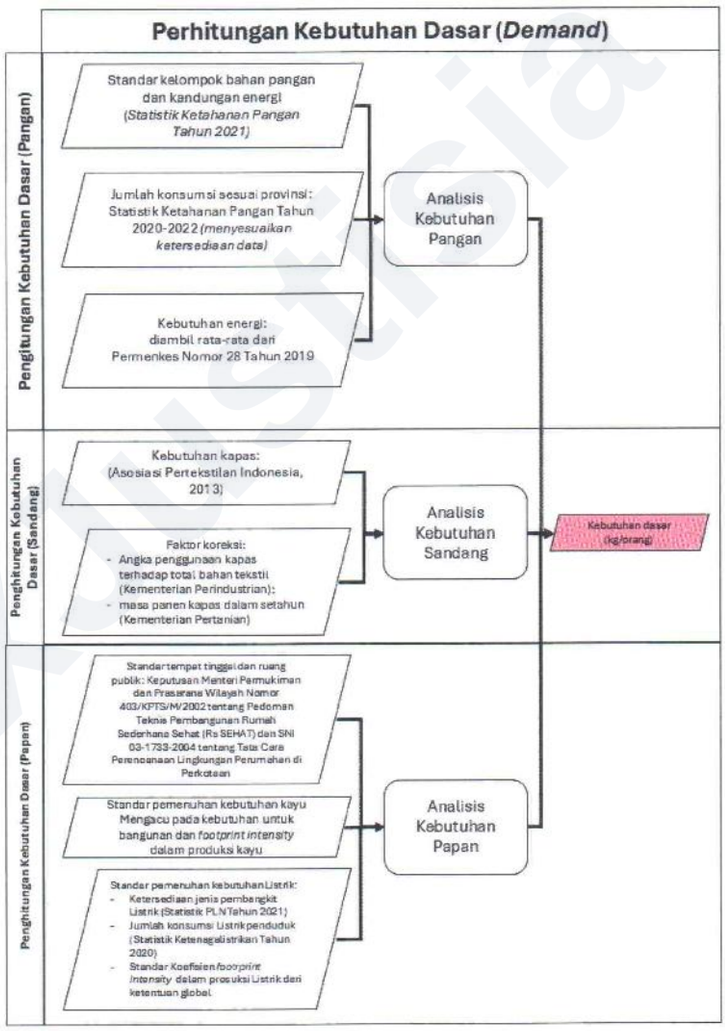
Hasil perhitungan ini akan menjadi input konversi jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan dasar pada satu hektare (nilai beta/β) untuk pemodelan matematika menggunakan bahasa pemrograman komputer seperti *python* atau bahasa pemrograman komputer sejenis lainnya yang relevan, untuk mendapatkan jumlah penduduk yang dapat didukung dan luas optimum pada reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan pada pulau/kepulauan.

Rangkuman . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Rangkuman proses perhitungan kebutuhan lahan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:




Gambar 9 Proses perhitungan kebutuhan dasar untuk penentuan jejak ekologis

c. Perhitungan Ambang Batas

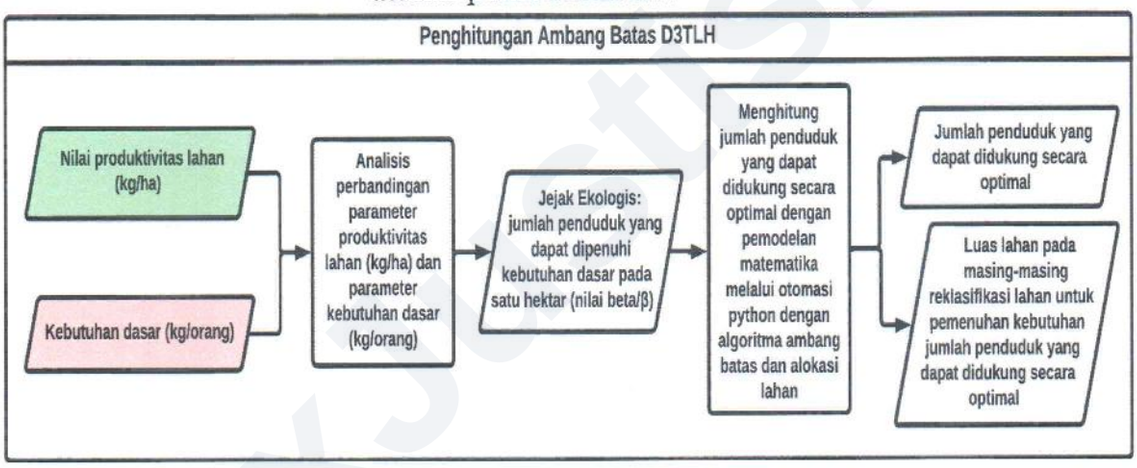
Guna mempermudah perhitungan, digunakan pemodelan matematika melalui otomasi bahasa pemrograman komputer seperti *python* atau bahasa pemrograman komputer sejenis lainnya yang relevan, dengan algoritma ambang batas dan alokasi lahan. Kebutuhan dasar dirincikan menjadi 16 komoditas, yaitu beras, jagung dan terigu, umbi-umbian, daging

dan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

dan susu, unggas dan telur, ikan, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, kapas, tempat tinggal, ruang publik, pemenuhan kayu, dan listrik. Hasil kesesuaian lahan (nilai α) dan konversi jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan dasar pada satuan hektare (nilai β) akan menjadi *constraint* dalam pemodelan ini.




Gambar 10 Proses Perhitungan Ambang Batas

Langkah 1: menentukan jejak ekologis

Perhitungan ini masih mengacu pada faktor pengkoreksi per 1000 penduduk maka untuk mendapatkan nilai Jejak ekologis dengan perumusan matematika:

$$KL_i = 1000 \sum_{j=1}^{16} \frac{1}{\left[\vec{\beta}_i\right]_j}$$

Dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan nilai jejak ekologis (KLi), dengan membalikkan rumus di Langkah 2 pada pertanyaan 6. Jejak ekologis didapatkan dengan membagi antara Kebutuhan (Kg/Orang) dengan Produktivitas (Kg/Ha). Adapun proses perhitungnya merupakan akumulasi dari ke-16 komoditas (j) sehingga akan didapatkan 1 nilai jejak ekologis, yaitu hektare/orang.

Langkah 2: . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Langkah 2: menentukan jumlah penduduk yang dapat didukung

Didasarkan pada nilai jejak ekologis per orang sehingga didapatkan ambang batas penduduk yang dapat didukung tanpa melihat apakah ketersediaan lahannya yang ada sudah sesuai dengan 12 parameter fisik dan semua kebutuhan dasar terpenuhi.

$$DTmax_i = \frac{L_i}{1000 \times KL_i}$$

Dimaksudkan bahwa jumlah penduduk maksimal (DT$max_i$) didapatkan dengan membagi antara luas wilayah pulau/kepulauan (tanpa hutan lindung dan hutan konservasi serta badan air) dengan nilai jejak ekologis ($KL_i$). Tentu dengan memperhatikan faktor pengkoreksi dari bahwa nilai jejak ekologis yang dihasilkan berdasarkan per 1.000 penduduk.

Langkah 3: Menentukan luas lahan yang dibutuhkan setiap komoditas dan ketersediaan lahan yang ada saat ini (hektare) dari hasil DT$max_i$

Memasukkan input nilai kesesuaian lahan (α) untuk mengoptimalkan jumlah penduduk yang dapat didukung oleh Lingkungan Hidup beserta luas lahan yang dibutuhkan untuk setiap komoditas sesuai dengan jumlah penduduk tersebut. Terdapat toleransi terhadap pemenuhan komoditas dimana maksimal 6 komoditas tidak dapat terpenuhi sebanyak 100%. Kondisinya akan berbeda-beda pada setiap pulau/kepulauan. Toleransi komoditas akan menyebabkan sebagian orang tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Langkah 4: menentukan jumlah penduduk yang dapat didukung secara optimal

Secara optimal maksudnya adalah batas toleransi terhadap pemenuhan komoditas dimana paling banyak 6 komoditas tidak dapat terpenuhi sebanyak 100%. Jumlah penduduk ini akan di bawah batas maksimal yang dapat didukung dengan perumusan seperti di bawah ini.

$DTopt_i$ . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

$$DTopt_i = DTmax_i - \frac{Pend_i}{1000000}$$

Keterangan:

- DTopti = Jumlah penduduk yang dapat didukung secara optimal (satuan juta orang)
- DTmaxi = Jumlah penduduk maksimal yang dapat dipenuhi (satuan juta orang)
- Pendi = Jumlah maksimal penduduk yang tidak dapat dipenuhi.

Langkah 5: menentukan luas lahan pada masing-masing reklasifikasi lahan untuk pemenuhan kebutuhan jumlah penduduk yang dapat didukung secara optimal.

Proses dengan bantuan otomasi bahasa pemrograman komputer seperti *python* atau bahasa pemrograman komputer sejenis lainnya, akan mendapatkan hanya berupa angka saja (hektare) tanpa mengetahui lokasi spasialnya dan mengikuti kondisi eksisting pada tahun daya dukung dan daya tampung disusun. Sehingga luasannya akan dapat lebih kecil maupun lebih besar dari eksistingnya yang diartikan tidak semua kebutuhan dasar dapat sepenuhnya didukung oleh pulau/kepulauan tersebut.

Lahan yang bernilai lebih kecil atau defisit dari eksistingnya maka perlu dicarikan lokasi tambahan untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 10 contoh hasil perhitungan optimasi alokasi penutupan lahan di pulau/kepulauan

| Jenis Penutupan Lahan | Eksisting Tahun 2022 (ha) | Optimal (ha) | Selisih (ha) | Makna |
|---|---|---|---|---|
| Hutan dan Belukar untuk Pemenuhan Kayu | 480.000 | 550.000 | 70.000 | Surplus |
| Pertanian Lahan Basah | 320.000 | 280.000 | (40.000) | Defisit |
| Pertanian Lahan Kering | 680.000 | 750.000 | 70.000 | Surplus |
| Perkebunan | 380.000 | 420.000 | 40.000 | Surplus |
| Lahan Terbangun | 220.000 | 180.000 | (40.000) | Defisit |
| Padang Rumput | 140.000 | 160.000 | 20.000 | Surplus |

Tambak . . .

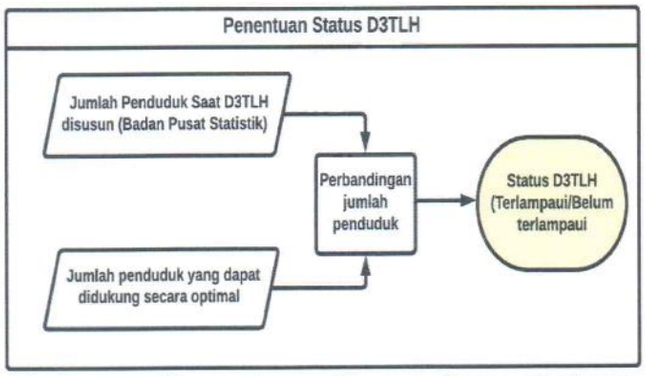


Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Jenis Penutupan Lahan | Eksisting Tahun 2022 (ha) | Optimal (ha) | Selisih (ha) | Makna |
|---|---|---|---|---|
| Tambak | 260.000 | 240.000 | (20.000) | Defisit |
| Hutan Lindung dan Hutan Konservasi | 430.000 | 480.000 | 50.000 | Surplus |
| Badan Air | 90.000 | 110.000 | 20.000 | Surplus |

d. Penentuan Status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Merujuk pada perhitungan kondisi biogeofisik dengan pemodelan Optimasi Alokasi Penutupan Lahan yang menghasilkan ambang batas berupa jumlah penduduk yang dapat didukung oleh Lingkungan Hidup dan luas penutupan lahan yang ideal untuk mendukung penduduk tersebut. Hasil optimasi berupa jumlah penduduk yang dapat didukung oleh Lingkungan Hidup tersebut selanjutnya dijadikan pembanding dengan jumlah penduduk pada saat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup disusun. Secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 11.




Gambar 11 Proses Penentuan Status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang dapat didukung dengan jumlah penduduk pada saat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup disusun. Klasifikasinya terbagi menjadi belum terlampaui dan terlampaui.

Adapun . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Adapun status belum terlampaui diartikan jumlah penduduk saat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup disusun kurang dari jumlah penduduk yang dapat didukung, sedangkan status terlampaui diartikan sebaliknya. Meskipun begitu, status terlampaui bukan berarti harus mengurangi jumlah penduduknya. Tetapi suatu pulau/kepulauan tetap berfungsi dan penduduk di dalamnya dapat dipenuhi kebutuhan dasar hidupnya jika didukung oleh pulau/kepulauan lainnya.

Jumlah penduduk yang dapat didukung tersebut juga dapat menjadi acuan dalam menilai sejauh mana dan sebesar apa Jasa lingkungan yang perlu dipersiapkan maupun dipertahankan fungsinya. Sehingga status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup mampu dijadikan acuan ambang batas pengelolaan pola perilaku maupun konsumsi manusia terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam di suatu pulau/kepulauan.

e. Proses penyusunan peta Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penduduk yang dapat didukung tersebut bisa tergambarkan secara spasial dari proses pemodelan matematika pada tiap pulau/kepulauan. Prosesnya diawali dengan melakukan tumpang susun data spasial meliputi *grid* ukuran 30" x 30" (± 0,9km x 0,9km), batas administrasi, peta penutupan lahan dan jaringan jalan, serta jumlah penduduk yang dapat didukung setiap pulau/kepulauan.

Setelahnya dilihat densitas penduduk pada setiap *grid* berdasarkan bobot penutupan lahan dan jalan. Bobot ini merupakan penentuan yang dilakukan oleh pakar dan/atau disesuaikan referensi ilmiah. Berdasarkan kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang telah dilakukan sebelumnya, semakin besar bobot pada tipe penutupan lahan, maka distribusi jumlah penduduk di wilayah tersebut akan semakin besar.

Adapun . . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Adapun bobotnya meliputi hutan (0,009), pertanian lahan basah (0,048), pertanian lahan kering (0,029), perkebunan (0,002), lahan terbangun (0,328), tambak (0,038). Sedangkan padang rumput, hutan lindung dan konservasi, serta badan air bernilai 0. Dengan kata lain, penggambaran sebaran penduduk yang dapat didukung hanya bisa tergambar melalui pendekatan area yang terdapat guna lahan tersebut, sehingga tidak semua area pada pulau/kepulauan bisa digambarkan untuk penggambaran sebaran jumlah penduduknya.

B.3 Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan metode lainnya yang diakui secara nasional/internasional

Metode lainnya yang diakui secara nasional dan internasional mencakup seluruh bentuk metode yang sudah terjamin standar, konsistensi, validitas ilmiah, dan efektivitasnya dalam penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Metode ini telah melalui proses uji coba yang ketat dan mendapatkan pengakuan dari komunitas ilmiah/pakar serta lembaga regulasi terkait.

C. Tata Cara Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilaksanakan setelah proses penyusunan selesai dilaksanakan. Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilakukan oleh:

1. Menteri, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan;
2. gubernur, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup provinsi dan Ekoregion lintas kabupaten/kota; dan
3. bupati/wali kota, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan Ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Dalam menetapkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan, Menteri berkoordinasi dengan:

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;

2. menteri . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang telah disusun dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status Lingkungan Hidup berupa:
1. terlampaui; atau
2. belum terlampaui.

Status ini didefinisikan pada perbandingan antara ambang batas jumlah penduduk yang dapat didukung oleh Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan jumlah penduduk saat ini. Informasi ini disajikan melalui tampilan grafis atau geospasial untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 254025 A

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL

RPPLH nasional disusun melalui identifikasi potensi dan masalah perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; penyusunan skenario perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan perumusan RPPLH. RPPLH nasional disajikan dalam setiap wilayah Ekoregion pulau/kepulauan meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, serta Kepulauan Maluku.

Berikut adalah penjabaran dari setiap tahapan penyusunan RPPLH nasional:

## I. PULAU SUMATERA

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Sumatera

Informasi dasar karakteristik Ekoregion Pulau Sumatera berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 49,5% dari luas wilayah daratan Pulau Sumatera merupakan kawasan ekosistem alami dengan karakteristik sangat rentan, yang mana memerlukan waktu di atas 100 tahun untuk memulihkan dirinya apabila mengalami kerusakan di vegetasi alami atau membutuhkan umur geologi apabila mengalami kerusakan pada bentang alamnya.
2. Pesisir timur Pulau Sumatera seperti Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara
   a. Didominasi oleh dataran organik bervegetasi hutan gambut.
   b. Ekosistem ini berfungsi memberikan lahan subur dari hasil proses dekomposisi tumbuhan dan mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Ekosistem ini juga berperan penting dalam penyimpanan karbon, yang apabila terjadi alih fungsi lahan akan melepaskan karbon serta membuat kondisi gambut menjadi mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan.

3. Pesisir . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

3. Pesisir Barat Pulau Sumatera seperti Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan wilayah pesisir barat Provinsi Lampung

   a. Didominasi oleh perbukitan dengan vegetasi hutan dipterokarpa pamah (seperti pohon barus, menyan, dan kayu manis) di sepanjang koridor bukit barisan.

   b. Ekosistem ini berperan penting dalam pengaturan air dan mendukung pertumbuhan hutan dipterokarpa yang menjaga iklim mikro, yang juga berpengaruh bagi pertanian masyarakat, serta habitat flora dan fauna endemik di bawahnya.

   c. Pemanfaatan pada ekosistem ini hendaknya berfokus pada pemanfaatan jasa lingkungannya sehingga meminimalisir risiko kehilangan flora dan fauna endemik di Pulau Sumatera.

4. Pulau Sumatera bagian tengah, seperti Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau

   a. Didominasi oleh perbukitan bergelombang dengan vegetasi hutan pamah. Perbukitan yang bergelombang berperan penting dalam pengaturan air dan pembentuk nutrisi tanah, serta mendukung pertumbuhan hutan dipterokarpa yang menjadi sumber penghidupan bagi spesies flora dan fauna endemik di bawahnya.

   b. Pemanfaatan pada ekosistem ini hendaknya berfokus pada pemanfaatan jasa lingkungannya sehingga meminimalisir risiko kehilangan flora dan fauna endemik di Pulau Sumatera.

5. Gugusan Kepulauan Bangka-Belitung dan Kepulauan Riau

   a. Didominasi oleh dataran yang bergelombang dengan vegetasi hutan kerangas.

   b. Dataran yang bergelombang berperan penting dalam pengaturan drainase melalui sungai kecil dan penyimpanan air tawar sebagai sumber penghidupan.

   c. Kandungan sedimen non-karbonat di dalam tanah memiliki kandungan potensi sumber daya mineral namun rendah nutrisi. Hanya jenis vegetasi hutan kerangas yang mampu hidup di wilayah ini.

   d. Kehilangan tutupan vegetasi menyebabkan tanah menjadi tidak subur sehingga akan terjadi penggundulan dalam jangka waktu lama bahkan dapat menyebabkan penggurunan. Hal ini akan menyulitkan proses pemulihan di ekosistem ini.

6. Gugusan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

6. Gugusan Kepulauan Mentawai-Nias

   a. Didominasi oleh perbukitan dan vegetasi hutan dipterokarpa. Perbukitan memiliki peran penting dalam pembentukan nutrisi tanah dan retensi air. Hal tersebut mendukung pertumbuhan vegetasi hutan dipterokarpa yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, serta habitat flora dan fauna.

   b. Ekosistem ini memerlukan waktu lebih dari 100 tahun untuk pulih secara alami jika dimanfaatkan secara ekstraktif.

Dari karakteristik Ekoregion Pulau Sumatera ini, kemudian diidentifikasi dengan kerangka *Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses* (DPSIR) dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Tantangan Lingkungan Hidup | 1. **Konsentrasi kawasan perkotaan di kawasan pesisir timur Pulau Sumatera**, terutama di Metropolitan Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir), Pekansikawan (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kampar, dan Pelalawan), Mebidangro (Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Karo).<br>2. **Konsentrasi pengembangan kawasan perkotaan di pesisir selatan Pulau Sumatera**, terutama Metropolitan Lampung Raya (Kota Bandar Lampung, Metro, Kalianda, Kabupaten Pringsewu, dan Gedungtataan).<br>3. **Pertumbuhan pusat-pusat industri pertambangan mineral dan batu bara, kehutanan, dan perkebunan sawit** di sekitar pantai timur Pulau Sumatera dan gugusan kepulauan untuk memenuhi permintaan rantai global yang tinggi. |
| Isu Lingkungan Hidup | 1. **Tingginya** kebutuhan lahan untuk permukiman, perkebunan, dan pertambangan yang dapat **meningkatkan risiko hilangnya ekosistem alami Pulau Sumatera**.<br>2. **Meningkatnya risiko pencemaran dan kerusakan pada air, lahan subur, dan udara** akibat kegiatan industri pertanian, perkebunan, pertambangan, dan energi yang tidak ramah lingkungan.<br>3. **Rendahnya kualitas hidup penduduk akibat persebaran penduduk yang tidak terencana**, dan terbatasnya layanan sarana prasarana air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. |
| Kondisi Lingkungan Hidup | 1. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pulau Sumatera **masih dapat menampung 196 juta penduduk**. Namun, dalam periode 1996-2022 kinerja jasa lingkungan pengatur air cenderung menurun.<br>2. Indeks kualitas Lingkungan Hidup Pulau Sumatera tergolong baik. Namun, **nilai indeks kualitas air dan lahan di bawah rata-rata nasional**. |

3. **Pulau** . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| | 3. **Pulau Sumatera memiliki potensi dan cadangan Sumber Daya Alam**, seperti total sumber daya batu bara sekitar 55.085 juta ton dan total cadangan batu bara sekitar 12.955 juta ton. Cadangan minyak bumi sekitar 1.043 MMSTB, dan cadangan gas bumi sekitar 5.894,28 MMSTB. Potensi panas bumi sekitar 101 Megawatt. |
| Dampak Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya risiko bencana alam akibat kegiatan ekonomi ekstraktif dan kerusakan lingkungan, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta perubahan iklim.<br>2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat akibat epidemi dan wabah penyakit, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut.<br>3. Meningkatnya kerugian ekonomi akibat bencana alam dan kerusakan lingkungan, seperti meningkatnya biaya kesehatan masyarakat, serta kerusakan infrastruktur. |

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Sumatera

Skenario perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 30 (tiga puluh) tahun ke depan bertemakan **"mendukung ekonomi biru dan berbasis lahan secara lestari"**, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dalam mengelola Sumber Daya Alam dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Langkah ini akan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan Lingkungan Hidup Pulau Sumatera, terutama mengendalikan konsentrasi penduduk, dan kegiatan ekonomi ekstraktif yang belum ramah lingkungan. Hutan dan sungai yang lestari perlu dijaga keberlanjutannya untuk mendukung perekonomian berbasis komoditas alam di Pulau Sumatera. Pengamanan sosial dan lingkungan di wilayah pesisir timur dan barat Pulau Sumatera diperlukan untuk mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang berketahanan dari bencana alam dan non-alam, seperti banjir, kebakaran hutan, epidemi dan wabah penyakit. Pemangku kepentingan membangun ekosistem buatan dan infrastruktur hijau untuk mengganti ekosistem yang telah hilang di kawasan perkotaan dan kantung-kantung produksi lainnya. Kemudian, mengembangkan inovasi teknologi untuk mendorong transisi energi bersih dan pengembangan bio-prospeksi. Membentuk gaya hidup dan pola perilaku masyarakat perkotaan menjadi lebih ramah serta hemat dalam mengonsumsi dan produksi sumber daya.

C. Perumusan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pulau Sumatera

| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi | 1.1. Memperkuat tata kelola perlindungan kawasan dengan fungsi lindung | 1.1.1. Penguatan tata kelola perlindungan kawasan konservasi | v | | | Kawasan lindung, dan konservasi, terutama pada wilayah Ekoregion Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bukit Barisan Luhak Tujuh Talago, Dolok Sibolga–Tarutung, Dolok Hulu Asahan–Barumun, Luat Haminjon-Tao Toba, Dataran Singkil Barus, Bentang Pegunungan Gayo Leuser, Perbukitan Gampong Cut Nyak Dhien, dan Bentang Riau Kepulauan |
| | | 1.1.2. Penguatan kelembagaan perlindungan kawasan konservasi | v | v | | |
| | 1.2. Mengembang-kan teknologi dan inovasi perlindungan wilayah | 1.2.1. Pengembangan riset dan teknologi terkait perlindungan wilayah | v | v | v | |

1.2.2. Pendanaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.2.2. Pendanaan inovatif untuk mendukung perlindungan wilayah | v | v | v | |
| | | 1.2.3. Pengembangan sistem informasi dan pemantauan secara *realtime* | v | v | v | |
| | 1.3. Mengurangi dampak negatif pembangunan dan infrastruktur | 1.3.1. Pembangunan infrastruktur hijau pada sekitar kawasan perlindungan | v | v | v | |

1.3.2. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.3.2. Penerapan *buffer zone* di sekitar kawasan perlindungan | v | v | v | |
| | | 1.3.3. Pelestarian fungsi ekosistem penting (gambut, karst, mangrove, dan lahan basah) | v | v | v | |
| | 1.4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia | 1.4.1. Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan wilayah | v | v | v | |

1.5. Melestarikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 1.5. Melestarikan keanekaragam-an hayati endemik pulau | 1.5.1. Pelestarian tumbuhan dan satwa liar pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi | v | v | v | |
| | | 1.5.2. Penyediaan taman keanekaragaman hayati pada spesies unik dan eksotik pulau | v | v | v | |

2. Pemulihan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup | 2.1. Memulihkan wilayah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan | 2.1.1. Peningkatan kualitas air, lahan, dan udara | v | v | v | wilayah Ekoregion Bentang Bangka Belitung, Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bukit Barisan Luhak Tujuh Talago, Dataran Berombak Ladang Melayu, Nias Tano Niha Pulau Banyak, Luat Haminjon-Tao Toba, Bentang Pegunungan Gayo Leuser, dan Dolok Hulu Asahan–Barumun |
| | 2.2. Meningkatkan manajemen pemulihan wilayah | 2.2.1. Pengembangan sistem informasi pemulihan lingkungan dan pemantauan secara *realtime* | v | v | v | |
| | | 2.2.2. Penguatan kelembagaan pemulihan Lingkungan Hidup | v | v | | |

2.3. Mengembangkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 2.3. Mengembang-kan teknologi dan inovasi pemulihan wilayah | 2.3.1. Pengembangan riset dan teknologi pemulihan lingkungan | v | v | v | |
| 3. Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alamnya dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya | 3.1. Menerapkan praktik pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhati-kan kondisi Daya Dukung Lingkungan | 3.1.1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Kawasan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam ekstraktif, khususnya kegiatan perkebunan dan pertambangan pada wilayah Ekoregion Bentang Bangka Belitung, Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Dataran Berombak Baturaja-Metro Lampung, Dataran Berombak |

Tampung . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| Tampung Lingkungan Hidup | Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.1.2. Praktik pertambangan, perkebunan, dan pertanian dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Ladang Melayu, Lereng Kaki Pesisir Barat Andalas, Dataran Natal–Padang, Dataran Singkil Barus, Lahan Basah Meulaboh, Bentang Lhokseumawe-Tebing Tinggi, Luat Haminjon-Tao Toba, dan Bentang Riau Kepulauan |

3.2. Menerapkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 3.2. Menerapkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan teknologi ramah lingkungan berbasis karakteristik ekosistem | 3.2.1. Pengoptimalisasian teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam | v | v | v | |

3.3. Meningkatkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 3.3. Meningkatkan kapasitas manusia dan pelaku usaha dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan | 3.3.1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan kompetensi *green job* | v | v | | Kawasan Perkotaan Pulau Sumatera, terutama pada wilayah Ekoregion Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bukit Barisan Luhak Tujuh Talago, Dolok Sibolga–Tarutung, Dolok Hulu Asahan–Barumun, Luat Haminjon-Tao Toba, Dataran Singkil Barus, Bentang Pegunungan Gayo Leuser, Perbukitan Gampong Cut Nyak Dhien, Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bentang Riau Kepulauan, Bentang Natuna Kepulauan, Bentang Bangka Belitung, Pulo Pulo Mentawai-Enggano, Pulo Pulo Batu, Nias |

3.4. Menerapkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 3.4. Menerapkan praktik pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan | 3.4.1. Penerapan praktik perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang berkelanjutan | v | v | v | Tano Niha Pulau Banyak, Gampong Pulo Simeulue, dan Dataran Berombak Baturaja-Metro Lampung |

4. Pencadangan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam | 4.1. Mencadangkan Sumber Daya Alam dengan mempertim-bangkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 4.1.1. Pencadangan ekosistem gambut pada kawasan dengan fungsi budi daya | v | v | v | Ekosistem Karst pada wilayah Ekoregion Dataran Berombak Baturaja-Metro Lampung, Bukit Barisan Luhak Tujuh Talago, Bentang Pegunungan Gayo Leuser, Perbukitan Gampong Cut Nyak Dhien, Pulo Pulo Mentawai-Enggano, Pulo Pulo Batu, Nias Tano Niha Pulau Banyak, dan Gampong Pulo Simeulue |
| | | 4.1.2. Pencadangan ekosistem karst | v | v | v | |
| | 4.2. Pencadangan Sumber Daya Alam dengan teknologi ramah lingkungan berbasis karakteristik ekosistem | 4.2.1. Pengoptimalisasian teknologi ramah lingkungan dalam pencadangan Sumber Daya Alam | v | v | | |

4.3. Membangun . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 4.3. Membangun ruang pelestarian alam | 4.3.1. Penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan | v | v | v | |
| 5. Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah | 5.1. Menerapkan insentif untuk memberi nilai tambah | 5.1.1. Pemberian *carbon credit* dan *biodiversity credit* pada kawasan lindung dan konservasi | v | v | v | Kawasan lindung, dan konservasi, terutama pada wilayah Ekoregion Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bukit Barisan Luhak Tujuh Talago, Dolok Sibolga–Tarutung, Dolok Hulu Asahan–Barumun, Luat Haminjon-Tao Toba, Dataran Singkil Barus, Bentang Pegunungan Gayo Leuser, Perbukitan Gampong Cut Nyak Dhien, Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, dan Bentang Riau Kepulauan |
| | 5.2. Mengembang-kan potensi bioprospeksi keanekaragam-an hayati | 5.2.1. Pengembangan riset, inventarisasi dan eksplorasi bioprospeksi | v | | | |
| | | 5.2.2. Penguatan kerja sama sektor swasta dan lembaga penelitian | v | | | |

5.2.3. Penapisan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 5.2.3. Penapisan dan pengujian Sumber Daya Alam bioprospeksi | v | | | |
| | | 5.2.4. Promosi dan pemanfaatan komersial produk bioprospeksi | | v | v | |
| 6. Penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission* | 6.1. Menerapkan dekarbonisasi pada sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | 6.1.1. Pengarusutamaan kegiatan rendah emisi dalam usaha/kegiatan sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | v | v | | Kawasan Perkotaan di Pulau Sumatera, terutama pada wilayah Ekoregion Dataran Berombak Baturaja-Metro Lampung, Bukit Barisan Luhak Tujuh Talago, Dataran Berombak Ladang Melayu, Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bentang Lhokseumawe-Tebing Tinggi, dan Luat Haminjon-Tao Toba |
| | | 6.1.2. Perubahan penggunaan bahan bakar fosil dalam usaha/kegiatan sektor transportasi, industri, dan energi | v | v | v | |

6.2. Meningkatkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 6.2. Meningkatkan kapasitas manusia terkait dekarbonisasi | 6.2.1. Perubahan perilaku peduli dan ramah lingkungan, serta perilaku konsumsi dan produksi berkelanjutan ke masyarakat umum | v | v | v | |
| 7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana | 7.1. Meningkatkan ketahanan iklim Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | 7.1.1. Penguatan rencana pengurangan risiko iklim kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | v | | | Kawasan perkotaan dan pulau-pulau kecil, terutama pada wilayah Ekoregion Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bukit Barisan Luhak Tujuh Talago, Dolok Sibolga–Tarutung, Dolok Hulu Asahan–Barumun, Luat Haminjon-Tao Toba, Dataran Singkil Barus, Bentang |

7.1.2. Pembangunan . . .

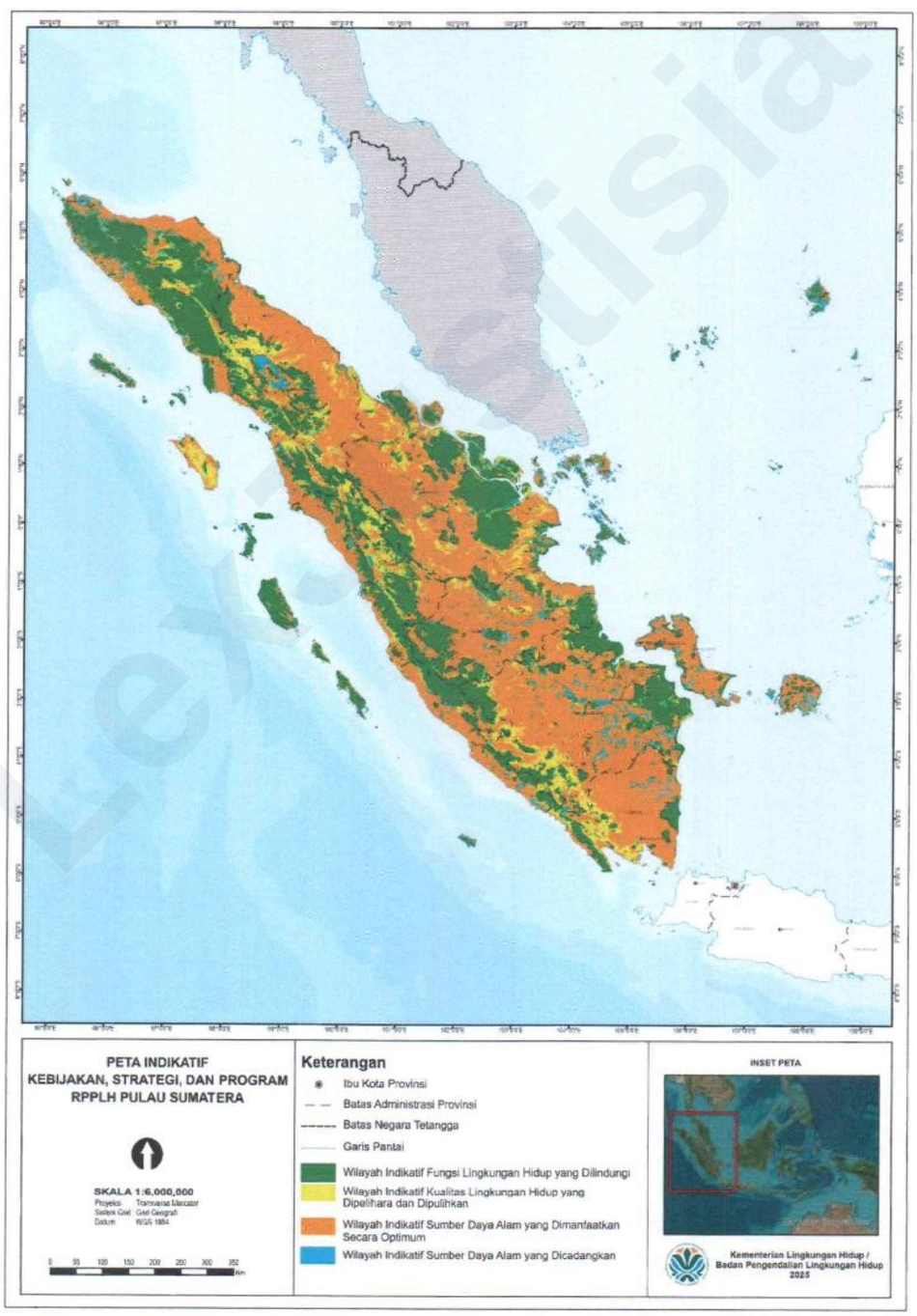
Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 7.1.2. Pembangunan infrastruktur hijau dan *climate proofing* di Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | v | v | | Pegunungan Gayo Leuser, Perbukitan Gampong Cut Nyak Dhien, Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bentang Riau Kepulauan, Bentang Natuna Kepulauan, Bentang Bangka Belitung, Pulo Pulo Mentawai-Enggano, Pulo Pulo Batu, Nias Tano Niha Pulau Banyak, Gampong Pulo Simeulue, dan Dataran Berombak Baturaja-Metro Lampung |
| | 7.2. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | 7.2.1. Penguatan edukasi dan pemberdayaan Masyarakat terkait adaptasi terhadap dampak perubahan iklim berbasis kelokalan | v | v | | |

Penggambaran . . .

Penggambaran indikatif kebijakan, strategi, dan program RPPLH Nasional Pulau Sumatera sebagaimana peta berikut:




Gambar 1. Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional Pulau Sumatera

**II. PULAU . . .**



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

## II. PULAU JAWA

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Jawa

Informasi dasar karakteristik Ekoregion Pulau Jawa berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 21,09% dari luas wilayah daratan Pulau Jawa merupakan kawasan ekosistem alami dengan karakteristik sangat rentan yang memerlukan waktu di atas 100 tahun untuk pulih secara alami. Sebesar 3,21% dari luas wilayah Pulau Jawa berkarakteristik rentan yang memerlukan waktu 35-100 tahun untuk pulih secara alami.
2. Pantai Utara bagian Barat Jawa
   a. Didominasi oleh dataran hasil pengendapan sungai, dengan vegetasi alami hutan tepian sungai dan mangrove.
   b. Banyak sungai di Pulau Jawa yang bermuara di wilayah ini sehingga sebagian besar wilayah memiliki sumber air yang melimpah dengan kondisi tanah yang sangat subur, menyebabkan wilayah ini berpotensi di bidang pertanian.
   c. Keberadaan vegetasi mangrove dan tepian sungai menjadi penting karena dapat menghambat laju sedimen yang masuk ke sungai dan diangkut sampai hulu oleh aliran sungai.
   d. Pemanfaatan secara ekstraktif dan pembangunan lingkungan terbangun pada ekosistem ini akan menyebabkan percepatan kehilangan ekosistem *wetland* yang akan mengganggu pengaturan dan penyediaan air, serta pendukung habitat kehati di wilayah ini.
3. Pantai Utara bagian Timur Jawa
   a. Didominasi oleh perbukitan kapur yang memiliki vegetasi alami hutan batu gamping, khususnya di Pulau Madura dan di Pegunungan Kendeng. Bentang alam perbukitan dengan kandungan kapur memiliki peran penting dalam pengaturan air dan penyediaan air, menyebabkan wilayah ini memiliki kandungan potensi sumber daya mineral.
   b. Keberadaan kondisi vegetasi alamiah wilayah ini memiliki kemampuan mengendalikan hama serta penyerbukan alami, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian di sekitarnya.
   c. Pemanfaatan secara ekstraktif pada ekosistem ini akan menyebabkan terganggunya sumber penghidupan masyarakat akibat berkurangnya ketersediaan air dan pelonjakan hama.

4. Kompleks . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

4. Kompleks Pegunungan Tengah Jawa
   a. Didominasi pegunungan vulkanik yang memiliki vegetasi alamiah hutan pamah non dipterokarpa (rempah dan buah-buahan) serta dataran fluviovulkanik.
   b. Ekosistem ini berfungsi sebagai sumber regenerasi tanah untuk wilayah lembah dibawahnya yang diangkut melalui aliran sungai. Kondisi tanah yang memiliki unsur hara tinggi sehingga wilayahnya subur, menyebabkan wilayah ini berpotensi di bidang pertanian.
   c. Pada area pegunungan, bentuk pemanfaatan yang cocok untuk dilakukan berupa pertanian musiman, seperti buah-buahan. Sedangkan untuk area lembah, bentuk pemanfaatan yang cocok untuk dilakukan berupa pertanian pangan seperti sawah, karena kemampuan lahannya untuk berproduksi secara terus menerus. Pemanfaatan secara ekstraktif pada ekosistem ini apabila terjadi perubahan akan menyebabkan laju sedimentasi yang berlebih.
5. Pantai Selatan Jawa
   a. Didominasi oleh perbukitan yang telah mengalami pelapukan secara alami serta kandungan kapur di beberapa wilayah.
   b. Vegetasi alaminya adalah hutan pamah non dipterokarpa (rempah dan buah-buahan) dan vegetasi batu gamping pamah. Perbukitan tersebut berperan penting dalam pengaturan air dan penyediaan air.
   c. Kandungan yang kaya akan kapur di wilayah ini berpotensi akan sumber daya mineral.
   d. Ekosistem ini berkemampuan penyedia habitat untuk penyerbuk alami yang tinggi untuk kawasan pertanian di sekitarnya serta mengendalikan hama sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian disekitarnya.
   e. Pemanfaatan pada ekosistem ini akan menyebabkan terganggunya sumber penghidupan masyarakat akibat berkurangnya ketersediaan air dan pelonjakan hama di lahan pertanian sekitarnya.

Dari karakteristik Ekoregion Pulau Jawa ini, kemudian diidentifikasi dengan kerangka DPSIR dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Tantangan Lingkungan Hidup | 1. **Pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi pada kawasan aglomerasi perkotaan** di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai Pulau Jawa, terutama di sepanjang Pantai Utara.<br>2. **Pertumbuhan industri skala kecil dan menengah yang tidak terkendali** di sepanjang koridor Pantai Utara Jawa. |
| Isu Lingkungan Hidup | 1. **Terindikasi kehilangan ekosistem alami** yang tidak dapat kembali fungsinya akibat pengkotaan yang masif dan organik serta pemanfaatan air tanah yang berlebihan, terutama di Pantai Utara Jawa. |

2. **Semakin** . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| | 2. **Semakin terbatasnya kebutuhan lahan prima** untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.<br>3. **Kualitas hidup penduduk perkotaan yang rendah** akibat kurangnya akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah serta lingkungan yang sehat. |
| Kondisi Lingkungan Hidup | 1. Terindikasi secara agregasi bahwa **daya dukung dan daya tampung air Pulau Jawa telah terlampaui**. Total ketersediaan air pulau Jawa sebesar 118 milyar $m^3$/tahun dan efektif dimanfaatkan sebesar 117 milyar $m^3$/tahun.<br>2. Pulau Jawa memiliki nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 64,2 atau berpredikat sedang, dengan nilai IKA 47,9, nilai IKU 80,2, nilai IKL 40,4, serta nilai IKAL 83,2. **Kondisi IKA dan IKL yang rendah menunjukkan bahwa kualitas air dan lahan di Pulau Jawa kurang baik** untuk dimanfaatkan.<br>3. Kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam berupa pertanian tersebar di seluruh Pulau Jawa, didukung oleh kondisi tanah yang relatif subur. |
| Dampak Lingkungan Hidup | 1. **Menurunnya kualitas hidup manusia** karena risiko bencana yang semakin tinggi serta pencemaran air, lahan dan udara lingkungan setempat.<br>2. **Meningkatnya kerugian ekonomi** akibat degradasi kualitas dan kerusakan lingkungan hidup. |

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Jawa

Memperhatikan pengaruh tren global tersebut terhadap potensi dan masalah lingkungan Pulau Jawa, skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 30 tahun depan bertemakan "**membenahi lingkungan hidup Pantai Utara Jawa dan efisiensi lahan yang berketahanan**", dengan alur pemulihan ekosistem pesisir utara, riparian sungai pada DAS kritis, dan 160 kawasan konservasi yang terdegradasi maupun rusak.

Skenario ini akan menjadi kunci keberlanjutan lingkungan Pulau Jawa, terutama dalam mengendalikan konsentrasi penduduk, industrialisasi yang belum ramah lingkungan, dan mega-urbanisasi yang cepat dan masif. Perkotaan-perkotaan di Pulau Jawa perlu tumbuh menjadi kawasan rendah kadar emisi yang tangguh; dipulihkan dari kerusakan dan pencemaran serta mampu menjaga kualitas dan kapasitas air, lahan, udara serta kelestarian biodiversitas. Pemenuhan kebutuhan akan permukiman yang layak dipenuhi melalui pendekatan perencanaan ruang yang efektif lahan dan mengedepankan keseimbangan ekosistem. Kawasan-kawasan perkotaan di sepanjang koridor Pantai Utara Jawa

harus . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas ekologis berteknologi baru terbarukan guna menyubstitusi fungsi lingkungan hidup alami yang hilang. Infrastruktur pendukung di sepanjang Pantai Selatan Jawa dan Kompleks Pegunungan Tengah Jawa perlu sesuai dengan standar ketahanan terhadap ancaman bencana dan *megathrust*.

Di sisi lain, paradigma kegiatan perekonomian, khususnya industri di Pulau Jawa akan bergeser menjadi prinsip Ekonomi Sirkuler, di mana kegiatan perekonomian yang dilaksanakan akan seefisien dan seefektif mungkin dalam menghasilkan, mengelola serta menggunakan kembali sampah dan limbahnya. Laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dapat ditekan sehingga konversi lahan dapat dikendalikan, mempertahankan lahan prima dan menguatkan industri pertanian. Pola perilaku dan budaya masyarakat perkotaan yang lebih ramah serta hemat dalam mengonsumsi sumber daya maupun memproduksi barang/jasa kebutuhan hidup menjadi kebiasaan masyarakat. Perubahan sosial ini membangun tempat bermukim masyarakat dengan lingkungan hidup yang berkualitas dan menyejahterakan secara berkelanjutan sudah terbentuk.

C. Perumusan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pulau Jawa

| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi | 1.1. Memperkuat tata kelola pelestarian kawasan | 1.1.1. Penguatan tata kelola perlindungan kawasan konservasi | v | | | Kawasan konservasi (Taman Nasional (TN), Suaka Margasatwa (SM), Cagar Alam (CA)), Kawasan Bentang Alam Karst, Kawasan pesisir terutama di wilayah Ekoregion Bentang Pegunungan Kendeng Jati Kencana, Bentang Pegunungan Selatan Jawa Bagian Barat, Bentang Perbukitan Gamping Madura, Bentang Vulkanik Peradaban Solo dan Brantas, Dataran Selatan Jawa Citanduy-Progo, Perbukitan Antiklinorum Sangga Buana-Ciremai, Perbukitan Gamping Alas Purwo, Perbukitan |
| | | 1.1.2. Pelibatan masyarakat adat dan setempat dalam pelestarian kawasan konservasi | v | v | | |
| | 1.2. Mengurangi dampak negatif pembangunan dan infrastruktur terhadap kawasan perlindungan | 1.2.1. Pembangunan infrastruktur hijau pada dan sekitar kawasan perlindungan | v | v | v | |
| | | 1.2.2. Pembangunan *buffer zone* di sekitar kawasan perlindungan | v | v | v | |

1.2.3. Pelestarian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.2.3. Pelestarian fungsi ekosistem penting (karst, mangrove, dan lahan basah) | v | v | v | Gamping Tasik-Pangandaran, dan Perbukitan Sri Sanghyang Sirah Ujung Kulon |
| | 1.3. Mengembangkan teknologi dan inovasi perlindungan wilayah | 1.3.1. Pengembangan riset dan teknologi terkait perlindungan wilayah | v | v | v | |
| | | 1.3.2. Pendanaan inovatif untuk mendukung perlindungan wilayah | v | v | v | |
| | | 1.3.3. Pengembangan sistem informasi dan pemantauan secara *realtime* | v | v | v | |
| | 1.4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia | 1.4.1. Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan wilayah | v | v | v | |

1.5. Melestarikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 1.5. Melestarikan keanekaragaman hayati endemik pulau | 1.5.1. Pelestarian tumbuhan dan satwa liar pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi | v | v | v | |
| | | 1.5.2. Penyediaan taman keanekaragaman hayati pada spesies unik dan eksotik pulau | v | v | v | |

2. Pemulihan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup | 2.1. Memperkuat manajemen terkait pemulihan wilayah | 2.1.1. Pelibatan masyarakat adat dan setempat dalam restorasi dan rehabilitasi lahan serta DAS kritis | v | v | | Lahan dan DAS Kritis di seluruh wilayah Ekoregion serta kawasan perkotaan metropolitan dan kawasan industri, terutama di wilayah Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng, Dataran Fluviovulkanik Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), Bentang Vulkanik Parahyangan, dan Lahan Basah Muara Solo-Brantas |
| | | 2.1.2. Pelibatan masyarakat setempat dalam rehabilitasi lingkungan perkotaan | v | v | | |
| | | 2.1.3. Pengembangan sistem informasi pemulihan lingkungan dan pemantauan secara *realtime* | v | v | v | |
| | 2.2. Mengaplikasikan teknologi terkini pada pemulihan kawasan | 2.2.1. Pengarustamaan teknologi informasi digital dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan dan | v | v | v | |

mengendalikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | mengendalikan sumber pencemar | | | | |
| | 2.3. Memulihkan wilayah yang terdampak tekanan lingkungan | 2.3.1. Peningkatan kualitas air, lahan, dan udara | v | v | v | |
| 3. Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alamnya dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup | 3.1. Menerapkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya | 3.1.1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan, terutama di wilayah Ekoregion Bentang Gunung Muria Walipat, Bentang Pegunungan Kendeng Jati Kencana, Bentang Perbukitan Gamping Madura, Bentang Vulkanik Parahyangan, Bentang |

dan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Tampung Lingkungan Hidup | 3.1.2. Penerapan praktik pertanian dan perkebunan berkelanjutan | v | v | v | Vulkanik Peradaban Solo dan Brantas, Bentang Vulkanik Slamet-Dieng-Merapi, Dataran Selatan Jawa Citanduy-Progo, Dataran Selatan Lumajang-Jember, Lahan Basah Pantura Jaseng, Mandala Vulkanik Rawa Dano, serta Perbukitan Anti klinorum Sangga Buana-Ciremai |
| | | 3.1.3. Pengendalian pencemaran dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam | v | v | v | |
| | 3.2. Meningkatkan kapasitas manusia akan pemanfaatan kawasan | 3.2.1. Pembangunan kompetensi tenaga kerja serta pelaku usaha skala kecil dan menengah di kawasan strategis ekonomi sesuai dengan kompetensi *green jobs* | v | v | v | |

3.3. Mengaplikasikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 3.3. Mengaplikasikan teknologi terkini dalam pemanfaatan kawasan | 3.3.1. Pengarustamaan teknologi hijau pada proses produksi dan distribusi di kawasan strategis ekonomi | v | v | v | |
| 4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam | 4.1. Mencadangkan Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 4.1.1. Pencadangan kawasan ekosistem penting (karst dan lahan basah) | v | v | v | Lahan prima, hutan dan kawasan pesisir, terutama di wilayah Ekoregion Bentang Gunung Muria Walipat, Bentang Pegunungan Kendeng Jati Kencana, Bentang Vulkanik Parahyangan, Bentang Vulkanik Peradaban Solo dan Brantas, Bentang Vulkanik Slamet-Dieng-Merapi, Dataran Selatan Jawa Citanduy-Progo, Dataran Selatan Jawa Lumajang-Jember, Lahan |
| | | 4.1.2. Pencadangan kawasan strategis keanekaragaman hayati darat | v | v | v | |
| | | 4.1.3. Pencadangan kawasan strategis keanekaragaman hayati laut dan pesisir | v | v | v | |

4.2. Meningkatkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 4.2. Meningkatkan kapasitas manusia dalam pencadangan kawasan | 4.2.1. Penerapan sosialisasi urgensi pelestarian keanekaragaman hayati pada masyarakat | v | v | | Basah Pantura Jaseng, Perbukitan Gamping Alas Purwo, Perbukitan Gamping Tasik-Pangandaran, serta Perbukitan Sri Sanghyang Sirah Ujung Kulon |
| 5. Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah | 5.1. Menerapkan insentif untuk memberi nilai tambah | 5.1.1. Pemberian *carbon credit* dan *biodiversity credit* pada kawasan lindung dan konservasi | v | v | v | Kawasan pertanian dan pariwisata alam, terutama di wilayah Ekoregion Bentang Gunung Muria Walipat, Bentang Pegunungan Kendeng Jati Kencana, Bentang Vulkanik Peradaban Solo dan Brantas, Bentang Vulkanik Slamet-Dieng-Merapi, Dataran Selatan Citanduy-Progo, Dataran Selatan Jawa Lumajang-Jember, serta Lahan Basah Pantura Jaseng |
| | 5.2. Meningkatkan kapasitas manusia dalam pendayagunaan kawasan | 5.2.1. Pembangunan kompetensi tenaga kerja dan pelaku usaha skala kecil dan menengah akan pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam | v | v | v | |

5.3. Mengaplikasikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 5.3. Mengaplikasikan teknologi terkini pada pendayagunaan kawasan | 5.3.1. Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pendayagunaan lahan prima serta kawasan strategis keanekaragaman hayati darat dan laut dan pesisir | v | v | v | |
| 6. Penerapan dekarbonisasi pada sektor industri, energi, transportasi, maupun perkotaan | 6.1. Memperkuat tata kelola praktik dekarbonisasi | 6.1.1. Pembangunan kapasitas para aktor pengelolaan dan pengawasan pembangunan perkotaan | v | v | v | Kawasan perkotaan metropolitan dan kawasan industri, terutama di wilayah Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng, Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek, Lahan Basah Muara Solo-Brantas, serta Bentang Vulkanik Parahyangan |
| | 6.2. Menerapkan insentif/disinsen-tif dekarbonisasi | 6.2.1. Pengarutamaan investasi serta izin usaha berprinsip pembangunan hijau | v | v | v | |

pada . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | pada pembangunan | dan berkelanjutan dalam proyek-proyek pembangunan perkotaan, infrastruktur, dan kawasan industri | | | | |
| | 6.3. Mengurangi emisi karbon dalam pembangunan dan infrastruktur | 6.3.1. Implementasi prinsip perbaikan berbasis ekosistem pada sektor industri, energi, transportasi, serta perkotaan | v | v | v | |
| | 6.4. Meningkatkan kapasitas manusia terkait dekarbonisasi | 6.4.1. Sosialisasi perilaku dan konsumsi ramah lingkungan pada masyarakat | v | v | v | |

6.5. Mengaplikasikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 6.5. Mengaplikasikan teknologi terkini pada praktik dekarbonisasi | 6.5.1. Pengarusutamaan teknologi informasi digital dalam proses pemantauan emiter karbon di perkotaan | v | v | v | |
| | | 6.5.2. Penerapan teknologi industri rendah emisi dan rendah limbah | v | v | v | |
| | | 6.5.3. Penerapan teknologi energi baru terbarukan | v | v | v | |
| 7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana | 7.1. Memperkuat tata kelola terkait ketahanan perubahan iklim dan bencana alam | 7.1.1. Optimasi koordinasi para aktor mitigasi bencana | v | v | v | Kawasan perkotaan metropolitan dan kawasan industri, terutama di wilayah Ekoregion Lahan Basah Pantura Jaseng, Dataran Fluviovulkanik Jabodetabek, Lahan Basah Muara Solo-Brantas, serta Bentang Vulkanik Parahyangan |

7.2. Memperkuat . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 7.2. Memperkuat ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan bencana alam | 7.2.1. Pengarustamaan investasi pada pembangunan infrastruktur tahan bencana dan *climate proofing* | v | v | v | Kawasan pesisir dan rawan bencana, terutama di wilayah Ekoregion Bentang Pegunungan Selatan Jawa Bagian Barat, Bentang Perbukitan Karstik Wonosari-Malang, Dataran Selatan Jawa Citanduy-Progo, Dataran Selatan Jawa Lumajang-Jember, Lahan Basah Pantura Jaseng, serta Perbukitan Gamping Tasik-Pangandaran |
| | 7.3. Mengurangi dampak negatif pembangunan dan infrastruktur pada ketahanan masyarakat dari perubahan iklim dan bencana alam | 7.3.1. Pengendalian izin usaha dan bangunan yang berlokasi di daerah rawan bencana | v | v | | |

7.4. Meningkatkan . . .

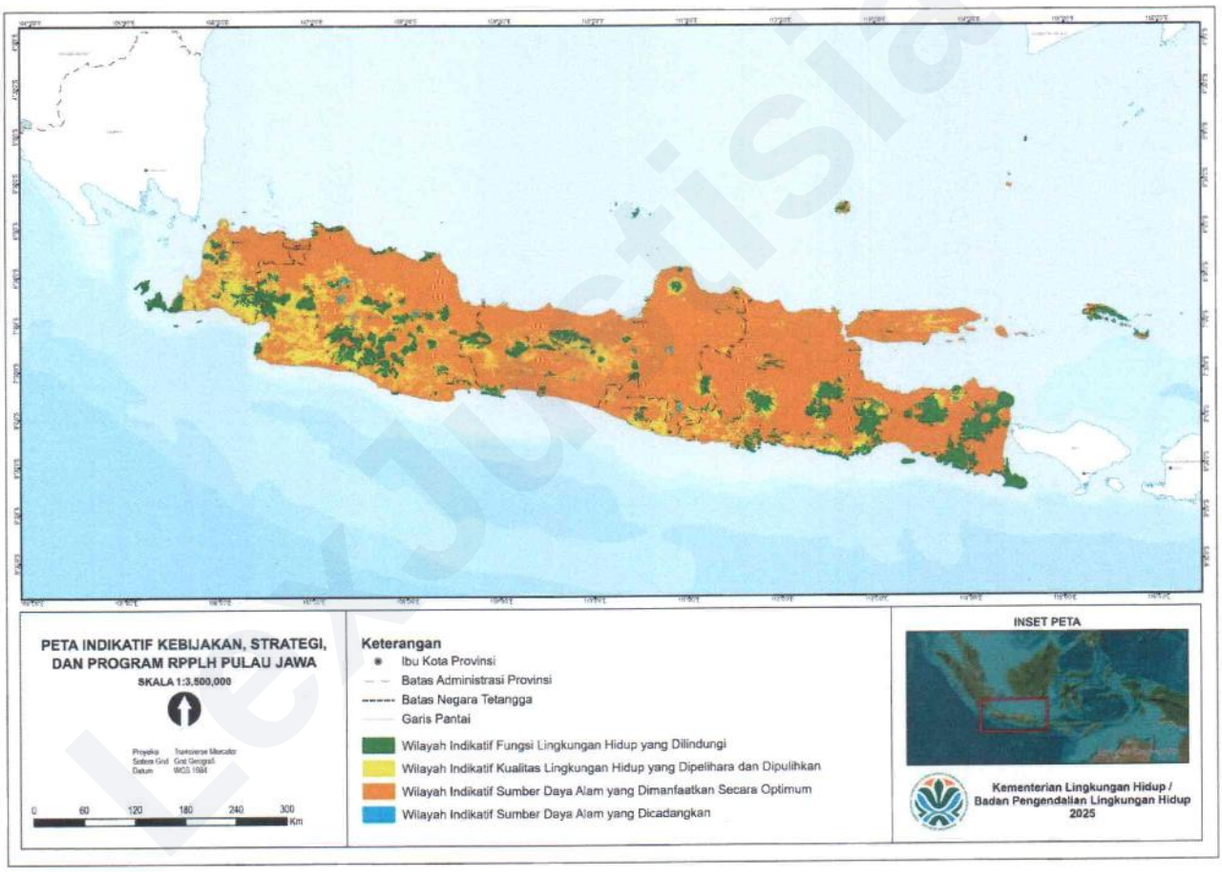
Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 7.4. Meningkatkan kapasitas manusia dari perubahan iklim dan bencana alam | 7.4.1. Sosialisasi dan pelatihan praktik adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam | v | v | v | |
| | 7.5. Mengaplikasikan teknologi terkini pada usaha ketahanan perubahan iklim dan bencana alam | 7.5.1. Pengarusutamaan teknologi terkini dalam implementasi *early warning system* dan pemantauan bencana | v | v | | |

Penggambaran . . .

Penggambaran indikatif kebijakan, strategi, dan program RPPLH Nasional Pulau Jawa sebagaimana peta berikut:




Gambar 2. Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional Pulau Jawa

**III. PULAU . . .**

SK No 254697 A

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

## III. PULAU KALIMANTAN

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Kalimantan

Informasi dasar karakteristik Ekoregion Pulau Kalimantan berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 65,95% dari luas wilayah daratan Pulau Kalimantan merupakan kawasan ekosistem alami dengan karakteristik sangat rentan, yang di dominasi oleh hutan dipterokarpa pamah dan struktural lipatan. Kawasan sangat rentan tersebut memerlukan waktu di atas 100 tahun untuk pulih apabila mengalami kerusakan di vegetasi alami atau membutuhkan umur geologi apabila mengalami kerusakan pada bentang alamnya.
2. Bagian timur Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan).
   a. Didominasi perbukitan struktural lipatan bervegetasi alami hutan dipterokarpa pamah (pohon-pohon besar dan tinggi).
   b. Perbukitan memiliki peran penting dalam pembentukan nutrisi tanah dan retensi air. Hal tersebut mendukung pertumbuhan hutan hujan tropis sebagai habitat flora dan fauna.
   c. Karakteristik wilayah ini memiliki Jasa Lingkungan Hidup pengatur air tinggi, dan Jasa Lingkungan Hidup habitat keanekaragaman hayati tinggi untuk flora endemik seperti contohnya anggrek hitam dan fauna endemik contohnya orang utan, pesut Mahakam, gajah Kalimantan, bekantan, dan badak Kalimantan. Wilayah ini menyediakan banyak jenis pakan dan tempat berkembang biak, serta vegetasi alami yang memberikan Jasa Lingkungan Hidup pengatur pengendali hama, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian di sekitarnya.
   d. Kegiatan ekstraktif pada ekosistem ini akan menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna, sehingga membutuhkan waktu di atas 100 tahun untuk pulih secara alami.
3. Bagian utara, tengah hingga barat Pulau Kalimantan yang berada di dalam *Borneo Basin*
   a. Didominasi perbukitan dan pegunungan berbatuan beku dan metamorfik.
   b. Vegetasi alaminya juga beragam dari hutan pegunungan bawah (hutan lebat pada area perbukitan) dan hutan batuan ultrabasa pamah.
   c. Sebagian besar wilayah ini merupakan hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati sangat tinggi.

d. Wilayah . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

d. Wilayah yang sebagian besar merupakan hulu beberapa sungai besar ini menjadi penting karena memiliki Jasa Lingkungan Hidup pengatur iklim untuk wilayah Kalimantan.

e. Wilayah dengan batuan metamorfik memiliki kandungan potensi bahan mineral, sementara batuan ultrabasa memiliki unsur racun pada tanahnya sehingga membatasi pertumbuhan flora di atasnya. Hal ini menyulitkan proses pemulihan ekosistem ini apabila terganggu.

4. Bagian barat Pulau Kalimantan

a. Didominasi dataran fluvial bervegetasi terna rawa air tawar. Dataran ini memiliki fungsi lingkungan sebagai penyedia air bersih di permukaan yang bersumber dari air tanah dan sungai, lahan yang subur untuk dimanfaatkan pertanian dan perkebunan.

b. Vegetasi di kawasan ini juga mendukung keseimbangan ekosistem karena menjadi habitat satwa endemik seperti bekantan.

5. Bagian selatan Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan)

a. Didominasi dataran lahan basah bentukan dari endapan sungai dan lahan gambut.

b. Sebagian besar pada wilayah ini merupakan hilir sungai besar di Kalimantan, sehingga pembentukan tanah bergantung endapan hasil pengangkutan aliran air sungai dengan vegetasi hutan gambut dan kerangas.

c. Dominasi lahan pada wilayah ini adalah gambut yang memberikan lahan subur dari hasil proses dekomposisi tumbuhan dan mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Ekosistem ini juga berperan penting dalam penyimpanan karbon, yang apabila terjadi alih fungsi lahan akan melepaskan karbon serta membuat kondisi gambut yang mengering membuat lahan mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan.

d. Wilayah gambut didominasi oleh hutan kerangas yang memiliki karakteristik sangat rentan. Hanya jenis vegetasi tertentu yang mampu hidup di wilayah ini. Kehilangan tutupan vegetasi menyebabkan tanah menjadi tidak subur sehingga akan terjadi penggundulan dalam jangka waktu lama bahkan dapat menyebabkan penggurunan. Hutan kerangas berasosiasi dengan pembentukan gambut di bawahnya, apabila ekosistem ini terganggu maka proses pembentukan gambut akan terganggu, sehingga gambut tidak terbentuk secara sempurna.

Dari . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Dari karakteristik Ekoregion Pulau Kalimantan ini, kemudian diidentifikasi dengan kerangka DPSIR dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Tantangan Lingkungan Hidup | 1. **Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara** ke Penajam Paser Utara dan Samboja.<br>2. **Konsentrasi penduduk, urbanisasi dan migrasi di 2 metropolitan** (Banjarbakula dan Sambo Tenggarong, termasuk IKN), dan Pantai Timur Kalimantan.<br>3. **Ekonomi ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan industri turunan** dari perkebunan dan pertambangan, pada kawasan trans Kalimantan (Kawasan Industri Hijau Tanah Kuning–Bontang–Balikpapan–Batulicin–Jorong–Banjarmasin–Sampit–Pontianak. |
| Isu Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya **risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan** karena luasnya ekosistem sangat rentan terutama pada kawasan trans Kalimantan.<br>2. Meningkatnya **risiko penggurunan lahan** akibat pemanfaatan pada ekosistem sangat rentan.<br>3. **Belum siap dan meratanya infrastruktur perkotaan** yang memadai dan layak, karena pertumbuhan perkotaan yang terlalu cepat. |
| Kondisi Lingkungan Hidup | 1. Dalam 26 tahun sekitar 9 juta hektar (16,81%) mengalami penurunan Jasa Lingkungan Hidup pengatur air, walaupun Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Pulau Kalimantan masih berada **pada status belum terlampaui, dan dapat mendukung secara optimal ±129 juta jiwa penduduk**.<br>2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pulau Kalimantan berkategori baik dengan rentang 73,5 – 80,7, tetapi untuk **indeks kualitas air 3 dari 5 provinsi di Kalimantan di bawah indeks kualitas air nasional**.<br>3. Keberadaan Sumber Daya Alam berupa mineral dan batubara, perkebunan, pertanian, dan perikanan menjadi modal dasar Pulau Kalimantan mendorong kegiatan ekonomi ekstraktif. |
| Dampak Lingkungan Hidup | 1. **Tidak** adanya rehabilitasi lahan, membuat **lahan yang telah rusak mengalami penggurunan** sehingga tidak dapat digunakan kembali.<br>2. **Meningkatnya risiko banjir pada daerah hilir DAS Barito, DAS Kapuas, dan DAS Mahakam**, serta kebakaran hutan dan lahan pada seluruh dataran rendah Pulau Kalimantan terutama daerah lahan gambut.<br>3. **Meningkatnya kerugian ekonomi akibat bencana banjir, kebakaran hutan** dan lahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. |

B. Skenario . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Kalimantan

Berdasarkan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup serta kecenderungan global, maka skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 30 tahun ke depan akan bertemakan **"mengelola daerah aliran sungai dan mendukung ekonomi berbasis lahan berkelanjutan"**.

Pemindahan ibu kota negara perlu diberikan ruang untuk tumbuh dalam koridor konektivitas hijau, dengan mengedepankan penerapan teknologi hijau, yang akan membantu memperbaiki infrastruktur perkotaan dan tata kelola kebijakan pembangunan, tata ruang dan lingkungan hidup. Pengembangan kegiatan ekonomi ekstraktif pada koridor trans Kalimantan akan menerapkan pendekatan berbasis ekosistem untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan.

*Heart of borneo*, Geopark Meratus, Delta Mahakam, Kepulauan Derawan, dan aset biodiversitas lainnya menjadi pilar pengelolaan lingkungan hidup. Membangun infrastruktur hijau, transisi energi ramah lingkungan dan ekosistem buatan menjadi kunci berkembangnya kegiatan ekonomi hijau, termasuk meningkatkan pendapatan dari ekonomi restorasi dan konservasi serta ekonomi berbasis karbon.

Selain aspek lingkungan, skenario membangun masyarakat berbudaya cinta lingkungan yang melestarikan adat setempat, seperti Hutan Pahewan yang mana Suku Dayak membuat kawasan hutan terjaga. Masyarakat perkotaan dan masyarakat adat Pulau Kalimantan dapat berkolaborasi untuk semakin produktif untuk menjaga lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya untuk peningkatan ketahanan pangan, kualitas air, udara, lestarinya flora dan fauna, meningkatnya ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

C. Perumusan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pulau Kalimantan

| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi | 1.1. Memperkuat tata kelola perlindungan kawasan dengan fungsi lindung | 1.1.1. Penguatan tata kelola perlindungan kawasan konservasi | v | | | Kawasan konservasi (TN, Taman Hutan Raya (Tahura), CA, dan SM), Seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Pulau Kalimantan terutama di wilayah Ekoregion Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau–Gunung Palung, dan Puak Lahan Basah Tarakan Sebatik, dan Seluruh Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Pulau Kalimantan terutama di wilayah Ekoregion Puak Tanjung Karst Sangkaliat dan Puak Meratus Banjar Paser |
| | | 1.1.2. Penguatan kelembagaan perlindungan kawasan konservasi | v | v | | |

1.1.3. Penguatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.1.3. Penguatan kerja sama lintas Ekoregion (*transborder*) yang berbatasan dengan negara lain | v | v | v | *Heart of Borneo* wilayah Ekoregion Puak Rimba Betung Kerihun Kayan Mentarang |
| | 1.2. Mengembangkan infrastruktur atau teknologi hijau | 1.2.1. Penerapan teknologi modifikasi cuaca pada kawasan hutan di Pulau Kalimantan | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Kapuas Singkawang, Puak Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau-Gunung Palung, Puak Kutai Mahakam Hilir, Puak Lamandau-Gunung Mas, dan Puak Rimba Campuran Berau Sebuku |
| | | 1.2.2. Penerapan pemantauan *realtime* pada kawasan yang memiliki kerentanan tinggi | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Meratus Banjar Paser, Puak Kutai Mahakam Hilir, dan Puak Kapuas Singkawang |

1.3. Mengurangi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 1.3. Mengurangi dampak negatif pembangunan infrastruktur | 1.3.1. Pembangunan infrastruktur hijau pada sekitar kawasan perlindungan | v | v | v | Kawasan lindung terutama wilayah Ekoregion Puak Rimba Betung Kerihun Kayan Mentarang |
| | | 1.3.2. Penerapan *buffer zone* pada wilayah yang memiliki Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait keanekaragaman hayati, karbon, dan air | v | v | v | |
| | | 1.3.3. Pelestarian fungsi ekosistem penting (gambut, karst, mangrove, dan lahan basah) | v | v | v | Kawasan konservasi (TN, Tahura, CA, dan SM), Seluruh KHG Pulau Kalimantan terutama di wilayah Ekoregion Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau-Gunung Palung, dan Puak Lahan Basah Tarakan Sebatik, dan Seluruh KBAK Pulau Kalimantan |

terutama . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | | | | | terutama di wilayah Ekoregion Puak Tanjung Karst Sangkaliat, dan Puak Meratus Banjar Paser |
| | 1.4. Menerapkan insentif dan disinsentif | 1.4.1. Penerapan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan konservasi energi | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Meratus Banjar Paser, Puak Kutai Mahakam Hilir, dan Puak Kapuas Singkawang |
| | | 1.4.2. Penerapan insentif atau penghargaan pada masyarakat lokal/hukum adat yang terlibat dalam pelestarian kawasan hutan | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Meratus Banjar Paser, Puak Kutai Mahakam Hilir, dan Puak Kapuas Singkawang |
| | 1.5. Melestarikan keanekaragaman hayati endemik pulau | 1.5.1. Pelestarian tumbuhan dan satwa liar pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan | v | v | v | Kawasan konservasi (TN, Tahura, CA, dan SM), Seluruh KHG Pulau Kalimantan terutama di wilayah Ekoregion Lahan Basah |

konservasi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi | | | | Khatulistiwa Sebangau – Gunung Palung, dan Puak Lahan Basah Tarakan Sebatik, dan Seluruh KBAK Pulau Kalimantan terutama di wilayah Ekoregion Puak Tanjung Karst Sangkaliat dan Puak Meratus Banjar Paser |
| | | 1.5.2. Penyediaan taman keanekaragaman hayati pada spesies unik dan eksotik pulau | v | v | v | |
| 2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup | 2.1. Memulihkan dan memelihara wilayah yang terdampak penurunan kualitas lingkungan | 2.1.1. Penerapan rehabilitasi/ restorasi lahan kritis | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Meratus Banjar Paser, Puak Kutai Mahakam Hilir, Puak Kapuas Singkawang, dan Puak Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau – Gunung Palung |
| | | 2.1.2. Penerapan rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Kapuas Singkawang dan Puak Lamandau – Gunung Mas |

2.1.3. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 2.1.3. Penerapan reklamasi lahan pascatambang | | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Meratus Banjar Paser, Puak Kutai Mahakam Hilir, dan Puak Kapuas Singkawang |
| | | 2.1.4. Penerapan rehabilitasi/ restorasi riparian atau ekosistem tepian sungai yang mengalami kerusakan dan fragmentasi | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Meratus Banjar Paser, Puak Kutai Mahakam Hilir, Puak Kapuas Singkawang, dan Puak Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau – Gunung Palung |
| | | 2.1.5. Pengembangan ekosistem buatan/artifisial, pada kawasan yang mengalami kerusakan dan penurunan fungsi lingkungan | | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Meratus Banjar Paser, Puak Kutai Mahakam Hilir, Puak Kapuas Singkawang, dan Puak Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau – Gunung Palung |
| | 2.2. Memperbarui manajemen | 2.2.1. Penguatan kelembagaan | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Meratus Banjar Paser, Puak Kutai |

pemulihan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | pemulihan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup | pemulihan Lingkungan Hidup | | | | Mahakam Hilir, dan Puak Kapuas Singkawang |
| | | 2.2.2. Pemantapan sistem informasi dan basis data untuk pemulihan lingkungan | v | v | v | |
| | 2.3. Meningkatkan kapasitas masyarakat | 2.3.1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dan pelaku usaha terkait Jasa Lingkungan Hidup tinggi | v | v | v | Kawasan sekitar konservasi di seluruh wilayah Ekoregion |
| 3. Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alamnya dengan memperhatikan kondisi Daya | 3.1. Memperkuat tata kelola pada pemanfaatan Sumber Daya Alam | 3.1.1. Penguatan koordinasi dan konsultasi perizinan usaha pertanian, pertambangan, perkebunan, | v | v | | Wilayah Ekoregion Puak Kapuas Singkawang, Puak Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau-Gunung Palung, Puak Kutai Mahakam Hilir, dan Puak Meratus Banjar Paser |

Dukung . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | | perikanan, serta industri | | | | |
| | | 3.1.2. Penerapan instrumen pengendalian lingkungan hidup (KLHS, Amdal, dan UKL-UPL) | v | v | | Pulau Kalimantan |
| | 3.2. Menerapkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.2.1. Penerapan praktik pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Rimba Campuran Berau Sebuku, Puak Tanjung Karst Sangkulirang-Mangkaliat, dan Puak Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau - Gunung Palung |

3.2.2. Penyusunan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 3.2.2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | |
| | 3.3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pangan | 3.3.1. Pemanfaatan hasil hutan non-kayu sebagai sumber pangan | v | v | v | |
| | | 3.3.2. Pemanfaatan hasil laut secara berkelanjutan untuk sumber pangan | v | v | v | Kawasan pesisir dan laut |
| 4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam | 4.1. Mencadangkan ekosistem gambut dan karst sesuai dengan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya | 4.1.1. Pencadangan ekosistem gambut pada fungsi lindung | v | v | v | Wilayah Ekoregion Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau – Gunung Palung, Puak Lahan Basah Tarakan Sebatik, Puak Tanjung Karst Sangkaliat, dan Puak Meratus Banjar Paser |
| | | 4.1.2. Pencadangan ekosistem karst | v | v | v | |

Tampung . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | Tampung Lingkungan Hidup | | | | | |
| 5. Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah | 5.1. Mengembangkan potensi ekonomi dari bioprospeksi keanekaragaman hayati | 5.1.1. Pengoptimalan potensi industri hijau biokimia pangan, nutrisi, dan herbal | | v | v | Hutan Pulau Kalimantan khususnya di wilayah Ekoregion Puak Rimba Campuran Berau Sebuku, Puak Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau-Gunung Palung, dan Puak Kapuas Singkawang |
| | | 5.1.2. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia pada destinasi wisata potensial berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) | v | v | v | Wilayah Ekoregion Puak Lahan Basah Khatulistiwa Sebangau-Gunung Palung. Puak Tanjung Karst Sangkulirang-Mangkaliat, dan Puak Meratus Banjar Paser, Pulau Derawan, dan Pulau Karimata |

6. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 6. Penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission* | 6.1. Menurunkan emisi karbon pada kegiatan usaha | 6.1.1. Penyediaan listrik yang ramah lingkungan pada wilayah perkotaan dan industri | v | v | v | Pusat-pusat kota pada seluruh wilayah Ekoregion Pulau Kalimantan |
| | | 6.1.2. Pengembangan ekonomi sirkular dan teknologinya dalam pengelolaan sampah, limbah padat, cair, dan B3 | v | v | v | |
| | 6.2. Mengembangkan kota hijau | 6.2.1. Penyusunan masterplan kota hijau di wilayah metropolitan pulau Kalimantan | | v | v | |
| 7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak | 7.1. Meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat | 7.1.1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi adaptasi perubahan iklim | v | v | v | |

perubahan . . .

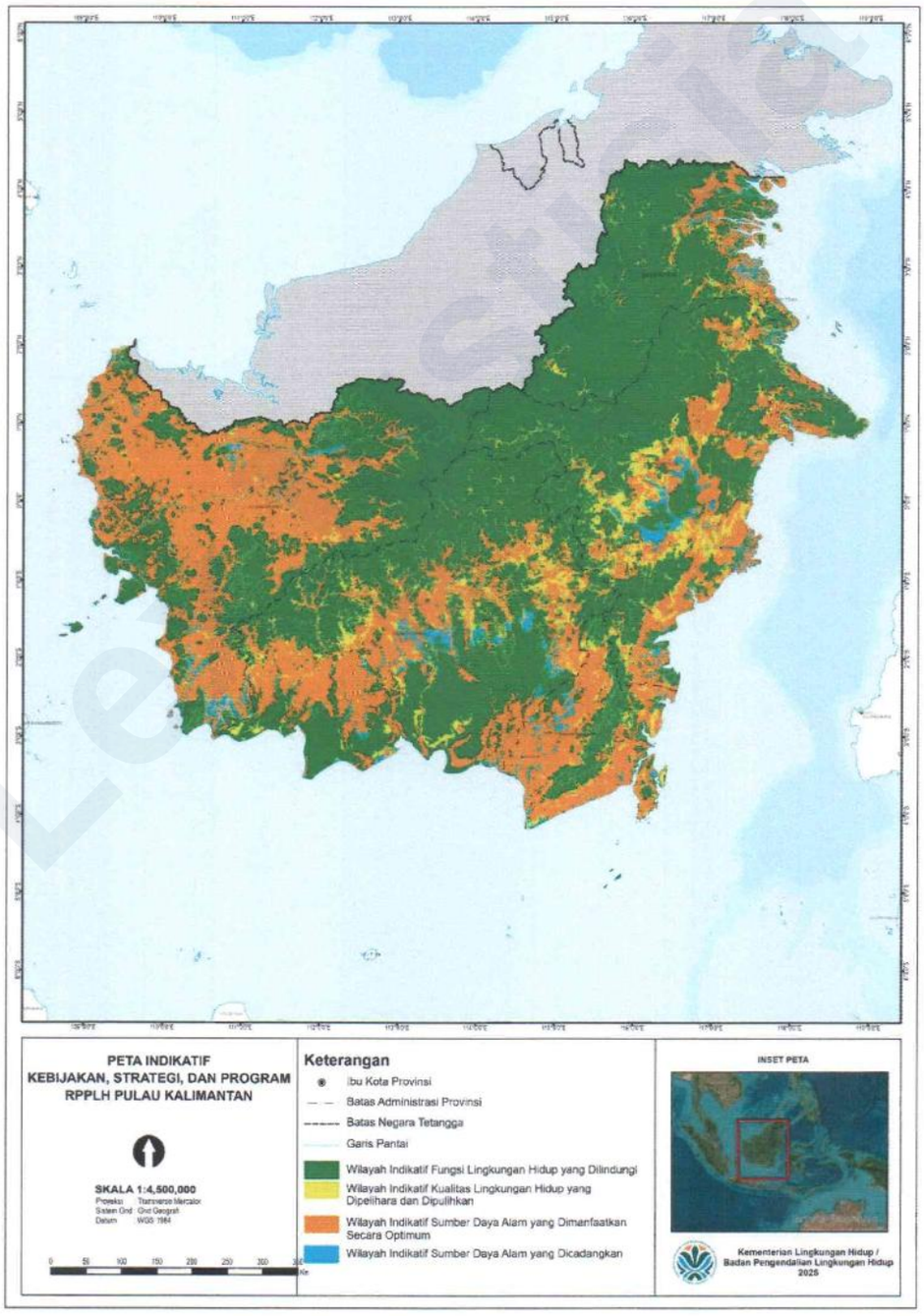
Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana | | 7.1.2. Pengembangan desa tahan bencana melalui desa berbudaya lingkungan (*ecovillage*) | v | v | | Sarana prasarana pendidikan dan pemerintahan di seluruh wilayah Ekoregion |
| | 7.2. Mengembangkan infrastruktur hijau berbasis ekosistem | 7.2.1. Pengembangan infrastruktur hijau dan tahan iklim (*climate proofing*) di kawasan pesisir dan rawan bencana | | v | v | |

Penggambaran . . .

Penggambaran indikatif kebijakan, strategi, dan program RPPLH Nasional Pulau Kalimantan sebagaimana peta berikut:




Gambar 3. Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional Pulau Kalimantan

**IV. PULAU . . .**



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

## IV. PULAU SULAWESI

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Sulawesi

Informasi dasar karakteristik Ekoregion Pulau Sulawesi berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 90% wilayah Pulau Sulawesi didominasi oleh karakteristik ekosistem yang rentan dan sangat rentan. Wilayah yang rentan, memerlukan waktu 35-100 tahun untuk memulihkan dirinya apabila mengalami kerusakan di vegetasi alami atau membutuhkan umur geologi apabila mengalami kerusakan pada bentang alamnya. Sedangkan wilayah yang sangat rentan, memerlukan waktu di atas 100 tahun untuk memulihkan dirinya dari kerusakan tersebut.
2. Bagian punggung utara Pulau Sulawesi dari Minahasa, hingga Donggala didominasi perbukitan struktural dengan vegetasi hutan pegunungan bawah yang kaya akan keanekaragaman hayati. berperan penting dalam penyediaan air dan penyerapan karbon.
3. Bagian punggung Selatan dari perbukitan Gandang Dewata hingga ke Bantaeng didominasi pegunungan denudasional dengan vegetasi hutan dataran rendah monsun meranggas yang tahan terhadap periode kering yang panjang. Karakteristik punggung ini memiliki keanekaragaman hayati unik yang mampu beradaptasi dan tangguh terhadap perubahan musim dan iklim.
4. Kaki perbukitan di bagian tenggara, seperti kawasan Konaweha hingga Aopa Watumohai didominasi oleh batuan metamorfik yang memiliki potensi kandungan mineral. Kondisi perbukitan dan mayoritas vegetasi masih alami, yang memberikan jasa lingkungan pengatur air yang tinggi.

   Terdapat dua kepulauan yaitu Kepulauan Muna dan Wakatobi. Kepulauan Muna didominasi oleh perbukitan karst yang menjadi habitat berbagai spesies dan berfungsi sebagai penyimpan air yang baik. Sedangkan Kepulauan Wakatobi didominasi oleh dataran marin dengan batuan sedimen karbonat yang menciptakan terumbu karang yang sangat produktif dan penting untuk keberlanjutan ekosistem laut dan mendukung kehidupan biota laut.
5. Bagian lengan timur Pulau Sulawesi seperti di daratan Banggai, Morowali, hingga Konawe Utara,
   a. didominasi oleh perbukitan denudasional dengan material batuan metamorfik yang kaya potensi bahan mineral. Namun, karakteristik ini akan sulit pulih ketika ekosistem alaminya terganggu.

b. Keunikan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. Keunikan lainnya pada Kepulauan Banggai dan Togean bentang alamnya berupa perbukitan karst dengan vegetasi hutan batuan gamping dataran rendah yang memiliki Jasa Lingkungan Hidup pengatur air, sehingga cadangan air yang tersimpan di bawahnya cukup baik.

Dari karakteristik Ekoregion Pulau Sulawesi ini, kemudian diidentifikasi dengan kerangka DPSIR dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Tantangan Lingkungan Hidup | 1. Penduduk **terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan selatan**, terutama di Metropolitan Bimindo (Bitung, Minahasa, dan Manado) dan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar, dan Pangkep) dan di Koridor Pantai barat (Palu, Donggala) karena konektivitas antar kota, pusat-pusat industri, dan dukungan logistik kepada IKN.<br>2. **Tingginya permintaan global terhadap industri baterai dan pendukung kendaraan listrik**, serta teknologi disruptif lainnya. |
| Isu Lingkungan Hidup | 1. Tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman dan kegiatan ekstraktif lainnya di satu wilayah yang dapat meningkatkan risiko **hilangnya ekosistem alami pulau**.<br>2. **Rendahnya kualitas hidup penduduk** akibat kepadatan dan terbatasnya akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.<br>3. Meningkatnya **risiko pencemaran dan kerusakan** bagi ekosistem darat serta perairan laut. |
| Kondisi Lingkungan Hidup | 1. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Pulau Sulawesi masih berada pada status belum terlampaui, dan masih dapat mendukung sebanyak ±59,67 juta jiwa penduduk. **Namun, dalam periode 1996 sampai dengan 2022 mengalami penurunan kinerja Jasa Lingkungan Hidup pengatur air seluas 30%** dari total luas Pulau Sulawesi.<br>2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pulau Sulawesi tahun 2022 berkategori baik (75,23), dan di atas rata-rata Nasional. Namun khususnya, **nilai Indeks Kualitas Air seluruh provinsi di Pulau Sulawesi masih di bawah 56**. |

Dampak . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Dampak Lingkungan Hidup | 1. **Meningkatnya risiko penyakit** yang ditularkan melalui air (*water-borne diseases*).<br>2. **Meningkatnya kerugian ekonomi** akibat bencana banjir, longsor, gempa bumi, pencemaran dan kerusakan lingkungan. |

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Sulawesi

Berdasarkan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup serta kecenderungan global, maka skenario perlindungan dan pengelolaan hidup di Pulau Sulawesi 30 tahun ke depan bertemakan "**merestorasi lahan dan hutan Sulawesi dan mendorong transisi ekonomi hijau dan biru**".

Penguatan kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup yang menyeluruh sangat penting untuk dilakukan, baik kapasitas pemangku kepentingan terkait hingga masyarakat di dalamnya dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam yang saat ini sedang berlangsung dan ke depannya. Peningkatan komitmen pemimpin daerah untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting dalam melindungi dan memanfaatkan Sumber Daya Alam.

Pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan menjadi hal yang penting, seperti pemulihan lahan pascatambang dan DAS kritis. Inovasi teknologi dengan bioteknologi atau bioremediasi menjadi satu solusi untuk mempercepat pemulihan lingkungan. Pengamanan sosial dan peningkatan ketahanan masyarakat, terutama di kawasan perkotaan, pulau-pulau kecil, dan masyarakat di sekitar kawasan tambang melalui penyediaan infrastruktur hijau pendukung kehidupan masyarakat dan ketahanan terhadap bencana.

Penerapan energi baru terbarukan dari potensi energi angin, panas bumi, dan mikrohidro dapat terus dikembangkan khususnya meningkatkan standar layanan perkotaan. Bersamaan dengan itu, optimasi kegiatan yang melestarikan keanekaragaman hayati endemik pulau serta geopark yang unik dan eksotik juga perlu didorong. Maka perlindungan pada kawasan dengan nilai konservasi tinggi menjadi penting. Pendekatan bioprospeksi dapat diterapkan untuk mendayagunakan keanekaragaman hayati. Terakhir adalah mengubah paradigma dan perilaku masyarakat yang lebih ramah lingkungan dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam.

C. Perumusan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pulau Sulawesi

| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi | 1.1. Memperkuat tata kelola perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi | 1.1.1. Pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan kawasan | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi terutama wilayah Ekoregion Bentang Perbukitan Lore Lindu, Bentang Konaweha, dan Pegunungan Kotounapowali |
| | | 1.1.2. Penerapan kerja sama lintas kementerian terkait pada tingkat wilayah Ekoregion yang sama | v | v | v | |
| | | 1.1.3. Peningkatan penegakan hukum di kawasan konservasi | v | v | v | |
| | | 1.1.4. Peningkatan inovasi dan teknologi monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi | v | v | | |

1.2. Mengurangi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 1.2. Mengurangi dampak negatif pembangunan dan infrastruktur | 1.2.1. Pengarusutamaan infrastruktur hijau pada sekitar kawasan konservasi | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi |
| | | 1.2.2. Penerapan *buffer zone* di kawasan konservasi yang tertekan | v | v | v | |
| | 1.3. Melestarikan keanekaragaman hayati endemik pulau | 1.3.1. Pelestarian tumbuhan dan satwa liar pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi |

1.3.2. Penyediaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.3.2. Penyediaan taman keanekaragaman hayati pada spesies unik dan eksotik pulau | v | v | v | |
| | | 1.3.3. Pemberdayaan masyarakat adat pada ruang hidup keanekaragaman hayati di darat dan lautan | v | v | v | |
| | 1.4. Mengembangkan teknologi dan inovasi perlindungan wilayah | 1.4.1. Pengembangan riset dan teknologi terkait perlindungan wilayah | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi |
| | | 1.4.2. Pendanaan inovatif untuk mendukung perlindungan wilayah | v | v | v | |

2. Pemulihan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup | 2.1. Meningkatkan pemulihan lahan yang mengalami kekritisan | 2.1.1. Pemulihan DAS Kritis Prioritas | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi, terutama pada status DAS prioritas dan kritis |
| | | 2.1.2. Pemulihan Lahan Kritis | v | v | v | |
| | 2.2. Membangun dan memperkuat sistem pemantauan kualitas Lingkungan Hidup | 2.2.1. Penerapan teknologi terkini pada sistem pemantauan kualitas air permukaan | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi |
| | 2.3. Menerapkan teknologi terkini untuk pemulihan kerusakan lingkungan | 2.3.1. Penerapan solusi berbasis karakteristik ekosistem | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi |
| | | 2.3.2. Penerapan teknologi pemulihan lahan pascatambang | v | v | v | Pesisir timur wilayah Ekoregion Pegunungan Kotounapowali di sekitar Teluk Morowali, dan wilayah Ekoregion Bentang Konaweha |

2.3.3. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 2.3.3. Penerapan teknologi pemulihan lahan basah | v | v | v | Wilayah Ekoregion Dataran Aopa - Watumohai |
| | 2.4. Meningkatkan investasi hijau pemeliharaan dan pemulihan Lingkungan Hidup | 2.4.1. Penerapan pembiayaan inovatif dengan investasi hijau berbasis *environmental, social, and governance* (ESG) | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi |
| 3. Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alamnya dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya | 3.1. Mengarusutamakan perencanaan ruang dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.1.1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah yang ramah lingkungan dan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi, terutama Kawasan perkotaan di wilayah Ekoregion Banua Vulkanik Sangihe-Minahasa, Kayu Hitam Donggala-Tomini, Gugus Terumbu Pabbiring, dan Bentang Konaweha |

Tampung . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| Tampung Lingkungan Hidup | | 3.1.2. Pengembangan infrastruktur berbasis karakteristik ekosistem yang adaptif dan *climate proofing* | v | v | v | |
| | 3.2. Meningkatkan inovasi teknologi pada kegiatan ekonomi ekstraktif | 3.2.1. Pengembangan sistem pertanian cerdas iklim | v | v | | Wilayah Ekoregion Lahan Prima Gandang Dewata, Alang Padi Khatulistiwa Celebes, Bentang Vulkanik Bantaeng, dan Banua Vulkanik Sangihe Minahasa |
| | | 3.2.2. Penerapan inovasi teknologi untuk kesuburan dan regenerasi lahan | v | v | v | |
| | | 3.2.3. Penerapan praktek perkebunan berkelanjutan dan ramah lingkungan | v | v | v | Wilayah Ekoregion Kayu Hitam Teluk Donggala Tomini, Lahan Prima Gandang Dewata, dan Pegunungan Kotounapowali |

3.2.4. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 3.2.4. Penerapan praktek *Good Mining Practice* | v | v | v | Wilayah Ekoregion Pegunungan Kotounapowali dan Bentang Konaweha |
| | | 3.2.5. Peningkatan pengelolaan limbah B3 | v | v | v | |
| | 3.3. Meningkatkan ketahanan air | 3.3.1. Penyediaan infrastruktur tampungan air | v | v | | Wilayah Ekoregion yang mengalami kelangkaan air |
| | | 3.3.2. Peningkatan akses terhadap air bersih | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi, terutama Kawasan perkotaan di wilayah Ekoregion Banua Vulkanik Sangihe-Minahasa, Kayu Hitam Donggala-Tomini, Gugus Terumbu Pabbiring, dan Bentang Konaweha |
| | | 3.3.3. Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpadu skala perumahan dan kota | v | v | v | |

3.3.4. Peningkatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 3.3.4. Peningkatan sistem irigasi dan efisiensi kebutuhan air untuk pertanian | v | v | v | Wilayah Ekoregion Lahan Prima Gandang Dewata, Alang Padi Khatulistiwa Celebes, Bentang Vulkanik Bantaeng, dan Banua Vulkanik Sangihe Minahasa |
| 4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam | 4.1. Mencadangkan wilayah dengan potensi Sumber Daya Alam | 4.1.1. Pencadangan wilayah dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Wilayah Ekoregion Kayu Hitam Donggala-Tomini, Pegunungan Kotounapowali, dan Alang Padi Khatulistiwa Celebes, serta ekosistem karst di wilayah Ekoregion Banua Karstik Talaud, Banggai, dan Muna-Buton |
| | | 4.1.2. Pencadangan ekosistem karst sesuai dengan fungsi kawasannya | v | v | v | |

4.2. Membangun . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 4.2. Membangun ruang pelestarian keanekaragaman hayati | 4.2.1. Penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya pada kawasan perkotaan | v | v | v | Kawasan Perkotaan di wilayah Ekoregion Banua Vulkanik Sangihe-Minahasa, Kayu Hitam Donggala-Tomini, Bentang Vulkanik Bantaeng, dan Bentang Konaweha serta Bentang Perbukitan Lore Lindu |
| | | 4.2.2. Penyediaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi | v | v | v | |
| 5. Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah | 5.1. Menerapkan kebijakan nilai ekonomi karbon | 5.1.1. Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan emisi karbon | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi |
| | | 5.1.2. Penerapan perdagangan karbon domestik (karbon hijau dan biru) | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion darat dan Ekoregion laut di Pulau Sulawesi |

5.2. Mengembangkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 5.2. Mengembangkan bioprospeksi keanekaragaman hayati | 5.2.1. Pengembangan riset, inventarisasi, dan eksplorasi bioprospeksi | v | v | | Kawasan Hutan Pulau Sulawesi di wilayah Ekoregion Pegunungan Gorontalo, Kayu Hitam Donggala-Tomini, Bentang Perbukitan Lore Lindu, Lahan Prima Gandang Dewata, Pegunungan Kotounapowali, dan Bentang Konaweha |
| | | 5.2.2. Penguatan Kerjasama sektor swasta dan Lembaga penelitian | v | v | | |
| | | 5.2.3. Penapisan dan pengujian Sumber Daya Alam bioprospeksi | v | v | | |
| | | 5.2.4. Promosi dan pemanfaatan komersial produk bioprospeksi | | v | v | |

6. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 6. Penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission* | 6.1. Menerapkan dekarbonisasi pada sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | 6.1.1. Perencanaan kegiatan yang rendah emisi pada seluruh usaha/kegiatan sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Sulawesi terutama pada kawasan perkotaan seperti wilayah Ekoregion Banua Vulkanik Sangihe-Minahasa, Kayu Hitam Donggala-Tomini, Gugus Terumbu Pabbiring, dan Bentang Konaweha |
| | | 6.1.2. Penggunaan bahan bakar non-fosil atau sumber daya energi terbarukan pada seluruh usaha/kegiatan sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | v | v | v | |

6.2. Mengembangkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 6.2. Mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) | 6.2.1. Pengembangan energi terbarukan dari potensi panas bumi dan angin (bayu) | v | v | v | Wilayah Ekoregion Bentang Vulkanik Bantaeng, Perbukitan Bone - Leang Tedongenge, dan Lahan Prima Gandang Dewata |
| 7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana | 7.1. Meningkatkan ketahanan iklim Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | 7.1.1. Penguatan rencana pengurangan risiko iklim kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | v | v | | Kawasan perkotaan Bimindo dan Maminasata di wilayah Ekoregion Banua Vulkanik Sangihe-Minahasa, dan Gugus Terumbu Pabbiring, serta wilayah Ekoregion Nusa Sekara Selayar, Gugus Terumbu Sabalana Tengah, Terumbu Wakatobi Khabanti Wa Leja, Banua Karstik Banggai, dan Talaud |
| | | 7.1.2. Pembangunan infrastruktur hijau dan *climate proofing* di Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | v | v | v | |

7.2. Meningkatkan . . .

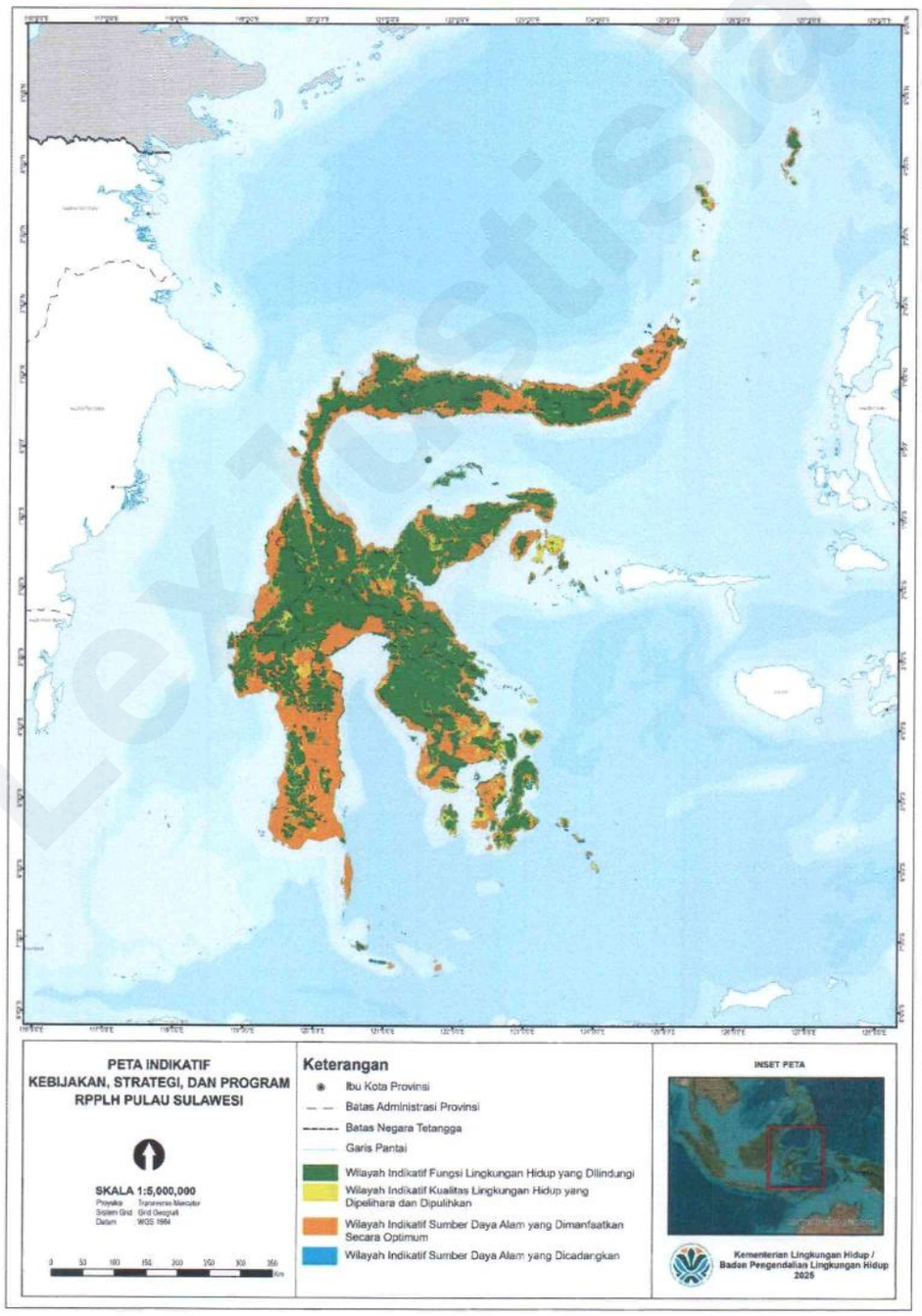
Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 7.2. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | 7.2.1. Penguatan edukasi dan pemberdayaan Masyarakat terkait adaptasi terhadap dampak perubahan iklim | v | v | v | |

Penggambaran . . .

Penggambaran indikatif kebijakan, strategi, dan program RPPLH Nasional Pulau Sulawesi sebagaimana peta berikut:




Gambar 4. Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional Pulau Sulawesi

**V. PULAU . . .**



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

## V. PULAU PAPUA

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Papua

Informasi dasar karakteristik Ekoregion Pulau Papua berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 45,47% dari luas wilayah Pulau Papua, khususnya di bagian barat, bagian utara, dan bagian tengah merupakan kawasan ekosistem alami dengan karakteristik sangat rentan. Kawasan ekosistem sangat rentan memerlukan waktu di atas 100 tahun untuk memulihkan dirinya apabila mengalami kerusakan di vegetasi alami atau membutuhkan umur geologi apabila mengalami kerusakan pada bentang alamnya.
2. Papua bagian barat meliputi Gugusan Kepulauan Waigeo–Misool, Sorong, Manokwari, dan Fakfak
   a. Didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang memiliki material batuan karbonat (seperti batu kapur) serta batuan metamorfik, dan dominasi vegetasi alami hutan batu gamping pamah.
   b. Di wilayah ini terdapat hutan ultrabasa, hutan kerangas, hutan gambut, dan hutan hujan tropis yang memiliki banyak satwa endemik dan potensi bahan mineral.
   c. Keberadaan tutupan vegetasi dapat menjaga berbagai macam hal, meliputi iklim mikro yang mendukung habitat flora dan fauna endemik serta menjaga kesuburan tanah dari seresah yang dihasilkan.
   d. Vegetasi hutan batu gamping cenderung memiliki kemampuan dalam menampung air dan menjaga kondisi kelembaban wilayah, sehingga dapat menjadi sumber air dan nutrisi untuk hutan ultrabasa serta menjaga iklim mikro wilayah. Kondisi ini menyebabkan flora dan fauna endemik mendapatkan sumber energi untuk hidup. Apabila terjadi perubahan tutupan lahan yang besar, maka keseimbangan ekosistem tersebut akan terganggu.

3. Papua . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

3. Papua bagian utara khususnya pada Pegunungan Nassao dan Potowania
   a. Didominasi oleh pegunungan dengan umur batuan yang tua sehingga sudah terjadi pelapukan (denudasional).
   b. Terdapat vegetasi hutan pamah non dipterokarpa (rempah dan buah-buahan).
   c. Cenderung memiliki bahaya longsor tinggi, sehingga laju aliran air perlu diperlambat dengan menjaga tutupan lahan di atasnya.

4. Papua bagian tengah yaitu Kompleks Pegunungan Jaya Wijaya
   a. Didominasi oleh vegetasi alami hutan ultrabasa pamah dengan tingkat elevasi sangat tinggi.
   b. Ekosistem ini tersusun dari batuan metamorfik sehingga memiliki kandungan kekayaan potensi bahan mineral dan memiliki solum tanah sangat tipis, tidak banyak tumbuhan yang dapat hidup pada kondisi cukup ekstrem tersebut.
   c. Sebagian besar wilayah merupakan daerah hulu sebagai daerah tangkapan air. Lepasan batuan metamorfik yang terangkut aliran air sungai mempengaruhi pembentukan gambut di bagian selatan dan utara Papua. Ekosistem ini menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik yang cukup unik sehingga keberadaan ekosistem ini sangat penting dalam menjaga keberadaan flora dan fauna endemiknya.
   d. Selain itu, terdapat ekosistem yang sangat rentan dan sangat unik, yaitu pegunungan glasial (terbentuk dari aktivitas gletser) dengan vegetasi hutan subalpin yang memiliki fungsi pengatur iklim. Terdapat banyak area terbuka dengan batuan keras dan solum tanah yang sangat tipis, sehingga tumbuhan yang mampu hidup hanya lumut, rumput, dan semak.

5. Daerah Kaimana dan Papua bagian selatan seperti Asmat, Agats, Boven Digoel, Mappi hingga Merauke
   a. Didominasi oleh dataran yang terbentuk dari hasil endapan pengangkutan sungai.

b. Didominasi . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

b. Didominasi vegetasi alami terna rawa air tawar dan sebagian besar merupakan rawa yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa liar seperti Boven Digoel.

c. Sebagian wilayah merupakan daerah savana termasuk Ekoregion lintas negara (*transfly ecoregion*), lahan gambut, dan kawasan musamus. Wilayah ini merupakan dataran subur sehingga mampu mendukung ekosistem di atasnya yang kemudian berpotensi dikembangkan untuk kegiatan pertanian.

Dari karakteristik Ekoregion Pulau Papua ini, kemudian diidentifikasi dengan kerangka DPSIR dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Tantangan Lingkungan Hidup | 1. **Penduduk terkonsentrasi** pada kawasan perkotaan **Papua bagian selatan** (Merauke), **Papua bagian barat** (Sorong, Teluk Bintuni), **Mimika** dan **Metropolitan Jakesa** (Jayapura, Keerom, Sarmi).<br>2. **Tingginya permintaan global terhadap gas alam** dan komoditas **mineral logam**.<br>3. Pemenuhan **kebutuhan pangan, industri, dan energi nasional**. |
| Isu Lingkungan Hidup | 1. **Bertambahnya permintaan lahan prima secara masif** untuk kegiatan pertanian dan industri terkait pertanian di satu wilayah yang dapat meningkatkan risiko hilangnya ekosistem alami pulau.<br>2. Meningkatnya **risiko pencemaran dan kerusakan bagi ekosistem terestrial dan perairan**.<br>3. Belum **siapnya infrastruktur perkotaan yang merata dan handal**. |
| Kondisi Lingkungan Hidup | 1. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pulau Papua berstatus belum terlampaui yang mampu mendukung jumlah penduduk optimal sebanyak 17 juta jiwa penduduk. Namun, **dalam periode 1996 sampai 2022 terjadi penurunan Jasa Lingkungan Hidup pengatur air** sebesar (±16,35% dari luas pulau). |

2. Indeks . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| | 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Papua tahun 2022 berkategori baik (82,84) di atas rata-rata nasional dengan indeks kualitas penopang yaitu IKL, IKU, dan IKAL. Nilai **Indeks Kualitas Air seluruh provinsi di Pulau Papua berkategori sedang di bawah 62**.<br><br>3. Keberadaan Sumber Daya Alam berupa **mineral dan logam** seperti emas, besi, tembaga dan sebagainya menjadi kekayaan Sumber Daya Alam untuk mendorong kegiatan ekonomi ekstraktif. Kekayaan **keanekaragaman hayati** dan keberadaan **Jasa Lingkungan Hidup tinggi** menjadi modal pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan. |
| Dampak Lingkungan Hidup | 1. **Terganggunya sumber penghidupan Orang Asli Papua (OAP)** karena perkembangan ekonomi ekstraktif skala besar.<br><br>2. Meningkatnya **risiko epidemi dan wabah penyakit yang ditularkan melalui air tercemar**.<br><br>3. **Kerugian ekonomi** akibat banjir, tanah longsor, gempa bumi, pencemaran dan kerusakan lingkungan.<br><br>4. **Ancaman kepunahan spesies flora fauna endemik** apabila perluasan kawasan produktif tidak terkontrol.<br><br>5. **Meningkatnya risiko bencana kelaparan akibat hilangnya ekosistem alami** sebagai sumber penghidupan Orang Asli Papua yang semakin meluas. |

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Papua

Berdasarkan potensi dan masalah Pulau Papua, maka skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 30 tahun ke depan bertemakan **"Memberdayakan Orang Asli Papua dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan yang Berkelanjutan"**.

Kawasan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Kawasan hutan perlu dipastikan terus mendukung keberlangsungan fungsi lingkungan hidup Papua yang sekaligus menjadi prospek pengembangan ekonomi hijau dan sumber penghidupan Orang Asli Papua (OAP). Keterlibatan OAP yang bersinergi dengan penduduk pendatang perlu diperluas dan ditingkatkan dalam segala kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengoptimalkan jasa ekosistem dan mewujudkan masyarakat yang mandiri pangan. Oleh karena itu, skenario penyediaan infrastruktur ramah lingkungan dan penguatan instrumen lingkungan hidup harus menjadi prinsip untuk segala bentuk pemanfaatan Sumber Daya Alam, terutama pada ekosistem rentan, kawasan fungsi Jasa Lingkungan Hidup tinggi dan ekosistem laut terutama di Papua bagian barat, Papua pegunungan dan Papua bagian selatan.

Penyediaan *environmental safeguard* (pengamanan lingkungan) terus didorong bagi kegiatan pemanfaatan yang berdekatan dengan kawasan konservasi. Skenario tersebut akan memfokuskan pada ±47 kawasan konservasi serta kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi terus terlindungi dari ancaman kerusakan kegiatan luar. Tidak lupa, pemulihan perlu ditekankan terhadap 1,2 juta Ha luas DAS kritis dan lahan kritis (rentang sangat kritis hingga agak kritis) seluas 15,6 juta Ha. Resiliensi bencana terus ditingkatkan pada kawasan pesisir dan pegunungan di Pulau Papua secara keseluruhan, dan gugusan pulau kecil di Papua Barat melalui pendekatan berbasis ekosistem.

C. Perumusan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pulau Papua

| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan yang memiliki kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi | 1.1. Memperkuat tata kelola terkait kawasan perlindungan | 1.1.1. Penetapan perlindungan terhadap areal preservasi (terutama gambut, karst, ekosistem laut) pada kebijakan pembangunan di Pulau Papua | v | v | | Ekosistem Gambut (Lahan Basah Kaimana-Agats–Merauke, Lahan Basah Teluk Bintuni, Lahan Basah Mamberamo, Pesisir Nabire-Waropen–Sarmi–Genyem); Ekosistem Karst (Bentang Perbukitan Karstik Fakfak Kumawa, Perbukitan Karstik Klamono, Kepulauan Terumbu Misool, Bentang Perbukitan Gamping Leher Cendrawasih, Lembah Baliem Lokale Kurulu, Dataran Gamping Fakfak); Ekosistem laut *Coral Triangle* (Ekoregion Laut Teluk Cendrawasih, Laut Seram, dan Teluk Bintuni) |

1.1.2. Penetapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.1.2. Penetapan batasan antara wilayah konservasi dengan kegiatan usaha | v | | | Seluruh wilayah Ekoregion di Pulau Papua yang mempunyai nilai konservasi tinggi |
| | | 1.1.3. Penguatan kerja sama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lintas negara (*transfly ecoregion*) | | v | v | *Transfly ecoregion* (Merauke – Papua New Guinea) |
| | | 1.1.4. Percepatan penetapan ruang hidup masyarakat adat Papua | v | v | | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |

1.1.5. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.1.5. Penerapan pola manajemen kelola kawasan konservasi berbasis tapak (*resort based management/ RBM)* | v | v | v | |
| | 1.2. Mengurangi dampak negatif akibat pembangunan infrastruktur | 1.2.1. Pembangunan infrastruktur hijau pada bagian dalam dan sekitar kawasan perlindungan dengan memperhatikan koridor ekologis | v | v | | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |

1.2.2. Pelestarian . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.2.2. Pelestarian fungsi ekosistem penting (gambut, karst, mangrove, dan lahan basah) | v | v | v | |
| | | 1.2.3. Pembangunan *buffer zone* di sekitar kawasan perlindungan | v | v | | Lahan Basah Kaimana – Agats – Merauke, Lahan Basah Teluk Bintuni, Bentang Pegunungan Wasior – Baliem – Oksibil, Bentang Pegunungan Cycloop Jayapura Youtefa, Bentang Perbukitan Sorong Meybrat, Bentang Pegunungan Arfak, dan Bentang Kepulauan Waigeo |

1.3. Mengembangkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 1.3. Mengembangkan teknologi dan inovasi perlindungan wilayah | 1.3.1. Pengembangan riset dan teknologi terkait perlindungan wilayah | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |
| | | 1.3.2. Pendanaan inovatif untuk mendukung perlindungan wilayah | v | v | v | |
| | 1.4. Meningkatkan kapasitas dan peran kelompok masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP) dalam kawasan perlindungan | 1.4.1. Pelibatan aktif masyarakat adat dan OAP dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |
| | | 1.4.2. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dan OAP dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |

1.5. Melestarikan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 1.5. Melestarikan keanekaragaman hayati endemik pulau | 1.5.1. Pelestarian tumbuhan dan satwa liar pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |
| | | 1.5.2. Penyediaan taman keanekaragaman hayati pada spesies unik dan eksotik pulau | v | v | v | |

2. Pemulihan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup | 2.1. Memulihkan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup | 2.1.1. Rehabilitasi dan restorasi lahan kritis | v | v | v | Bentang Pegunungan Wasior-Baliem- Oksibil, Bentang Pegunungan Arfak, Bentang Perbukitan Sorong Meybrat, Lahan Basah Teluk Bintuni, Bentang Pegunungan Cycloop Jayapura Youtefa, Perbukitan Karstik Klamono, dan Pegunungan Glasial Papua |
| | | 2.1.2. Rehabilitasi lahan pasca tambang | v | v | v | Lahan bekas *Open pit mining* terutama di Bentang Pegunungan Wasior-Baliem-Oksibil |
| | | 2.1.3. Rehabilitasi DAS kritis | v | v | v | DAS Sentani Tami, DAS Klawoguk, DAS Kais, DAS Remu, dan DAS Murpurka |

2.2. Mengembangkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 2.2. Mengembangkan inovasi teknologi dan pengetahuan dalam pemulihan kualitas lingkungan | 2.2.1. Implementasi rekayasa genetika dan teknologi modern dalam pemulihan kualitas Lingkungan Hidup | v | v | | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |
| 3. Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.1. Mengarusutamakan perencanaan tata ruang dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.1.1. Penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |
| | | 3.1.2. Penerapan praktik pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya | v | v | v | |



Tampung . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | Tampung Lingkungan Hidup | | | | |
| | 3.2. Penerapan perizinan berusaha ramah lingkungan komoditas unggulan | 3.2.1. Penerapan perizinan berusaha ramah lingkungan dalam kawasan hutan dan konservasi | v | v | v | Bentang Pegunungan Wasior – Baliem - Oksibil, Bentang Pegunungan Arsoo Amgotro, Bentang Perbukitan Sorong Meybrat, Lahan Basah Kaimana - Agats -Merauke, Pesisir Nabire – Waropen – Sarmi – Ganyem, Lahan Basah Teluk Bintuni, Bentang Pegunungan Jayapura Cycloop Youtefa, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafura |
| | | 3.2.2. Penyediaan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan | v | v | v | |
| | | 3.2.3. Penetapan instrumen baku mutu dan baku kerusakan lingkungan | v | | | |
| | | 3.2.4. Penerapan instrumen baku mutu dan baku kerusakan lingkungan hidup | | v | v | |

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 3.3. Mengembangkan pangan lokal sesuai dengan karakteristik ekologi dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.3.1. Intensifikasi dan/atau diversifikasi pangan lokal sesuai potensi masing-masing wilayah | v | v | v | Bentang Pegunungan Jayapura Cycloop Youtefa, Bentang Pegunungan Wasior – Baliem - Oksibil, Bentang Perbukitan Sorong Meybrat, dan Bentang Pegunungan Tambraw Manokwari |
| | | 3.3.2. Pembangunan pusat pertanian pangan lokal sesuai dengan jenis pangan masing-masing | v | v | | |
| | | 3.3.3. Peningkatan kapasitas sumber daya pertanian dalam mengelola pangan lokal organik | v | v | v | |

4. Pencadangan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam | 4.1. Mencadangkan dan melindungi wilayah dengan kondisi Jasa Lingkungan Hidup tinggi dan areal preservasi | 4.1.1. Pencadangan wilayah dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Lahan Basah Kaimana – Agats - Merauke, Pesisir Nabire-Waropen – Sarmi – Genyem |
| | | 4.1.2. Pencadangan wilayah sesuai dengan kondisi dan karakteristik dan fungsi kawasannya | v | v | v | |
| | | 4.1.3. Pemberdayaan masyarakat adat dan OAP dalam pencadangan wilayah | v | v | v | |

5. Pendayagunaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 5. Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah | 5.1. Mengembangkan potensi bioprospeksi | 5.1.1. Inventarisasi potensi bioprospeksi | v | | | Kawasan hutan dan kawasan perairan di seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |
| | | 5.1.2. Pembangunan pusat riset dan studi biprospeksi keanekaragaman hayati | v | v | | |
| | | 5.1.3. Pemberdayaan masyarakat adat mengenai bioprospeksi | v | v | v | |
| | | 5.1.4. Implementasi hak paten kekayaan intelektual terhadap hasil bioprospeksi | v | v | | |

5.1.5. Penyediaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 5.1.5. Penyediaan regulasi pemanfaatan dan *benefit sharing* sumber daya genetik untuk biosprospeksi | v | | | |
| | | 5.1.6. Produksi dan promosi produk bioprospeksi | | v | v | |
| | 5.2. Mengembangkan potensi ekonomi karbon berdasar nilai ekonomi karbon | 5.2.1. Penerapan *carbon credit* | v | v | v | Kawasan lindung dan kawasan konservasi Papua di seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |

6. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 6. Penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission* | 6.1. Menerapkan dekarbonisasi pada sektor industri, transportasi, energi, limbah, dan sampah | 6.1.1. Penggunaan energi baru terbarukan pada sektor industri, transportasi, energi, limbah, dan sampah | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |
| | | 6.1.2. Perpindahan penggunaan bahan bakar fosil dalam usaha/kegiatan sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | v | v | v | |

6.2. Meningkatkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 6.2. Meningkatkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan di kelompok masyarakat adat dan OAP | 6.2.1. Penerapan ekonomi sirkular dalam kawasan perkotaan dan kegiatan industri | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion Pulau Papua |
| | | 6.2.2. Sosialisasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan termasuk perilaku ramah lingkungan hidup | v | v | v | |
| 7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim | 7.1. Mengembangkan pendekatan ekosistem dalam pengurangan risiko | 7.1.1. Implementasi pendekatan berbasis ekosistem pada kawasan rawan bencana dan | v | v | v | Kawasan Metropolitan Jakesa, Kepulauan Biak, Raja Ampat, Kompleks Pegunungan Jaya Wijaya, Papua bagian selatan, |

serta . . .

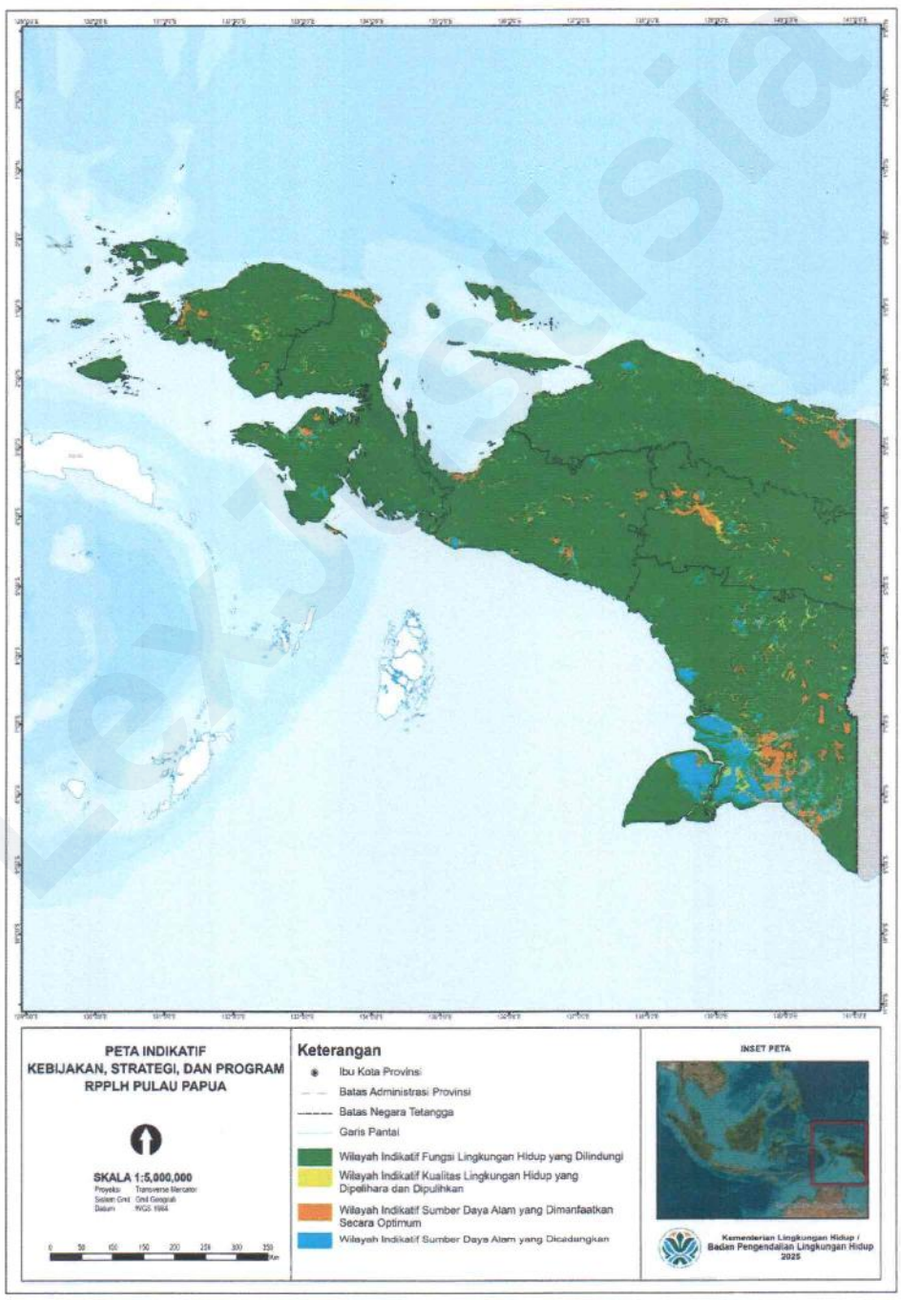
Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| serta pengurangan risiko bencana | bencana dan dampak perubahan iklim | terdampak perubahan iklim (perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil) | | | | Pesisir Nabire hingga Jayapura, dan pulau-pulau kecil |
| | 7.2. Meningkatkan kapasitas masyarakat berketahanan iklim dan tanggap bencana | 7.2.1. Pembentukan komunitas tanggap bencana pada tingkat desa | v | | | Seluruh wilayah Ekoregion termasuk pulau-pulau kecil Pulau Papua |
| | | 7.2.2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim | v | v | v | |

Penggambaran . . .

Penggambaran indikatif kebijakan, strategi, dan program RPPLH Nasional Pulau Papua sebagaimana peta berikut:




Gambar 5. Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional Pulau Papua

**VI. KEPULAUAN . . .**



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

## VI. KEPULAUAN BALI-NUSA TENGGARA

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepulauan Bali-Nusa Tenggara

Informasi dasar karakteristik Ekoregion Kepulauan Bali-Nusa Tenggara berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 91% dari luas wilayah daratan Kepulauan Bali-Nusa Tenggara merupakan kawasan ekosistem alami dengan karakteristik rentan dan sangat rentan. Wilayah yang rentan memerlukan waktu 35-100 tahun untuk memulihkan dirinya apabila mengalami kerusakan di vegetasi alami atau membutuhkan umur geologi apabila mengalami kerusakan pada bentang alamnya. Sedangkan wilayah yang sangat rentan, terutama di bagian selatan, memerlukan waktu di atas 100 tahun untuk memulihkan dirinya dari kerusakan tersebut.
2. Kepulauan Bali-Nusa Tenggara (Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, sampai dengan Pulau Alor)
   a. Didominasi oleh bentukan lahan asal proses vulkanik dengan umur geologis beragam dari masih muda hingga tua yang sudah terjadi pelapukan.
   b. Pada wilayah vulkanik yang sudah lapuk didominasi vegetasi alami savana dan padang rumput. Kondisi iklim yang kering menyebabkan wilayah ini mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan secara alami.
   c. Wilayah yang memiliki umur vulkanik muda masih didominasi vegetasi hutan pegunungan menjadi pengatur air dan penyedia air yang baik.
   d. Wilayah ini memiliki nutrisi yang cukup tinggi, sehingga wilayah lautnya juga memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan berpotensi untuk kegiatan pariwisata bahari.
   e. Walaupun tanahnya kaya akan nutrisi, tetapi iklim yang kering menjadikan wilayah ini tidak mampu ditumbuhi oleh banyak jenis tumbuhan. Vegetasi dengan tajuk tinggi akan menjaga iklim mikro sehingga tetap terjaga siklus hidrologinya. Pemanfaatan yang tidak terkendali pada ekosistem ini dapat mengganggu perannya sehingga menimbulkan kekeringan dan mengalami banyak kekurangan air di beberapa wilayah.

3. Kepulauan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

3. Kepulauan Bali-Nusa Tenggara bagian selatan seperti Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Sawu, dan Pulau Timor
   a. Didominasi oleh Pegunungan dengan material batuan sedimen karbonat yang memiliki vegetasi alami hutan batu gamping pamah monsun meranggas. Wilayah ini berperan penting dalam pengaturan dan penyediaan air.
   b. Dengan kandungan sedimen karbonat wilayah ini memiliki kandungan potensi sumber daya mineral.
   c. Kondisi iklim yang cukup kering menyebabkan tidak banyak jenis tumbuhan mampu bertahan hidup, kecuali flora endemik, seperti cendana. Vegetasi tersebut menjaga lapisan tanah yang sangat tipis dan mempertahankan keberlangsungan sistem hidrologi. Hilangnya vegetasi tersebut akan mengganggu sistem hidrologi dan dapat mengurangi ketersediaan air.

Dari karakteristik Ekoregion Kepulauan Bali-Nusa Tenggara ini, kemudian diidentifikasi dengan kerangka DPSIR dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Tantangan Lingkungan Hidup | 1. **Penduduk yang terkonsentrasi pada kawasan perkotaan** seperti Sarbagita, Mataram Raya, dan Kupang, serta kawasan di sekitar destinasi pariwisata seperti Labuan Bajo.<br>2. Ekonomi kepulauan yang bertumpu pada pariwisata massal (*mass tourism*). |
| Isu Lingkungan Hidup | 1. **Berkurangnya luas ekosistem alami** dan wilayah dengan Jasa Lingkungan Hidup tinggi akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pariwisata massal.<br>2. Meningkatnya **risiko pencemaran air dan udara** akibat pertumbuhan pariwisata massal yang tidak dibarengi oleh peningkatan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan. |
| Kondisi Lingkungan Hidup | 1. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pulau Bali dan Pulau Lombok telah terlampaui. Apabila di-agregasi pada skala Kepulauan, Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Bali-Nusa Tenggara belum terlampaui.<br>2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada di angka 72,5 (Baik). Akan tetapi, **Indeks Kualitas Air (IKA) berada di angka 52,5 (Sedang) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) berada di angka 57,1 (Sedang)**. |

Dampak . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Dampak Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya risiko **kekeringan dan krisis air bersih**, bencana banjir dan tanah longsor.<br>2. Terancamnya ekosistem alami di pesisir dan pulau-pulau kecil. |

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepulauan Bali-Nusa Tenggara

Skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kepulauan Bali-Nusa Tenggara untuk 30 tahun ke depan memiliki tema "**menjaga kelestarian lingkungan hidup Bali-Nusa Tenggara sebagai mutiara nusantara**". Pada skenario ini, seluruh ekosistem alami yang rusak (terutama pada lahan kritis yang memiliki luas 13% kepulauan) dapat pulih kembali. Perkembangan pariwisata diarahkan pada ekowisata yang mendorong kelestarian alam, flora fauna, serta tradisi lokal. Destinasi-destinasi pariwisata yang berkembang diarahkan untuk menjadi destinasi pariwisata premium sehingga manfaat nilai ekonomi yang dihasilkan tetap tinggi meskipun jumlah pengunjung dibatasi sehingga tekanan terhadap kondisi ekosistem dapat dikurangi. Pertumbuhan kawasan perkotaan dikendalikan sehingga penggunaan ruang untuk permukiman dan penunjang aktivitas pariwisata lebih efisien. Pengembangan tata kelola, intervensi teknologi, dan perubahan pola perilaku masyarakat dibutuhkan untuk menyokong ekonomi sirkuler agar timbulan sampah yang dihasilkan oleh perkotaan dan aktivitas pariwisata dapat terkelola dengan baik.

C. Perumusan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kepulauan Bali-Nusa Tenggara

| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi | 1.1. Memperkuat perlindungan terhadap kawasan dengan fungsi lindung | 1.1.1. Pembangunan infrastruktur hijau pada sekitar kawasan perlindungan | v | | | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 1.1.2. Pembangunan *buffer zone* di sekitar kawasan perlindungan | v | | | |
| | 1.2. Memperkuat teknologi dan inovasi perlindungan wilayah dengan fungsi sistem penyangga kehidupan | 1.2.1. Pemantapan sistem informasi dan basis data pengelolaan kawasan konservasi | v | v | v | |
| | | 1.2.2. Peningkatan inovasi dan teknologi monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi | v | v | v | |

1.2.3. Penguatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 1.2.3. Penguatan kerja sama lintas Ekoregion (*transborder*) yang berbatasan dengan negara lain | v | v | v | Nusa Cendana Sasando |
| | 1.3. Melestarikan keanekaragaman hayati endemik pulau | 1.3.1. Penyediaan taman keanekaragaman hayati pada spesies unik dan eksotik pulau | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| 2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup | 2.1. Memulihkan wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan | 2.1.1. Pemulihan lahan kritis | v | v | | Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 2.1.2. Penambahan luas hutan mangrove | v | v | | |
| | 2.2. Memperkuat tata kelola pemulihan dan pemeliharaan | 2.2.1. Pemantapan sistem informasi pemulihan dan pemeliharaan lingkungan | v | v | v | |

Lingkungan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | Lingkungan Hidup | 2.2.2. Penguatan kelembagaan pemulihan Lingkungan Hidup | v | v | v | |
| 3. Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alamnya dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.1. Mengarusutamakan perencanaan tata ruang dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.1.1. Penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 3.1.2. Penerapan praktik pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | |

3.2. Menerapkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 3.2. Menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam | 3.2.1. Pembangunan infrastruktur hijau dan tahan iklim (*climate proofing*) | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, dan Nusa Cendana Sasando |
| | | 3.2.2. Pengoptimalisasian teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam | v | v | v | Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | 3.3. Meningkatkan ketahanan air | 3.3.1. Penyediaan infrastruktur tampungan air | v | v | | Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 3.3.2. Peningkatan akses terhadap air bersih | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 3.3.3. Peningkatan sistem irigasi dan efisiensi kebutuhan air untuk pertanian | v | v | v | |

3.3.4. Pengembangan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 3.3.4. Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpadu skala perumahan dan kota | v | v | v | |
| 4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam | 4.1. Mencadangkan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 4.1.1. Pencadangan kawasan hutan | v | v | v | Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 4.1.2. Pencadangan ekosistem karst | v | v | v | |

5. Pendayagunaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 5. Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah | 5.1. Menjadikan ekowisata sebagai daya tarik utama pariwisata | 5.1.1. Pengembangan kegiatan pariwisata pada Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi | v | v | v | Seluruh Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi |
| | | 5.1.2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara kegiatan pariwisata | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 5.1.3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyelenggarakan pariwisata berkelanjutan | v | v | v | |

5.2. Mengembangkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 5.2. Mengembangkan bioprospeksi laut | 5.2.1. Pengembangan riset, inventarisasi, dan eksplorasi bioprospeksi laut | v | v | v | Nusa Cendana Sasando, Nusa Turuwara Flores, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 5.2.2. Penguatan kerja sama antara pemerintah, lembaga riset, dan pelaku usaha dalam pengembangan bioprospeksi laut | | v | v | |
| | | 5.2.3. Pengembangan bioprospeksi laut pada tahap komersialisasi produk riset | v | v | v | |

6. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 6. Penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission* | 6.1. Menerapkan dekarbonisasi kegiatan pariwisata dan penunjangnya | 6.1.1. Pengembangan kawasan dan kegiatan wisata rendah emisi | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, dan Nusa Cendana Sasando |
| | 6.2. Menerapkan dekarbonisasi pada sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | 6.2.1. Pengarusutamaan kegiatan rendah emisi dalam usaha/kegiatan sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | v | v | v | |
| | | 6.2.2. Perpindahan (*shifting*) penggunaan bahan bakar fosil dalam usaha/kegiatan sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan sampah | v | v | v | |

7. Peningkatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana | 7.1. Meningkatkan ketahanan iklim Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | 7.1.1. Penguatan rencana pengurangan risiko iklim kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, dan Nusa Cendana Sasando |
| | | 7.1.2. Pembangunan infrastruktur hijau dan *climate proofing* di Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |

7.2. Meningkatkan . . .

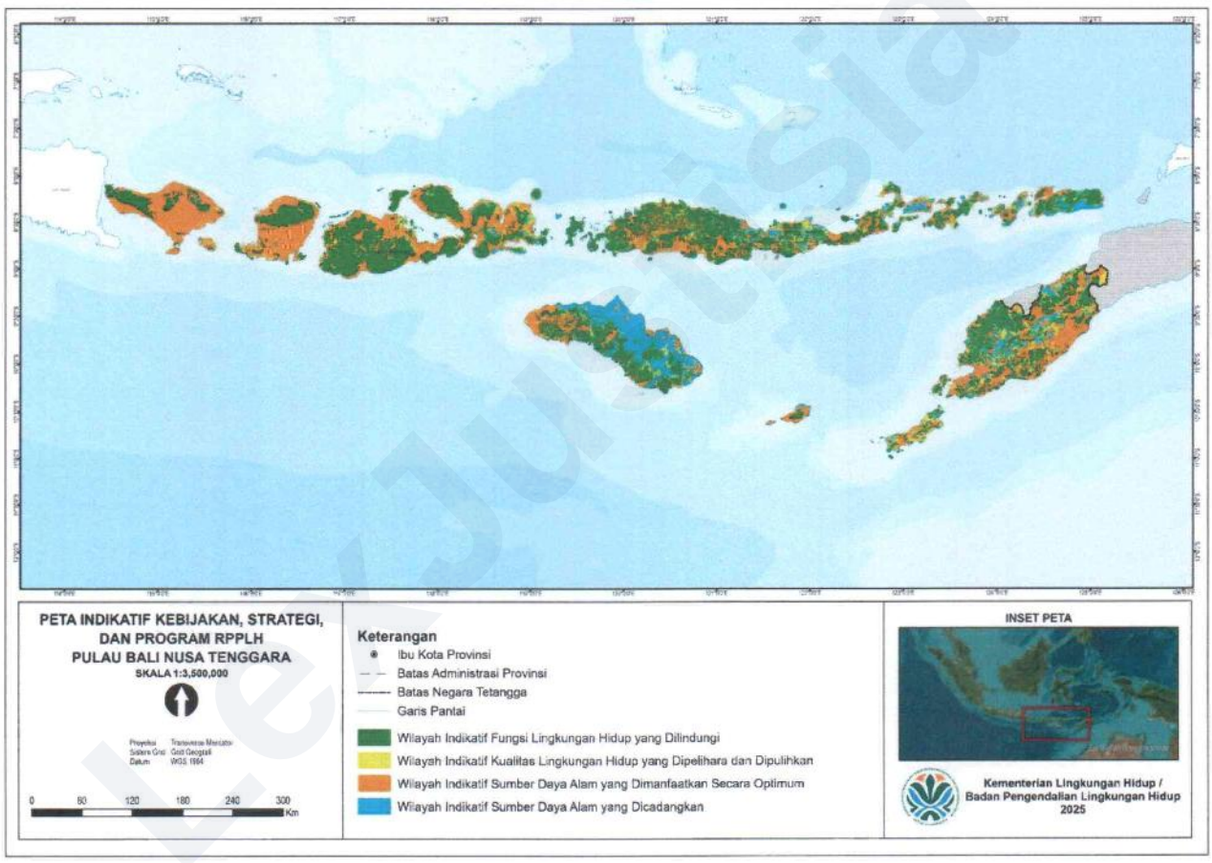
Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 7.2. Meningkatkan kapasitas Masyarakat Kawasan perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil | 7.2.1. Penguatan edukasi dan pemberdayaan Masyarakat terkait adaptasi terhadap dampak perubahan iklim | v | v | v | |
| | 7.3. Mengembangkan inovasi teknologi dalam menghadapi dampak perubahan iklim | 7.3.1. Pemantapan teknologi *early warning system* bencana | v | v | v | Nusa Dewata Agung, Nusa Sasak Rinjani, Nusa Bima Tambora, Nusa Turuwara Flores, Nusa Cendana Sasando, dan Nusa Savana Tana Humba |
| | | 7.3.2. Penerapan *smart climate agriculture* | | | | |

Penggambaran . . .

Penggambaran indikatif kebijakan, strategi, dan program RPPLH Nasional Kepulauan Bali-Nusa Tenggara sebagaimana peta berikut:




Gambar 6. Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional Pulau Bali-Nusa Tenggara

**VII. KEPULAUAN . . .**



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

## VII. KEPULAUAN MALUKU

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepulauan Maluku

Informasi dasar karakteristik Ekoregion Kepulauan Maluku berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 93% luas daratan wilayah Kepulauan Maluku didominasi oleh karakteristik ekosistem yang rentan dan sangat rentan. Wilayah yang rentan memerlukan waktu 35-100 tahun untuk memulihkan dirinya apabila mengalami kerusakan di vegetasi alami atau membutuhkan umur geologi apabila mengalami kerusakan pada bentang alamnya, sedangkan wilayah yang sangat rentan memerlukan waktu di atas 100 tahun untuk memulihkan dirinya dari kerusakan tersebut.
2. Kepulauan Maluku bagian utara seperti Pulau Halmahera, Pulau Ternate, Pulau Tidore, dan Pulau Bacan didominasi oleh ekosistem rentan dengan bentang alam dataran vulkanik dan vegetasi non dipterokarpa (rempah dan buah-buahan). Kondisi ini memiliki potensi tanah subur dan menghasilkan kekayaan rempah-rempah yang tumbuh secara alami.
3. Bagian tengah Kepulauan Maluku seperti Kepulauan Sula dan Pulau Obi, didominasi oleh ekosistem sangat rentan dengan bentang alam dataran metamorfik dan vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah.
   a. Dataran metamorfik memiliki kandungan potensi bahan mineral, sementara batuan ultrabasa memiliki unsur racun pada tanahnya sehingga membatasi pertumbuhan flora di atasnya. Hal ini menyulitkan proses pemulihan hutan ultrabasa apabila ekosistem alaminya terganggu.
   b. Kesuburan tanah hutan ultrabasa memberikan nutrisi untuk mendukung Jasa Lingkungan Hidup penyediaan pangan dari laut.

4. Kepulauan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

4. Kepulauan Maluku bagian selatan yaitu Pulau Tanimbar, Pulau Tanah Besar, Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil memiliki dominasi dengan ekosistem sangat rentan dengan dataran organik koralian (terbentuk dari proses pengangkatan dari dasar laut) bervegetasi hutan batuan gamping dataran rendah. Vegetasi tersebut menyediakan Jasa Lingkungan Hidup, yaitu penyerbukan alami serta pengendalian hama untuk mendukung produktivitas pertanian.
5. Karakteristik wilayah Ekoregion darat memberikan pengaruh positif timbal balik yang berupa produktivitas primer dan siklus nutrien kepada wilayah Ekoregion laut-nya.
   a. Contohnya sebagian Pulau Banda memiliki tanah yang subur karena terbentuk dari endapan mineral yang dibawa oleh arus laut yang di bawahnya memiliki kandungan magmatik. Begitu juga sebaliknya dengan Laut Banda memiliki kelimpahan biota laut karena nutrien yang terbawa dari daratan ke laut melalui hujan.
   b. Sedangkan Laut Halmahera memiliki keragaman biota laut yang tinggi karena pengaruh dari terumbu karang yang berasal laut dangkal, seperti di Kepulauan Sula menawarkan ekosistem unik di estuari di mana menghasilkan habitat seperti spesies mangrove, ikan, dan biota laut lainnya yang vital bagi keberlangsungan nelayan. Selain itu, di antara Laut Banda dan Laut Timor terdapat potensi migas bawah laut.

Dari karakteristik Ekoregion Kepulauan Maluku ini, kemudian diidentifikasi dengan kerangka DPSIR dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Tantangan Lingkungan Hidup | 1. **Penduduk terkonsentrasi di kawasan pesisir terutama di wilayah Maluku bagian tengah**, Ambon, Seram bagian Barat dan Halmahera Selatan.<br>2. **Mengoptimalkan potensi ekonomi biru** di Kepulauan Maluku.<br>3. **Tingginya permintaan global terhadap industri baterai dan pendukung** kendaraan listrik, serta teknologi disruptif lainnya. |

Isu . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

| Aspek | Muatan Substantif |
|---|---|
| Isu Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya **risiko hilangnya ekosistem alami serta pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup** di Kepulauan Maluku.<br>2. Rendahnya pemakaian teknologi untuk ekonomi biru serta prasarana, sarana, dan utilitas. |
| Kondisi Lingkungan Hidup | 1. Kondisi daya dukung dan daya tampung serta kualitas Lingkungan Hidup masih berada pada status belum terlampaui, dan dapat mendukung sebanyak 18,5 juta jiwa penduduk. Namun, dalam periode 1996 sampai dengan 2022 terjadi **penurunan kinerja jasa Lingkungan Hidup pengatur air seluas 16% dari total luas Kepulauan Maluku**.<br>2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kepulauan Maluku pada tahun 2022 berkategori baik (78,27), dan di atas rata-rata Nasional. Namun khususnya, Indeks Kualitas Air (IKA) Kepulauan Maluku masih di bawah 56%. Walaupun Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dikategorikan baik tetapi di **perairan Halmahera masih terjadi pencemaran laut khususnya logam berat, sampah laut, dan mikroplastik**.<br>3. **Keberadaan Sumber Daya Alam berupa mineral dan logam** seperti emas, mangan, dan nikel yang mendukung kegiatan ekonomi ekstraktif, dan **segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle initiative*)** yang kaya akan keanekaragaman hayati menjadi modal dasar Kepulauan Maluku mendorong kegiatan ekonomi berbasis ekosistem laut dan bahari (seperti perikanan dan pariwisata). |
| Dampak Lingkungan Hidup | 1. Turunnya populasi ikan sehingga tangkapan nelayan berkurang dan ketahanan pangan laut terancam.<br>2. Meningkatnya **risiko epidemi dan wabah penyakit yang ditularkan melalui air** dan polusi udara kegiatan ekstraktif seperti industri pertambangan.<br>3. Meningkatnya **kerugian dan kehilangan potensi ekonomi laut** akibat perubahan iklim.<br>4. Meningkatnya **kemungkinan penduduk yang terpaksa pindah (*people forced migration*)** akibat ketiadaan sumber daya alam dan rusaknya lingkungan pulau-pulau kecil. |

B. Skenario . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepulauan Maluku

Dalam meninjau pengaruh tren global terhadap potensi dan masalah lingkungan Kepulauan Maluku, skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam 30 tahun ke depan bertemakan "**membentuk ekosistem pendukung ekonomi biru**".

Diawali dengan memulihkan ekosistem darat dan laut, proses tersebut menjadi tumpuan perkembangan lingkungan Kepulauan Maluku yang berkelanjutan, terutama dalam mengendalikan konsentrasi penduduk dan kegiatan ekstraktif yang masif. Terjaganya kualitas air laut serta kelimpahan dan keragaman keanekaragaman hayati laut dalam rangka mendukung keberlangsungan *coral triangle* dan ekonomi biru.

Di sisi lain, pengamanan sosial dan lingkungan di wilayah utara dan tengah Maluku diperlukan untuk menerapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis mitigasi dan adaptasi kebencanaan dan ketahanan iklim. Terjalinnya konektivitas antar pulau besar maupun kecil beserta prasarana dan sarananya juga menjadi kunci dalam penerapan percepatan pembangunan berbasis *blue green infastructure*, penggunaan teknologi untuk pengembangan ekonomi biru dan yang berkaitan dengan ketahanan air, pangan, dan energi serta peningkatan kapasitas dalam membentuk pola perilaku masyarakat yang mampu untuk membangun wilayah yang berdikari dan ramah lingkungan.

C. Perumusan . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kepulauan Maluku

| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi | 1.1. Melestarikan keanekaragaman hayati endemik pulau | 1.1.1. Pelestarian tumbuhan endemik dan satwa liar pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion (WE) di Kepulauan Maluku terutama di WE Busur Vulkanik Makian Morotai, WE Busur Pegunungan Aketajawe Lolobata, WE Busur Perbukitan Aketajawe Lolobata, WE Bentang Pegunungan Tobaru Lemolemo, WE Bentang Vulkanik Sula Bacan, WE Bentang Pegunungan Sula Obi, WE Sula-Talib, WE Bentang Pegunungan Binaiya-Hatusaka-Seram, WE Busur Terumbu Gorokei Aruyambasela, dan WE Savana Wetar. |
| | | 1.1.2. Penyediaan Areal Preservasi keanekaragaman hayati pada spesies unik dan eksotik pulau | v | v | v | |

1.2. Mengembangkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 1.2. Mengembangkan teknologi dan inovasi pada wilayah dengan Jasa Lingkungan Hidup tinggi | 1.2.1. Pendanaan inovatif untuk mendukung perlindungan kawasan konservasi | v | v | v | |
| | | 1.2.2. Penetapan dan penambahan kawasan konservasi darat | v | v | | |
| | | 1.2.3. Penetapan dan penambahan Kawasan Konservasi Perairan Laut | v | v | | |
| | | 1.2.4. Pelestarian kawasan konservasi yang berpotensi rusak atau hilang | v | v | v | |
| | | 1.2.5. Pengembangan sistem informasi dan pemantauan secara *realtime* | v | v | v | |

1.3. Mengurangi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 1.3. Mengurangi dampak negatif pembangunan dan infrastruktur | 1.3.1. Pengamanan *buffer zone* yang mengalami tekanan | v | v | v | |
| | | 1.3.2. Pembatasan infrastruktur fisik ke dalam kawasan konservasi | v | v | v | |
| | | 1.3.3. Pelestarian fungsi ekosistem penting (karst, mangrove, dan lahan basah) | v | v | v | |
| | 1.4. Menguatkan tata kelola perlindungan wilayah dengan fungsi sistem penyangga kehidupan | 1.4.1. Penguatan kelembagaan perlindungan kawasan konservasi darat dan laut | v | v | v | |
| | | 1.4.2. Pemantapan sistem informasi dan basis data pengelolaan | v | v | | |

kawasan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | kawasan konservasi darat dan laut | | | | |
| | | 1.4.3. Penguatan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan kawasan konservasi darat dan laut | v | v | v | |
| | 1.5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perlindungan wilayah | 1.5.1. Penguatan edukasi, mengenai pentingnya menjaga ekosistem kepada masyarakat | v | v | v | |
| | | 1.5.2. Penerapan kegiatan pengendalian, penguatan, maupun pelestarian ekosistem berbasis masyarakat | v | v | v | |

2. Pemulihan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup | 2.1. Memulihkan dan memelihara wilayah yang terdampak tekanan lingkungan | 2.1.1. Rehabilitasi dan restorasi lahan kritis dan pasca tambang | v | v | v | WE Busur Vulkanik Makian Morotai, WE Busur Pegunungan Aketajawe Lolobata, WE Busur Perbukitan Aketajawe Lolobata, WE Bentang Vulkanik Sula Bacan, WE Sula–Taliabu, WE Bentang Pegunungan Sula Obi, WE Nusa Buru Kemiri, WE Bentang Pegunungan Binaiya Hatusaka Seram |
| | | 2.1.2. Rehabilitasi dan restorasi ekosistem laut penting | v | v | v | |
| | 2.2. Mengembangkan teknologi percepatan pemulihan wilayah yang terdegradasi | 2.2.1. Penyediaan teknologi percepatan pemulihan lahan kritis, pasca tambang, dan laut | v | v | | |
| | | 2.2.2. Penyediaan dan pemutakhiran teknologi pemantauan pemulihan lahan kritis, pasca tambang, dan laut | v | v | | |

2.3. Menguatkan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 2.3. Menguatkan tata kelola pemulihan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup | 2.3.1. Penguatan kelembagaan pemulihan Lingkungan Hidup | v | v | v | |
| | | 2.3.2. Pemantapan integrasi sistem informasi pemulihan lingkungan dan basis data wilayah yang terdegradasi | v | v | | |
| | 2.4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup | 2.4.1. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan wilayah | v | v | v | |
| | | 2.4.2. Penguatan edukasi dan inovasi masyarakat dalam perlindungan wilayah | v | v | v | |

3. Pemanfaatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 3. Pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 3.1. Pengarusutamaan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 3.1.1. Penyusunan rencana tata ruang dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | v | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion (WE) di Kepulauan Maluku terutama di WE Busur Vulkanik Makian Morotai, WE Busur Pegunungan Aketajawe Lolobata, WE Busur Perbukitan Aketajawe Lolobata, WE Bentang Pegunungan Tobaru Lemolemo, WE Bentang Vulkanik Sula Bacan, WE Bentang Pegunungan Sula Obi, WE Sula-Talib, WE Bentang Pegunungan Binaiya-Hatusaka-Seram, WE Busur Terumbu Gorokei Aruyambasela, dan WE Savana Kisar Moa Omar, dan WE Savana Wetar |
| | | 3.1.2. Penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang | v | v | v | |
| | 3.2. Penerapan perizinan berusaha ramah lingkungan | 3.2.1. Penguatan koordinasi dan konsultasi perizinan berusaha terkait Sumber Daya Alam | v | v | v | |

pada . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | pada pertambangan, perkebunan, dan perikanan dalam kerangka menjaga kelestarian kawasan hutan dan kawasan konservasi | 3.2.2. Pelaksanaan perizinan berusaha ramah lingkungan (tidak melampaui baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup) di dalam kawasan hutan dan kawasan konservasi | v | v | v | |
| | | 3.2.3. Penerapan pengelolaan industri berstandar industri hijau | v | v | v | |
| | | 3.2.4. Penerapan ekonomi sirkular pada kegiatan industri | | v | v | |
| | 3.3. Pengendalian intensitas pemanfaatan | 3.3.1. Penyiapan regulasi pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis | v | v | v | |

Sumber . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | Sumber Daya Alam pertambangan, perkebunan, dan perikanan | Jasa Lingkungan Hidup | | | | |
| | | 3.3.2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis Jasa Lingkungan Hidup | v | v | v | |
| | | 3.3.3. Penerapan praktik pertambangan baik (*good mining practice*) | v | v | v | |
| | | 3.3.4. Pemantauan sistem pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis Jasa Lingkungan Hidup | v | v | v | |
| | 3.4. Pengembangan destinasi pariwisata bahari super | 3.4.1. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis *eco-tourism* dan perlindungan | v | v | v | WE Busur Vulkanik Makian Morotai, WE Bentang Pegunungan Binaiya Hatusaka |

prioritas . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | prioritas berkelanjutan | keanekaragaman hayati laut dan darat | | | | Seram, WE Cincin Vulkanik Benda, WE Laut Banda |
| | | 3.4.2. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis *sustainable marine tourism* | v | v | v | |
| 4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam | 4.1. Melindungi wilayah dengan Jasa Lingkungan Hidup tinggi dan areal preservasi | 4.1.1. Pengamanan zona cadangan Sumber Daya Alam | v | v | | Seluruh WE di Kepulauan Maluku |
| | | 4.1.2. Pendayagunaan Sumber Daya Alam bernilai tambah berbasis ekosistem | v | v | v | |
| | | 4.1.3. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pencadangan Sumber Daya Alam | v | v | v | |

5. Pendayagunaan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| 5. Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah | 5.1. Pendayagunaan kekayaan aset keanekaragaman hayati laut untuk pengembangan ekonomi biru | 5.1.1. Penguatan edukasi kepada nelayan dan masyarakat pesisir tentang pentingnya ekonomi biru | v | v | v | Seluruh WE di Kepulauan Maluku (*Coral triangle*) |
| | | 5.1.2. Penguatan perizinan sebagai instrumen pengendalian keanekaragaman hayati laut | v | v | v | |
| | | 5.1.3. Pengembangan diversifikasi hasil laut | v | v | v | |
| | | 5.1.4. Pengembangan industri hijau hasil laut berkelanjutan | v | v | v | |
| 6. Penerapan dekarbonisasi | 6.1. Penerapan dekarbonisasi sektor AFOLU | 6.1.1. Penghentian deforestasi terencana dan deforestasi tidak terencana | v | v | v | Seluruh WE di Kepulauan Maluku |

menuju . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| menuju *net zero emission* | | 6.1.2. Pengembangan sistem pemantauan dekarbonisasi | v | v | | |
| | | 6.1.3. Penguatan aforestasi dan reforestasi | | v | v | |
| | | 6.1.4. Pengembangan pertanian berkelanjutan | v | v | v | |
| | | 6.1.5. Pengembangan pemanfaatan lahan tidak produktif | v | v | v | |
| | 6.2. Penerapan dekarbonisasi sektor energi | 6.2.1. Pengembangan transportasi angkutan publik berkelanjutan/ minim emisi (berbasis jalan dan laut) | v | v | v | |
| | | 6.2.2. Penguatan edukasi hemat energi kepada masyarakat | v | v | v | |

6.3. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | 6.3. Penerapan dekarbonisasi sektor sampah dan limbah | 6.3.1. Pengembangan pengelolaan sampah dan limbah berkelanjutan | v | v | v | |
| | 6.4. Penerapan dekarbonisasi proses industri dan penggunaan produk (IPPU) | 6.4.1. Pengembangan teknologi dalam mendukung industri pemrosesan hijau | v | v | | |
| | 6.5. Penerapan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dan instrumen ekonomi lainnya dalam | 6.5.1. Pemberian insentif dan/atau disinsentif dalam kerangka mitigasi perubahan iklim sesuai peraturan perundang-undangan | v | v | v | |

mitigasi . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | mitigasi terhadap perubahan iklim | 6.5.2. Pemantapan dan penerapan taksonomi hijau sesuai peraturan perundang-undangan | v | v | v | |
| 7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana | 7.1. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tanpa mengubah bentang alam | 7.1.1. Penyiapan, pemantapan, dan pemutakhiran teknologi untuk PLT EBT (surya, air/bayu, arus gelombang laut, dan panas bumi) | | v | v | Seluruh wilayah Ekoregion (WE) di Kepulauan Maluku terutama di WE Busur Vulkanik Makian Morotai, WE Busur Pegunungan Aketajawe Lolobata, WE Busur Perbukitan Aketajawe Lolobata, WE Bentang Pegunungan Tobaru Lemolemo, WE Bentang Vulkanik Sula Bacan, WE Bentang Pegunungan Sula Obi, WE Bentang Pegunungan Binaiya-Hatusaka-Seram, WE Busur Teruumbu Gorokei Aruyambasela, dan WE Savana Wetar |
| | 7.2. Pengembangan pembangunan perkotaan berketahanan iklim | 7.2.1. Penerapan pembangunan perkotaan berbasis ekosistem | v | v | v | |
| | | 7.2.2. Pembangunan infrastruktur hijau dan biru (*blue-green infrastructure*) | v | v | v | |

7.2.3. Peningkatan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 7.2.3. Peningkatan aksesibilitas dan hubungan kota-desa | v | v | v | |
| | 7.3. Peningkatan ketahanan air-pangan-energi | 7.3.1. Peningkatan kapasitas tampungan pada sungai, danau, embung, waduk (SDEW) | v | v | v | |
| | | 7.3.2. Penerapan praktik pemanenan air hujan (*rain harvesting*) pada permukiman masyarakat | | v | v | |
| | | 7.3.3. Penerapan teknologi pengolahan air yang bersumber di darat maupun di laut (desalinasi air laut) | v | v | v | |

7.3.4. Penerapan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | | 7.3.4. Penerapan *smart climate agriculture* pada komoditas tanaman pangan lokal | v | v | v | |
| | | 7.3.5. Penerapan *zero waste lifestyle* | v | v | v | |
| | | 7.3.6. Penerapan teknologi panel surya pada permukiman masyarakat | | v | v | |
| | 7.4. Pembangunan dan pengembangan teknologi dan infrastruktur dalam menghadapi bencana akibat | 7.4.1. Pemantapan dan pemutakhiran teknologi *early warning system* terhadap bencana | v | v | v | |

perubahan . . .

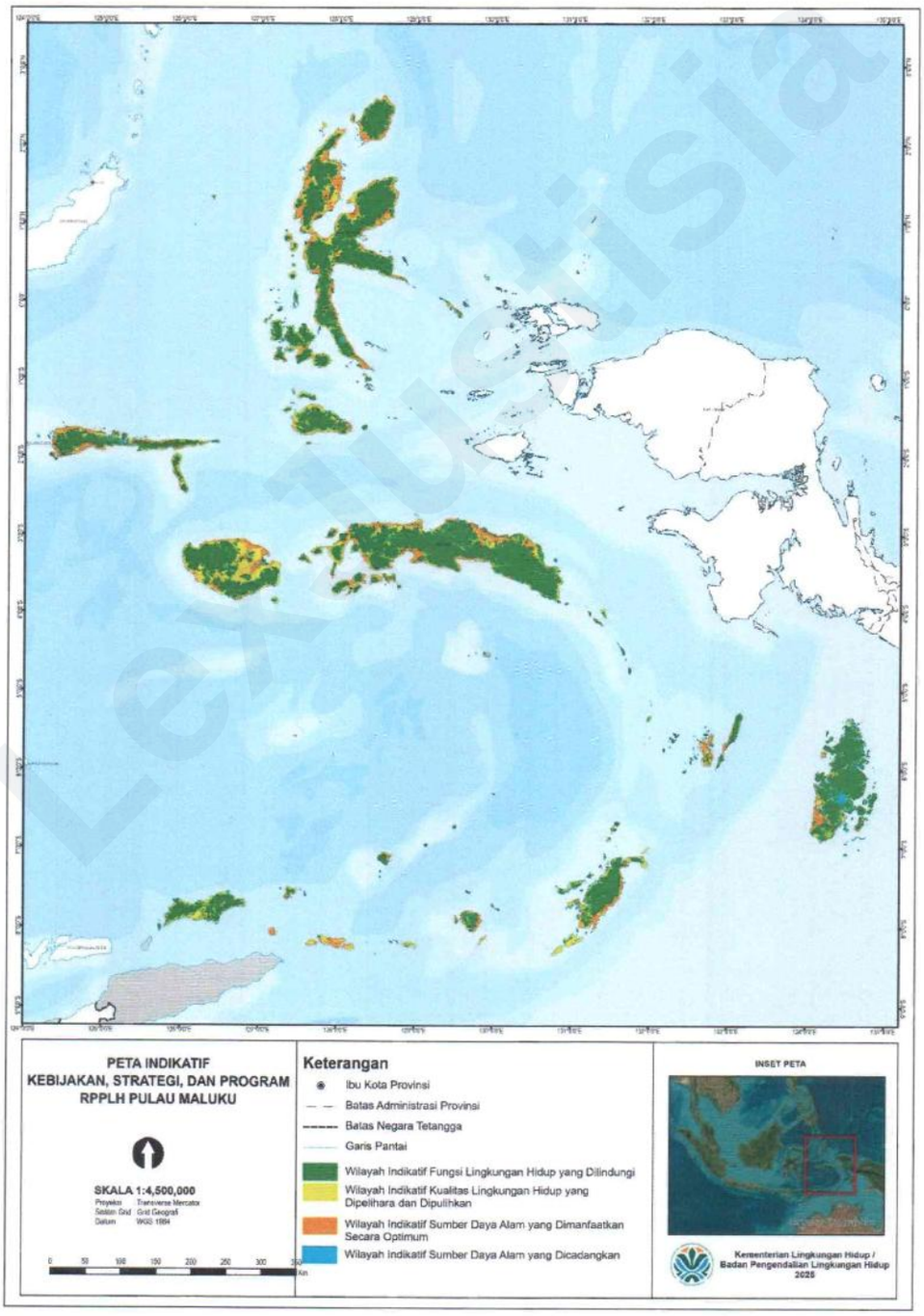
Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| Kebijakan | Strategi | Program Indikatif | Tahapan Periode | | | Lokasi Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2045 | 2055 | |
| | perubahan iklim | 7.4.2. Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur (bencana banjir dan banjir rob) | v | v | | |
| | 7.5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam adaptasi terhadap perubahan iklim | 7.5.1. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan wilayah | v | v | v | |
| | | 7.5.2. Penguatan edukasi pentingnya menjaga ekosistem kepada masyarakat | v | v | v | |

Penggambaran . . .

Penggambaran indikatif kebijakan, strategi, dan program RPPLH Nasional Kepulauan Maluku sebagaimana peta berikut:



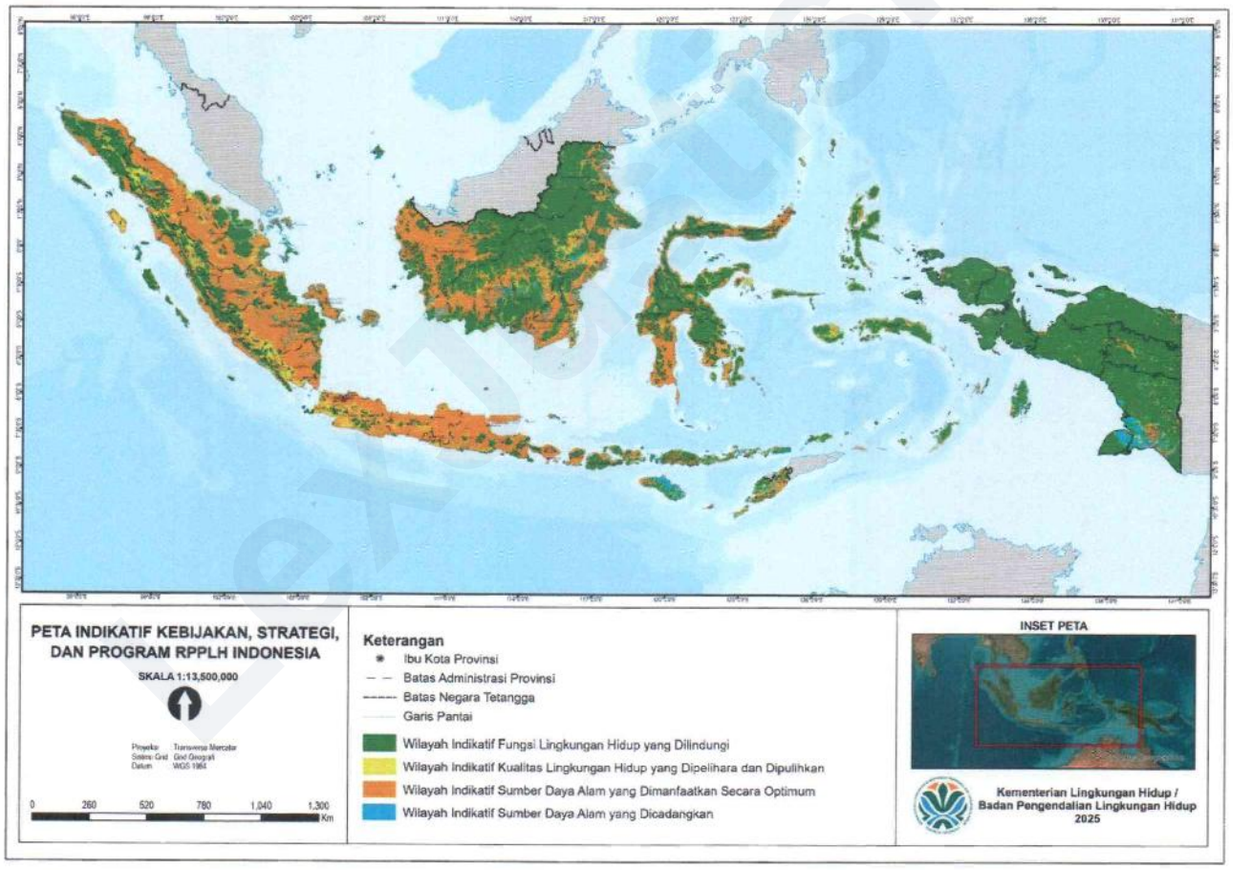

Gambar 7. Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional Pulau Maluku

Berbagai . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Berbagai kebijakan, strategi, dan program indikatif di atas diharapkan dapat mencapai visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nasional yang menjadi arah pembangunan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan. Penggambaran indikatif kebijakan, strategi dan program RPPLH Nasional secara Nasional sebagaimana peta berikut:




Gambar 8. Peta Indikatif Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional

Visi . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Visi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga bermuara pada (i) cita-cita NKRI, yaitu *"Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur"*, (ii) Tujuan Bernegara, yaitu *"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ..."* dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (iii) amanat Pasal 28H ayat (1) tentang hak setiap orang atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat, (iv) Pasal 33 ayat (3) tentang Sumber Daya Alam untuk kemakmuran rakyat dan ayat (4) tentang perekonomian nasional berbasis demokrasi ekonomi yang berwawasan lingkungan, serta (v) tujuan pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Lingkungan Hidup yang baik, serta keharmonisan di antara keduanya hingga menuju peradaban yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, arah pembangunan nasional jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan visi RPPLH nasional, yaitu negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi RPPLH nasional disusun untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 tersebut, khususnya pada aspek berkelanjutan yang diartikan sebagai lestari dan seimbang antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sehingga, . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Sehingga, **visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional** adalah:

***"LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT UNTUK SEMUA"***

Visi di atas dijelaskan sebagai berikut:

1) Lingkungan Hidup yang baik adalah Kondisi Lingkungan Hidup yang **bebas dari kerusakan dan pencemaran** serta **mampu menyediakan Jasa Lingkungan Hidup yang memadai baik dari kualitas dan kuantitas serta aksesibilitasnya**.
2) Lingkungan Hidup yang sehat adalah Kondisi Lingkungan Hidup yang memiliki **keberlanjutan fungsi, proses, dan produktivitas ekosistem** yang mampu menunjang kehidupan setiap manusia dan makhluk lain secara berkelanjutan.
3) Lingkungan Hidup untuk semua adalah Kondisi Lingkungan Hidup yang mampu menyediakan akses Sumber Daya Alam secara adil dan merata, serta mewujudkan **keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali** dan perikehidupan seluruh makhluk hidup secara harmoni baik saat ini hingga di masa mendatang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 254026 A

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

## INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL

Visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat nasional dicerminkan ke dalam 5 (lima) sasaran utama visi yang menegaskan pentingnya pelestarian Lingkungan Hidup. Kelima sasaran utama visi tersebut meliputi:

1. terpulihkannya lahan yang mengalami kerusakan;
2. tercapainya ketahanan air, pangan, dan energi;
3. terwujudnya keberlanjutan Jasa Lingkungan Hidup;
4. terjaganya kelimpahan aset keanekaragaman hayati; dan
5. tercapainya *net zero emission*.

Untuk mewujudkan visi dan sasaran utama tersebut, maka disusunlah indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan terlaksananya kebijakan, strategi, dan program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional. Indikator ini juga digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi RPPLH nasional 2025-2055.

Indikator kinerja utama RPPLH nasional memuat 3 (tiga) indikator, dengan parameter terukur di dalamnya. Ketiga indikator ini menjadi ukuran keberhasilan dari setiap kebijakan RPPLH nasional pada seluruh pulau/kepulauan. Indikator ini juga mendukung dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN). Ukuran kinerja yang diukur dalam indikator ini, dibagi pada tiga tahapan waktu, yaitu tahun 2030, 2045, dan 2055.

Rincian . . .



Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



Rincian indikator kinerja utama RPPLH nasional disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama RPPLH Nasional

| No | Indikator | Parameter | Baseline | Sasaran Tahun 2030 | Sasaran Tahun 2045 | Sasaran Tahun 2055 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Hanya Pulau Jawa yang berstatus "Terlampaui" | Enam Pulau kecuali Pulau Jawa tetap berstatus "Tidak Terlampaui" | Seluruh pulau berstatus "Tidak Terlampaui" | Seluruh pulau berstatus "Tidak Terlampaui" |
| | | Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup | Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 0,57 | Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup >0,57 | Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup >0,6 | Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup >0,65 |
| 2 | Mutu Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,54 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup >73,5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup >76 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup >77,5 |

Timbulan . . .

Diunduh dari lexjustisia.or.id/pp/26-2025 | Sumber asli: JDIH Kementerian Kehutanan | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi negara (gunakan Lembaran/Berita Negara).



| No | Indikator | Parameter | Baseline | Sasaran Tahun 2030 | Sasaran Tahun 2045 | Sasaran Tahun 2055 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | Tingkat daur ulang timbulan sampah 11% | Tingkat daur ulang timbulan sampah >20% | Tingkat daur ulang timbulan sampah >35% | Tingkat daur ulang timbulan sampah >50% |
| 3 | Kelimpahan Aset Keanekaragaman Hayati | Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati | Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati 0,35 | Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati 0,48 | Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati 0,75 | Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati >0,8 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 139946 C